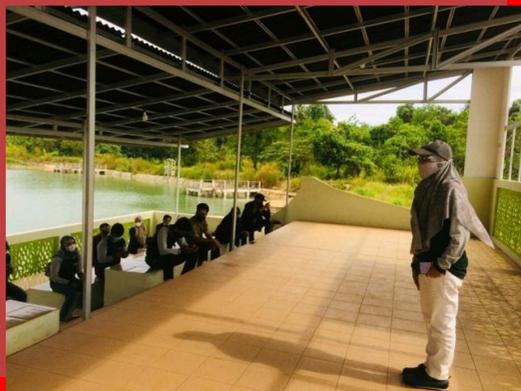


LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

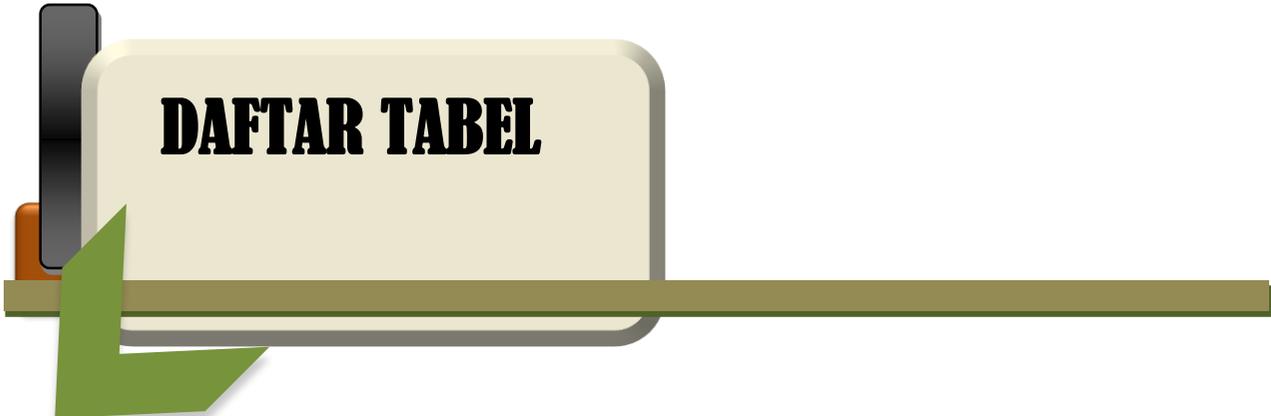


**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	8
KATA PENGANTAR	9
B A B I PENDAHULUAN	10
1.1.Latar Belakang	10
1.2 Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok	11
1.3 Struktur Organisasi.....	15
1.4 Isu Strategis SKPD.....	19
1.5 Sistematika Penyajian	21
B A B II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021	22
2.2.1 Visi dan Misi Kalimantan Selatan.....	22
2.2.2 Tujuan	23
2.2.3 Sasaran	23
2.2.4 Strategi.....	24
2.2.5 Kebijakan.....	26
2.2.6 Program dan Kegiatan.....	26
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	30
B A B III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi	40
3.1.1. SEKRETARIAT.....	63
3.1.1.1. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	67
3.1.1.2. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	70
3.1.1.3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN.....	72
3.1.2 BIDANG TATA LINGKUNGAN	76
3.1.2.1 SEKSI PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	80
3.1.2.2. SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN.....	83
3.1.2.3. SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	88
3.1.3 BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN KEMITRAAN	99
3.1.3.1 SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	105
3.1.3.2. SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B3.....	109
3.1.3.3. SEKSI KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	113
3.1.4 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH	118

3.1.4.1.	SEKSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	135
3.1.4.2.	SEKSI PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP	145
3.1.4.3.	SEKSI PENILAIAN KINERJA LINGKUNGAN	150
3.1.5.	BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	158
3.1.5.1.	SEKSI PENGADUAN KASUS LH DAN PENEGAKAN HUKUM	162
3.1.5.2.	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LH	165
3.1.5.3.	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERATURAN HUKUM LH 169	
3.1.6.	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	175
3.1.6.1	KEPALA UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	175
3.1.6.2	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	179
3.1.6.3	KEPALA SEKSI PENGUJIAN	182
3.1.6.4	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN MUTU	186
3.1.7.	UPTD TPA SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA	190
3.1.7.1	KEPALA UPTD TPA SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA	190
3.1.7.2.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	193
3.1.7.3.	KEPALA SEKSI OPERASIONAL UPT TPA SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA	197
3.1.7.4.	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN UPT TPA SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA	199
3.2.	Akuntabilitas Keuangan	202
B A B IV	PENUTUP	232
4.1.	Simpulan	232
4.2.	Strategi Peningkatan Kinerja	232



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja	30
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Esselon 3.....	33
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Esselon 4.....	35
Tabel 5. Kategori Capaian Kinerja	40
Tabel 6. Capaian IKU Gubernur Kalsel Tahun 2021	41
Tabel 7. Perbandingan Capaian IKLH Tahun 2018 - 2021	41
Tabel 8. IKLH Kalsel 2016-2021	44
Tabel 9. Rentang Nilai IKLH	44
Tabel 10. Kriteria dan Indikator IKLH.....	44
Tabel 11. Rumus IKLH Tahun 2020-2024.....	45
Tabel 12. Hasil Perhitungan Sementara Komponen IKLH Kalsel Tahun 2021	46
Tabel 13. Realisasi Kinerja sesuai Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021	49
Tabel 14. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dalam Pencapaian IKU.....	49
Tabel 15. Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.....	51
Tabel 16. Indeks Pencemar	57
Tabel 17. Predikat IKA	57
Tabel 18. Klasifikasi Indeks Kualitas Udara	59
Tabel 19. Parameter Kualitas Air Laut.....	62
Tabel 20. Perbandingan Realisasi dengan Target Sekretaris	63
Tabel 21. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Sekretariat.....	64
Tabel 22. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.....	67

Tabel 23. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	68
Tabel 24. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Sub Bagian	70
Keuangan dan Aset	70
Tabel 25. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset.....	70
Tabel 26. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	72
Tabel 27. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	73
Tabel 28. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Bidang Tata Lingkungan.....	76
Tabel 29. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Bidang Tata Lingkungan.....	76
Tabel 30. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	80
Tabel 31. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	81
Tabel 32. Daftar Verifikasi RPPLH Kabupaten/Kota Tahun 2021.....	82
Tabel 33. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan.....	83
Tabel 34. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan.....	84
Tabel 35. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.....	88
Tabel 36. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.....	89
Tabel 37 : Perubahan emisi GRK historis 2011 - 2020, dan target penurunan emisi dan serapan GRK sektoral dan agregatnya di Kalimantan Selatan hingga tahun 2030	93
Tabel 38 : Rekapitulasi Proklamasi di Kalimantan Selatan.....	94
Tabel 39. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan.....	99
Tabel 40. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan.....	99
Tabel 41. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan	105
Tabel 42. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan	106

Tabel. 43 Daftar Penetapan Hasil Penilaian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan	107
Tabel 44. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3	110
Tabel 45. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3	110
Tabel 46. Daftar Perusahaan yang diawasi pengelolaan Limbah B3 secara langsung	112
Tabel 47. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat	113
Tabel 48. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat	114
Tabel 49. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	118
Tabel 50. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	118
Tabel. 51 : Data Hasil Pemantauan Tahun 2021	120
Tabel 52. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup	135
Tabel. 53 Status Mutu Air per Titik Pantau dengan Metode Indeks Pencemaran	135
Tabel 54. Perbandingan Status Mutu Air Sungai Tahun 2020-2021	138
Tabel 55. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup	139
Tabel 56. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup	145
Tabel 57. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup	145
Tabel 58. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Penilaian Lingkungan	150
Tabel 59. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Penilaian Lingkungan	151
Tabel 60. Perusahaan PROPERDA Tahun 2020	153
Tabel 61. Peringkat kinerja Perusahaan PROPERNAS Periode Tahun 2020-2021 ...	153
Tabel 62. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	158
Tabel 63. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	159
Tabel 64. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pengaduan Kasus LH dan Penegakan Hukum	162

Tabel 65. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Pengaduan Kasus LH dan Penegakan Hukum	162
Tabel 66. Daftar Perusahaan Pengaduan yang dilimpahkan	163
Tabel 67. Daftar Perusahaan diselesaikan oleh Dinas LH. Prov. Kalsel	164
Tabel 68. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan LH.....	165
Tabel 69. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan LH	166
Tabel 70. Capaian Pengawasan 2017-2021.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 71. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Peraturan Hukum LH.....	169
Tabel 72. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Peraturan Hukum LH	170
Tabel 73. Data Inventarisasi MHA.....	171
Tabel 74. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan.....	175
Tabel 75. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan.....	175
Tabel 76. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Laboratorium Lingkungan.....	179
Tabel 77. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Laboratorium Lingkungan.....	180
Tabel 78. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pengujian UPT. Laboratorium Lingkungan.....	182
Tabel 79. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Kepala Seksi Pengujian UPT Laboratorium Lingkungan.....	183
Tabel 80. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pengendalian Mutu UPT Laboratorium Lingkungan	186
Tabel 81. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Kepala Seksi Pengendalian Mutu UPT Laboratorium Lingkungan	187
Tabel 82. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala UPTD TPA Sampah Regional Banjarkakula.....	190
Tabel 83. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala UPTD TPA Sampah Regional Banjarkakula	191
Tabel 84. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD TPA Sampah Regional Banjarkakula.....	193
Tabel 85. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD TPA Sampah Regional Banjarkakula.....	194

Tabel 86. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Operasional UPT TPA Sampah Regional Banjarkakula.....	197
Tabel 87. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Kepala Seksi Operasional UPT TPA Sampah Regional Banjarkakula	198
Tabel 88. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pemeliharaan UPT TPA Sampah Regional Banjarkakula	199
Tabel 89. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Kepala Seksi Pemeliharaan UPT TPA Sampah Regional Banjarkakula	200



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. PNS Dinas LH	15
Gambar 2. Tenaga Kontrak Dinas LH.....	16
Gambar 4. Rasio Jenis Kelamin PNS dan Tenaga Kontrak Dinas LH	16
Gambar 5. Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan	18
Gambar 6. Struktur Organisasi UPT TPA Sampah Regional Banjarbakula	18
Gambar 7. IKLH Regional Kalimantan Tahun 2021	42
Gambar 8. Tren IKLH Regional Kalimantan s.d Tahun 2020	42
Gambar 9. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dalam Pencapaian IKU	50
Gambar 10. Tren IKLH Provinsi Kalsel 2016 s.d 2021.....	55
Gambar 11. Tren Indeks Kualitas Air Kalsel 2016 s.d 2021	56
Gambar 12. Tren Indeks Kualitas Udara Kalsel 2016 s.d 2021	59
Gambar 13. Skema Perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	61
Gambar 14. Tren Indeks Kualitas Lahan Kalsel 2016 s.d 2021	61
Gambar 15 . Grafik Perolehan Adiwiyata Tingkat Provinsi.....	115
Gambar 16 . Grafik Perolehan Adiwiyata Tingkat Nasional	115
Gambar 17 . Grafik Perolehan Adiwiyata Tingkat Mandiri.....	116



KATA PENGANTAR

Pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup harus mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang berorientasi lingkungan dengan memperhatikan kondisi lingkungan saat ini dan yang akan datang. Sebagai wujud upaya pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas dalam pencapaian “*Good Governance*”, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel telah menetapkan indikator kinerja utama, sebagai tolok ukur keberhasilan DLH secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi DLH.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam Laporan Kinerja memuat evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Demikian Laporan kinerja Tahun 2020 ini disusun, dan disadari masih adanya kekurangan dalam Laporan Kinerja ini sebagai bahan perencanaan kegiatan selanjutnya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HANIFAH DWI NIRWANA, ST. MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19710321 199803 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan yang sehat dan bersih perlu adanya penanganan yang serius, agar lingkungan hidup tidak mengalami kemerosotan/degradasi. Penanganan kualitas lingkungan hidup menjadi urusan wajib bagi pemerintah dan masyarakat.

Pelaksanaan kinerja dalam satu tahun anggaran dilaporkan dalam Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama satu tahun berjalan sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan upaya peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel.

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel;
2. Pertanggung jawaban dari unit kerja yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

Perubahan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan dapat kita lihat dari fenomena alam seperti adanya banjir, kekeringan, curah hujan yang ekstrim, dan lainnya. Oleh sebab itu pemulihan, pengawasan dan pemantauan terhadap kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Selatan menjadi prioritas. Untuk menangani masalah lingkungan tersebut, salah satunya dengan dibentuklah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Daerah Provinsi Kalsel. Seiring dengan perkembangan pembagian kewenangan urusan pemerintahan daerah, maka dilakukan pemetaan urusan dengan didukung variabel data umum dan data teknis yang telah ditentukan. Berdasarkan Kepmen LHK No. SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tanggal 16 Agustus 2016, urusan Pemerintahan Daerah Prov. Kalsel Bidang LH memiliki beban kerja besar. Kemudian ditetapkan Perda Provinsi Kalsel Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalsel Tanggal 14 November 2016, yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tipe A. Selanjutnya kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 72 Tahun 2016. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Unsur-unsur organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tata Lingkungan;
- c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan;
- d. Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
8. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel memiliki 2 (dua) UPT yaitu UPT Laboratorium Lingkungan dan UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula. UPT Laboratorium lingkungan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 067 Tahun 2017 tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 15 Agustus 2017. Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan melaksanakan pengujian parameter kualitas dan lingkungan serta pengendalian mutu. Uraian tugas Laboratorium lingkungan sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan preparasi sarana pengujian dan analisa parameter kualitas lingkungan;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur pengujian dan analisa parameter kualitas lingkungan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelayanan pengujian contoh/bahan sampel secara laboratoris;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan standar kompetensi pengelolaan sumber daya laboratorium dan manajemen mutu laboratorium lingkungan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi penanganan pengaduan hasil pengujian; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengujian contoh/sampel sesuai parameter kualitas lingkungan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian standar kompetensi sumber daya dan manajemen mutu laboratorium lingkungan
- d. pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan

UPT TPA Sampah Regional Banjarbakula dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 0156 Tahun 2017 tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 27 Desember 2017. UPT TPA Sampah Regional Banjarbakula mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan operasional pemrosesan akhir sampah secara terpadu dan terintegrasi lintas kabupaten/kota. Uraian tugas UPT TPA Sampah Regional yaitu:

- a. menyusun program dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan TPA Sampah Regional Banjarbakula;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan operasional pemrosesan

sampah dan pemantauan dampak lingkungan TPA Sampah Regional Banjarbakula;

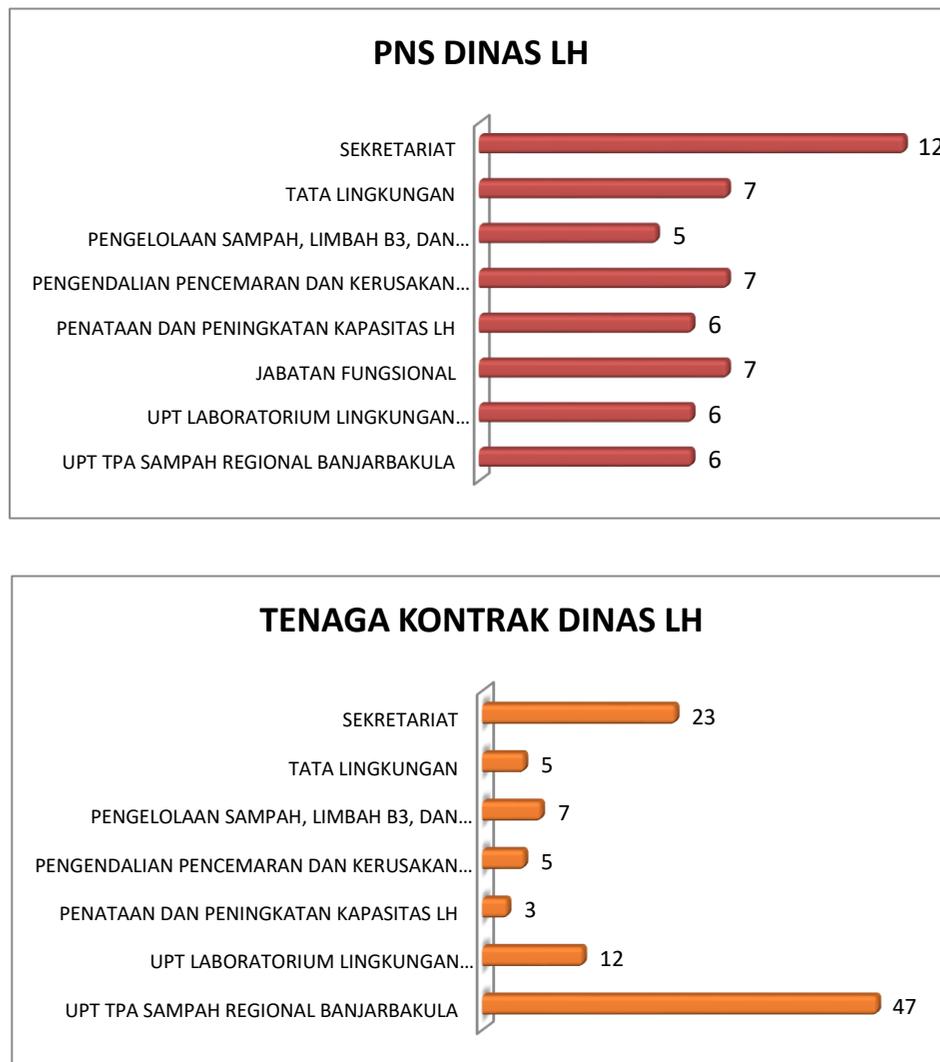
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA Sampah Regional Banjarbakula;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah;
- e. membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

UPT TPA Sampah Regional Banjarbakula mempunyai fungsi:

- g. penyusunan program dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan pengelolaan TPA Regional Banjarbakula;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan operasional pemrosesan sampah dan pemantauan sampah lingkungan TPA Sampah Regional Banjarbakula;
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA Sampah Regional Banjarbakula;
- j. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah, dan:
- k. pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan.

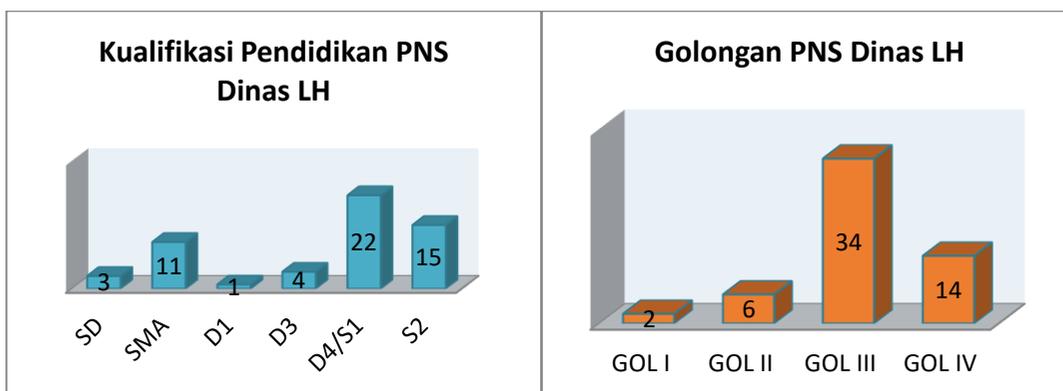
1.3 Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalsel dalam menjalankan tugasnya didukung 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis dengan total PNS sebanyak 56 orang dan tenaga kontrak 102 orang dari berbagai tingkat pendidikan. Adapun Jumlah dan kualifikasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 4 dan 5 berikut.

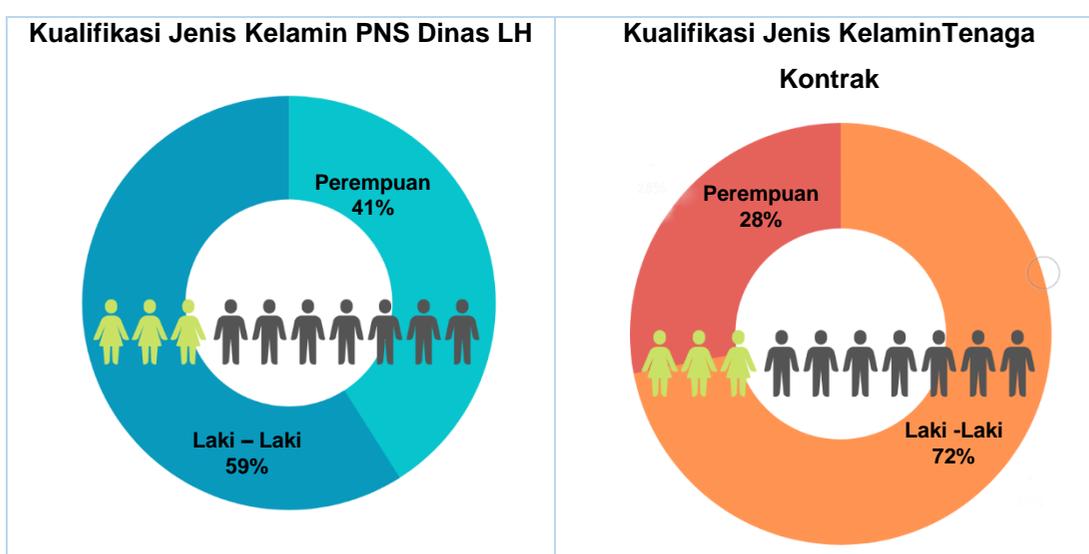


Gambar 1. PNS Dinas LH

Gambar 2. Tenaga Kontrak Dinas LH

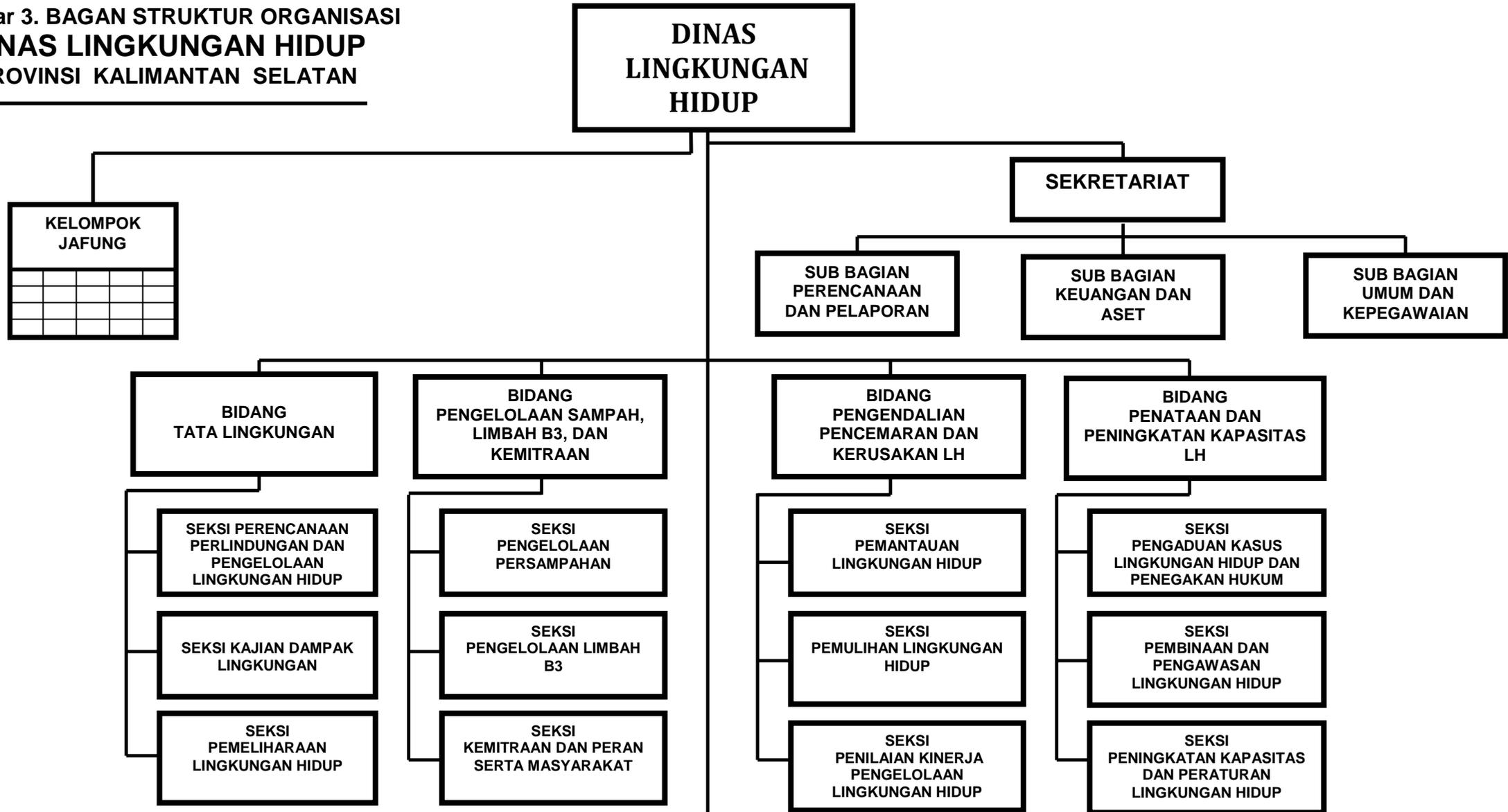


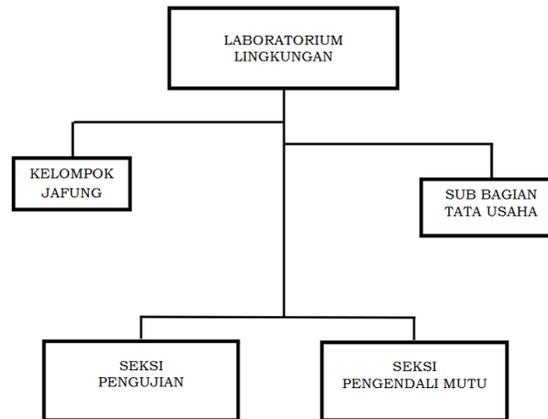
Gambar 3. Kualifikasi Pendidikan dan Golongan PNS Dinas LH



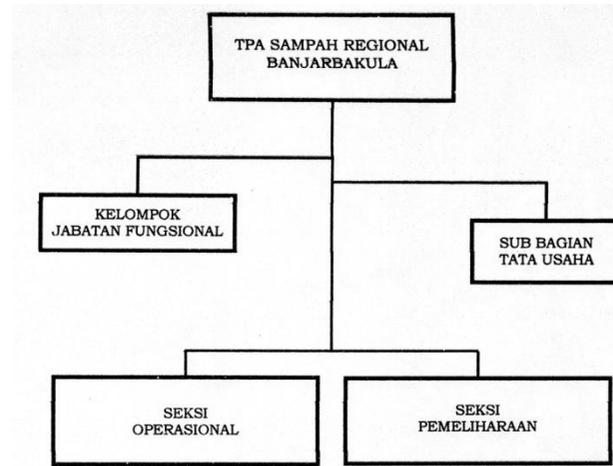
Gambar 4. Rasio Jenis Kelamin PNS dan Tenaga Kontrak Dinas LH

Gambar 3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





Gambar 5. Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan



Gambar 6. Struktur Organisasi UPT TPA Sampah Regional Banjarbakula

1.4 Isu Strategis SKPD

Isu strategis sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

- a. Menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup yang digambarkan dengan indeks kualitas air, udara, dan tutupan hutan. Penurunan kualitas dan kuantitas air sungai sebagai sumber air bersih dan adanya intrusi air laut. Peningkatan polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan serta emisi gas buang kendaraan bermotor daerah perkotaan. Kurangnya tutupan lahan berupa vegetasi hijau;
- b. Dalam waktu 20 tahun ke depan, kerusakan lapisan ozon akan semakin meluas sehingga memicu perubahan iklim dan pemanasan global yang berpotensi pada pergantian musim yang tidak teratur, mutasi gen, perubahan cuaca dan lingkungan. Bencana ekologis berupa banjir, tanah longsor dan asap merupakan ancaman serius bagi masyarakat, sehingga pembangunan daerah ke depan harus mengantisipasi kemungkinan bencana dan dampak yang ditimbulkan.
- c. Pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan kaidah konservasi, baik yang legal maupun illegal, cenderung merusak lingkungan hidup, apalagi dengan meningkatnya demand akan SDA mengakibatkan rangsangan terhadap terjadinya *illegal mining*, *illegal logging* dan *illegal fishing* yang cenderung telah menjadi sistem yang sulit dikendalikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kurun waktu 20 tahun kedepan Kalimantan Selatan harus bertekad untuk memproyeksikan daerahnya, menjadi daerah yang mampu mengelola SDA dan lingkungan secara efisien, mandiri dan ramah lingkungan. Terwujudnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan setelah merasakan sendiri susahnya hidup dalam kondisi lingkungan hidup yang rusak, serta terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan daya dukungnya diarahkan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, generasi sekarang dan selanjutnya.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai peran dan kedudukan yang strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Selatan. Hal ini didukung dengan adanya Pengembangan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup sehingga memberikan kewenangan lebih; Adanya Kerjasama dengan instansi terkait, perkembangan kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi nonpemerintah, serta tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik memberikan peluang pada Dinas LH untuk melakukan berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan. Hal ini didukung pula dengan Regulasi, seperti peraturan perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Potensi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ditandai dengan adanya sertifikat; Adanya perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk standardisasi meliputi pengujian, kompetensi personil, sistem manajemen lingkungan, dan ecolabel; serta adanya program-program inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, Adiwiyata, , Eco-Office serta Program Sungai Martapura Bungas yang diinisiasi oleh Dinas lingkungan Hidup Prov. Kalsel sendiri.

Mengingat dampak lingkungan hidup ada yang tidak dapat dirasakan dalam waktu segera (hanya jangka panjang), maka penanganan/pembinaan terhadap pengusaha/masyarakat yang berhubungan dengan lingkungan hidup mutlak dilakukan agar dalam jangka panjang tidak menimbulkan penderitaan bagi anak cucu kita. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan juga berperan dalam isu lingkungan internasional, dimana iklim pemanasan global sudah sangat terasa, sebagai contoh semakin tidak jelasnya batas antara musim hujan dan musim panas.

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian LAKIP adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani, serta permasalahan utama (*strategic issued*) organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja. Menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2018, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2018.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

2.2.1 Visi dan Misi Kalimantan Selatan

Visi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah

“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari, dan Berdaya Saing”.

Visi tersebut secara umum mengandung pengertian “Pembangunan Biru (*blue development*) Menuju Kedaulatan dan Kemampuan Berkelanjutan”, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan Biru (*blue development*) adalah pembangunan yang memperhatikan keberadaan sumberdaya, mempertahankan keragaman (*biodiversity*), inovasi dan penciptaan lapangan kerja sekaligus melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan (*konservasi*) dan meningkatkan jasa-jasa lingkungan.
2. Ekonomi biru (*blue economy*) yaitu sistem ekonomi berbasis inovasi yang memanfaatkan SDA secara produktif dan efisien, tidak menghasilkan limbah dan emisi; dan pada saat yang sama mampu menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan tidak memerlukan biaya tinggi.
3. Kedaulatan dan Kemampuan Berkelanjutan; yaitu Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang memperhatikan keseimbangan antara pencapaian aspek pertumbuhan ekonomi (*economy growth*), sekaligus memperhatikan pemerataan kesejahteraan (*social equity*) dan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan (*ecological sustainability*) yang dikenal dengan *the living triangle*.

Upaya mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2016– 2021 tersebut, maka misi pembangunan Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil;
2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik;
3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasis Kearifan Lokal;
4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya;
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Keterkaitan antara visi dan misi pembangunan Kalimantan Selatan dengan Dinas Lingkungan Hidup yakni pada misi kelima yakni Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan. Misi kelima tersebut dijabarkan dengan tujuan yakni meningkatkan daya saing perekonomian dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah.

2.2.2 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup.

2.2.3 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel pada Dinas Lingkungan Hidup.

2.2.4 Strategi

Guna mencapai sasaran diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Pengintegrasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Hal ini dilakukan dengan menyusun naskah perencanaan lingkungan hidup; mengembangkan sistem pendataan dan informasi; meningkatkan pengelolaan data dan informasi berbasis sistem informasi geografis; meningkatkan penataan lingkungan hidup sesuai dengan tata ruang.

2. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Hal ini dilakukan dengan mengendalikan pencemaran melalui pemantauan kualitas air dan udara; mengendalikan pencemaran akibat limbah B3; dan melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar.

3. Peningkatan pengelolaan persampahan.

Strategi ini dapat dijalankan antara lain dengan mengoperasikan TPA Regional; melaksanakan penetapan perjanjian kerja sama mengenai Tipping Fee TPA Regional; membuat peraturan ataupun rencana aksi dan gerakan terkait penanganan/pengurangan sampah.

4. Pengendalian dampak perubahan iklim.

Hal ini dilakukan dengan pemantauan terhadap emisi gas rumah kaca; melakukan upaya pembinaan dalam hal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

5. Peningkatan sinergi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan instansi/ stakeholder terkait.

Strategi ini dapat dijalankan antara lain dengan koordinasi dalam penilaian dan evaluasi dokumen lingkungan; melakukan pembinaan dan penilaian kinerja terhadap perusahaan; melakukan pembinaan terhadap institusi pendidikan agar berwawasan lingkungan, serta melakukan pembinaan dan koordinasi dengan kab/kota dalam menciptakan kota bersih dan sehat

6. Peningkatan upaya pemeliharaan lingkungan hidup.
Pemeliharaan lingkungan hidup dapat berupa upaya konservasi flora fauna melalui taman kehati dan konservasi terhadap ekosistem pantai dan laut.
7. Peningkatan upaya pemulihan lingkungan hidup.
Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi terkait perbaikan kualitas lingkungan serta upaya pengelolaan lahan, baik lahan gambut maupun lahan akses terbuka.
8. Penerapan penegakan hukum lingkungan.
Memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap SDA dan Lingkungan Hidup, membuat pos pengaduan dan menindaklanjuti kasus LH.
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagai partner pemerintah dalam pengelolaan SDA dan LH.
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemitraan Dinas LH dengan forum komunitas LH/ organisasi di bidang LH, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan SDA dan LH bagi pembangunan selanjutnya.
10. Penguatan kapasitas laboratorium lingkungan.
Hal ini dapat dilakukan dengan memperoleh/mempertahankan Akreditasi Laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Meningkatkan jumlah parameter yang dapat diuji dan terakreditasi, serta penguatan kapasitas bagi laboratorium lingkungan di kab/kota.
11. Pengembangan kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi aparatur Dinas LH dan menambah jumlah pegawai berdasarkan analisis jabatan dan kompetensi yang diperlukan.
12. Pengadaan sarana dan prasarana operasional
Perlu untuk meningkatkan sarana dan prasaran lingkungan hidup, baik itu untuk menunjang pekerjaan rutin maupun operasional untuk laboratorium lingkungan dan TPA Regional.
13. Pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara akuntabel.

Pelaporan serta evaluasi kinerja secara berkala, baik bulanan maupun triwulan dan semester.

2.2.5 Kebijakan

Arah kebijakan DLH sebagai berikut:

Tahun I :

Pengembangan sistem pendataan dan informasi, Penguatan jejaring lingkungan hidup dan kelembagaan di bidang lingkungan hidup.

Tahun II:

Pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah B3, serta peningkatan upaya pengawasan dan penegakan hukum LH.

Tahun III:

Peningkatan upaya pengendalian pencemaran, konservasi lingkungan, pengelolaan lahan gambut maupun akses terbuka, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta pembinaan dan koordinasi dengan kab/kota dalam menciptakan kota bersih dan sehat.

Tahun IV:

Peningkatan upaya pengendalian pencemaran, penegakan hukum LH, penanganan/pengurangan sampah, pembinaan terhadap institusi pendidikan, serta peningkatan kemitraan masyarakat

Tahun V:

Percepatan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup

2.2.6 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut antara lain:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Perencanaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dengan sub kegiatan :
 - a. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi dengan sub kegiatan :

a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan sub kegiatan :

a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

2. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan sub kegiatan :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :

a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :
 - a. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :
 - a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi dengan sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

Program Pengelolaan Persampahan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
 - b. Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja pada Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.

Perjanjian Kinerja berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,26

Sasaran strategis DLH selaras dengan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 yakni Kalsel Menuju Lingkungan yang Berkualitas akan dicapai dengan strategi yakni menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Indeks atau indikator merupakan sarana yang digunakan untuk mereduksi banyaknya data dan informasi sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana namun esensinya tetap dapat dipertahankan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. Secara konseptual, pertama, nilai IKLH bersifat komparatif, artinya nilai satu provinsi relatif terhadap provinsi lainnya. Kedua, masing-masing provinsi memberi kontribusi terhadap nasional secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya terhadap total penduduk dan luas wilayah Indonesia. Dalam perspektif IKLH, nilai indeks ini bukan semata-mata peringkat, juga merupakan indikasi upaya untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup di tingkat provinsi dan nasional.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan DANIDA menunjuk tim konsultan untuk menyusun indeks kualitas lingkungan pada tahun 2009. Tim konsultan kemudian mengajukan konsep yang merupakan adopsi dari EPI. Selain itu BPS juga sejak tahun 2008 mengembangkan indeks kualitas lingkungan perkotaan. Dari berbagai seminar yang diadakan oleh BPS dan *focus discussion group* (FGD) yang diadakan oleh KLH bekerjasama dengan DANIDA, akhirnya diputuskan untuk mengadopsi konsep indeks yang dikembangkan oleh BPS dan VCU yang dimodifikasi. Konsep IKLH, seperti yang dikembangkan oleh BPS, hanya mengambil tiga indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. Berbeda dengan BPS, IKLH dihitung pada tingkat provinsi sehingga dapat menghasilkan indeks tingkat nasional. Perbedaan lain dari konsep yang dikembangkan oleh BPS dan VCU adalah setiap parameter pada setiap indikator digabungkan menjadi satu nilai indeks. Penggabungan parameter ini dimungkinkan karena ada ketentuan yang mengaturnya, seperti:

- 1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman ini juga mengatur tatacara penghitungan Indeks Pencemaran Air (IPA).
- 2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara.

Pada IKLH 2009 hingga 2011 dilakukan penyempurnaan agar IKLH lebih mencerminkan kondisi senyatanya di lapangan. Hal yang disempurnakan adalah perubahan titik acuan dan metode perhitungan. Sebagai pembandingan atau target untuk setiap indikator adalah standar atau ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti ketentuan tentang baku mutu air dan baku mutu udara ambien. Selain itu dapat digunakan juga acuan atau referensi universal dalam skala internasional untuk mendapatkan referensi ideal (*Benchmark*).

Pada IKLH 2012, struktur IKLH relatif sama dengan yang sebelumnya, yaitu terdiri dari 3 (tiga) indikator, namun ada perubahan dalam pembobotan. Hal ini mengingat perlu adanya keseimbangan antara indikator yang mewakili *green issues* (isu hijau) dan *brown issues* (isu coklat). Isu hijau adalah pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang

menangani aspek-aspek konservasi atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Isu hijau seharusnya memiliki kontribusi yang sama terhadap IKLH, namun karena hanya diwakili 1 (satu) indikator, yaitu tutupan hutan, maka bobotnya lebih besar dibanding indikator lainnya yakni 40%.

Sedangkan isu coklat menangani isu pencemaran lingkungan hidup yang pada umumnya berada pada sektor industri dan perkotaan. indikator udara dan air yang mewakili isu coklat memiliki bobot sama yakni masing-masing 30%.

Indeks kualitas air (IKA) merupakan angka yang menunjukkan gambaran atau indikasi awal untuk memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi kualitas air pada lingkup dan periode tertentu. Begitu pula dengan indeks kualitas udara (IKU) merupakan angka yang menunjukkan gambaran atau indikasi awal untuk memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi kualitas udara pada lingkup dan periode tertentu. Kondisi kualitas air ataupun udara yang dapat diterjemahkan dalam angka ini diharapkan dapat mempermudah semua pemangku kepentingan dalam memahami kualitas air ataupun udara apakah dalam kategori baik, sedang, atau buruk sehingga dapat dijadikan data dasar yang membantu proses pembuatan keputusan atau kebijakan. Semakin jauh dengan angka 100, mengindikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan.

Perhitungan IKA dan IKU merupakan data dasar dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penyusunan IKLH terkait erat dengan kebutuhan sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 yang memuat sasaran dan arah kebijakan terkait Isu strategis. Selain itu dalam RPJMN menyebutkan kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan IKLH.

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, air sungai juga menjadi sumber air baku untuk kebutuhan lainnya seperti industri, pertanian, dan pembangkit listrik. Sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah. Karena peranannya tersebut,

maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup.

Udara merupakan komponen lingkungan abiotik penyusun ekosistem yang penting bagi kehidupan. Udara termasuk kebutuhan dasar bagi makhluk hidup dalam melangsungkan kehidupannya. Perhitungan ITH merupakan data dasar dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tutupan hutan merupakan bagian dari isu hijau yakni pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang menangani aspek-aspek konservasi atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Isu hijau seharusnya memiliki kontribusi yang sama terhadap IKLH, namun karena hanya diwakili 1 (satu) indikator yakni tutupan hutan, maka bobotnya lebih besar dibanding indikator lainnya dalam perhitungan IKLH.

Pada Tahun 2020, terdapat perubahan dalam perhitungan IKLH. Tahun 2020, IKLH menyertakan nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Rumus perhitungan IKLH untuk Provinsi yaitu 34% untuk bobot IKA, 42.8% untuk bobot IKU, 13.3% untuk Indeks Kualitas Lahan, dan 9.9% untuk IKAL.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Esselon 3

1. Sekretaris

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan pada Dinas LH Prov. Kalsel	Nilai Akuntabilitas kinerja	83
		Nilai kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	90
		Persentase hasil temuan APIP/BPK yang ditindaklanjuti	100%

2. Kepala Bidang Tata Lingkungan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pengendalian Terhadap Lahan/Ekoregion yang Terdampak	Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan	100%
2	Menurunkan emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK dari Business As Usual	16.5%

3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kemitraan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkannya kinerja pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah di Kalsel	98%
2.	Meningkatnya pengelolaan limbah B3.	Persentase usaha dan/kegiatan yang menerapkan pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan	100%
3.	Meningkatnya peran serta institusi maupun masyarakat di bidang lingkungan hidup	Presentase peran serta mitra dan masyarakat dalam pelestarian LH	100%

4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya status mutu air sungai	Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter Indeks Kualitas Air	11.54%
2.	Meningkatnya kualitas udara Menjadi kategori baik dan sangat baik	Persentase kualitas udara dengan kategori baik dan sangat baik	100%
3.	Meningkatnya pengelolaan ekosistem gambut	Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	53.65
4.	Meningkatnya kualitas air laut di lokasi pantau dengan kategori baik	Persentase air laut dengan kualitas kategori baik	17.39%

5. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketaatan dunia usaha dalam tata kelola lingkungan hidup	Persentase dunia usaha yang taat terhadap pengelolaan lingkungan	100%
2.	Meningkatnya pengakuan MHA terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	Tahun 2021 belum ada kegiatan (masih dalam tahap inventarisasi)

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Esselon 4

1. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan Dinas LH	Persentase pencapaian komponen perencanaan yang berkualitas sesuai sistem AKIP	97%
2	Meningkatnya kualitas evaluasi dan pelaporan Dinas LH	Persentase pencapaian komponen evaluasi dan pelaporan yang berkualitas sesuai sistem AKIP	78%

2. Kasubag Keuangan dan Aset

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan	Presentasi penyerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan	100 %
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Presentase aset yang dikelola sesuai ketentuan	100 %

3. Kasubag Umum dan Kepegawaian

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran	100%
		Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi kepegawaian	100%
		Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase dokumentasi pelayanan surat menyurat	100%
2	Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase PNS dengan IP ASN tinggi	17.7%

4. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan LH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penjaminan Jasa Lingkungan	Persentase Jasa Lingkungan yang ditingkatkan / dipertahankan	35.89%

5. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya luasan dampak lingkungan yang terkendali	Persentase Luasan lahan terganggu yang terkendali	49.98%
2	Meningkatnya penjaminan resiko pengamanan lingkungan	Persentase luasan yang dijamin pengamanan lingkungannya	42%

6. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Energi dan Tutupan Lahan	1. Persentase pengurangan emisi GRK di Sektor Energi	14.70%
		2. Persentase pengurangan emisi GRK di Sektor Tutupan Lahan	28.10%

7. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pengurangan dan penanganan sampah	1. Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	24%
		2. Persentase Penanganan sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga	74%
2	Menurunnya timbulan sampah di Pantai	Persentase pengurangan timbulan sampah di pantai	55.6%

8. Kepala Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya partisipasi dunia usaha, dunia pendidikan, komunitas dan masyarakat dalam pelestarian LH.	1. Persentase sekolah yang berbudaya lingkungan 2. Persentase kampung atau desa yang melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 3. Persentase peningkatan pelestari lingkungan 4. Persentase partisipasi komunitas yang melakukan kegiatan pelestarian lingkungan 5. Presentase dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan pelestarian LH	100% 100% 100% 100% 100%

9. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya persentase pemenuhan komitmen ijin pengumpulan LB3	Persentase ketaatan penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat dan pengolah limbah B3 Persentase pemenuhan komitmen aturan pengumpulan Limbah B3	95% 100%

10. Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	Persentase penurunan Indeks Pencemar Sungai	76.92%
2	Meningkatnya Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu	100%

11. Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya restorasi lahan gambut	1. Persentase lahan gambut rusak yang direstorasi 2. Persentase IPG yang berfungsi 3. Persentase luasan revegetasi lahan gambut	20% 66.89% 26.90%
2	Meningkatnya luasan yang terpulihkan dari kerusakan lingkungan hidup	1. Persentase Luas Lahan Akses Terbuka yang dipulihkan	1%
3	Meningkatnya luasan Mangrove Kondisi baik	1. Persentase luasan Mangrove kondisi baik	81%

12. Kepala Seksi Penilaian Kinerja Pengelolaan LH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja perusahaan dalam pengelolaan kualitas lingkungan	Persentase Sumber Pencemaran dan/atau kerusakan LH yang diisolasi	Tahun 2021 belum ada kegiatan

13. Kepala Seksi Pengaduan Kasus LH dan Penegakan Hukum

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian terhadap kasus lingkungan hidup	1. Persentase penyelesaian kasus LH yang dilimpahkan pada pihak yang berwenang	100%
		2. Persentase tindak lanjut (penanganan) kasus LH	100%

14. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan LH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dunia usaha yang menerapkan dokumen lingkungan	1. Persentase dunia usaha yang menerapkan dokumen lingkungan	100 %
		2. Persentase dunia usaha yang memenuhi kriteria lebih dari yang disyaratkan	14%

15. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Peraturan LH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya MHA yang diusulkan	Persentase luas kawasan MHA yang diusulkan untuk mendapatkan pengakuan	18%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

Indikator kinerja sasaran tahun 2021 menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, diharapkan capaian indikator kinerja sasaran ini dapat menggambarkan sasaran yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selama tahun 2021, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Diharapkan juga dapat sebagai pertanggungjawaban kepada publik sebagai manifestasi akuntabilitas DLH Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk memudahkan mendapatkan gambaran umum capaian kinerja secara keseluruhan dilakukan kategori capaian kinerja berdasarkan skala ordinal pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
2	80% < capaian ≤ 90%	Memuaskan
3	70% < capaian ≤ 80%	Sangat Baik
4	60% < capaian ≤ 70%	Baik
5	50% < capaian ≤ 60%	Cukup
6	Kurang dari 50%	Kurang

Untuk capaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel hingga tahun 2021 yakni (1) Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dapat diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target IKLH Kalsel Tahun 2021 di dokumen RPJMD sebesar 70.26. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi IKLH Tahun 2021 sebesar 71.03.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Gubernur Kalsel yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 6. Capaian IKU Gubernur Kalsel Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70.26	71.03	101.09%

Persentase capaian kinerja utama tersebut jika dibandingkan dengan kategori capaian pada Tabel 2. Kategori Capaian Kinerja, maka dapat dikatakan termasuk sangat memuaskan (capaian di atas 90%). Nilai indeks kualitas lingkungan hidup ini merupakan resultan dari upaya menjaga laju deforestasi, pengelolaan sampah dan limbah, upaya rehabilitasi dan pengendalian pencemaran dalam bentuk partisipasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Semakin tinggi angka indeks lingkungan hidup, maka dapat dikatakan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin baik.

Perbandingan IKLH Kalsel dengan tahun sebelumnya dan IKLH Kalsel dengan Provinsi lain dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 7. Perbandingan Capaian IKLH Tahun 2018 - 2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	2021	
		2018	2019	2020		Realisasi	Persentase Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,78	68,38	68,43	70,26	71.03	101.09%

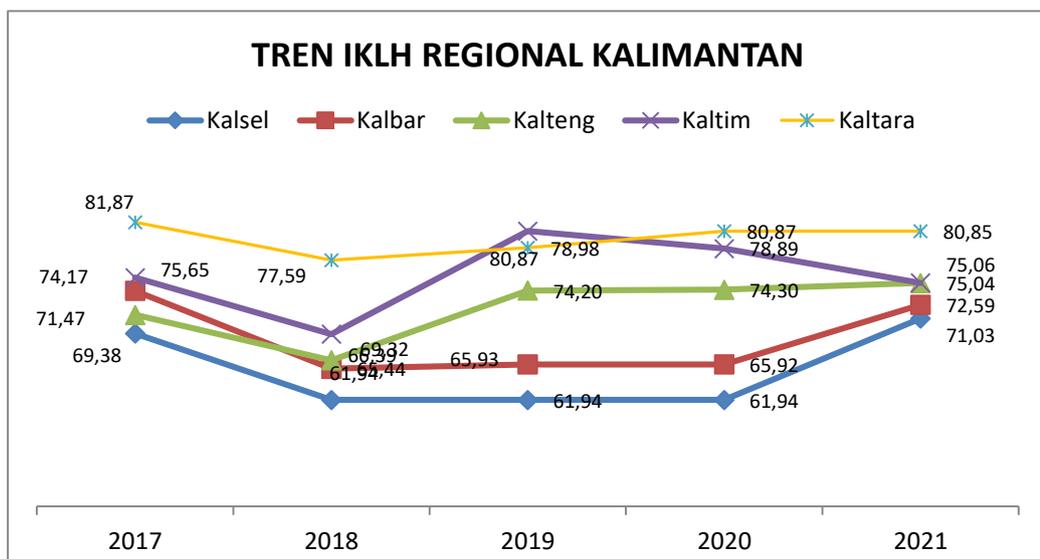
B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan data IKLH Provinsi Kalsel dengan Provinsi lainnya untuk Tahun 2021 masih belum dapat dikomparasi karena data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum dirilis. Sementara yang dapat dikomparasi hanya IKLH pada Tahun 2020. Perbandingan data IKLH Provinsi Kalsel dengan Provinsi lainnya di Ekoregion Kalimantan Tahun 2019 berdasarkan Buku IKLH Tahun 2019 yang dirilis oleh KLHK, dapat disajikan pada gambar 1.



Gambar 7. IKLH Regional Kalimantan Tahun 2021
(Sumber:Ekspse IKLH 2021 Dirjen PPKLH)

Berdasarkan Gambar 7 tersebut, dapat dilihat bahwa IKLH Kalsel Tahun 2021 merupakan yang terendah pada Ekoregion Kalimantan.



Gambar 8. Tren IKLH Regional Kalimantan s.d Tahun 2021
(Sumber:Ekspse IKLH 2021 Dirjen PPKLH)

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan Indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, dimana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten Kota dan Provinsi di Indonesia. Dalam pengembangannya (Tahun 2009-2019) perhitungan IKLH telah mengalami penyempurnaan sebanyak 4 kali. Tahun 2018 terdapat 2 indikator yang disempurnakan yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Para komponen IKA, jumlah parameter yang digunakan bertambah menjadi 10 parameter, yaitu DO, Fecal coliform, COD,pH,BOD, NH3-N, TP, TSS, NO3-N, dan TDS dengan metode Indeks Nasional Sanitation Foundation Water Quality Index (NSF-WQI). Sementara IKTL, parameter yang dinilai selain tutupan hutan, juga menambahkan tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan dan kawasan yang memiliki fungsi lindung (lereng dengan kemiringan >25% dan sempadan sungai, danau, pantai), ruang terbuka hijau, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati. Sementara itu Indeks Kualitas Udara (IKU), parameter yang diukur tetap, yaitu SO₂ dan NO₂.

Pada Tahun 2019, perhitungan IKA dikembalikan lagi seperti tahun 2014 dengan menggunakan 7 parameter. Perhitungan IKA menggunakan indeks pencemar dengan konsep semakin tinggi nilai indeks pencemar semakin buruk kualitas airnya. Metode ini dapat menentukan status mutu air yang dipantau terhadap bakumutu air dengan satu seri data sehingga tidak banyak membutuhkan biaya dan waktu. Bakumutu yang digunakan dalam analisis indeks pencemaran adalah klasifikasi bakumutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Selanjutnya IKA Provinsi dihitung dari rata-rata IKA semua sampel dalam Provinsi tersebut.

Lebih lanjut, apabila selama 5 tahun terakhir nilai IKA dihitung dengan metode yang sama, nilai IKA Nasional berada pada kisaran 58,17 – 62,07. Dengan demikian didapatkan tren IKLH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

Tabel 8. IKLH Kalsel 2016-2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IKA	51,56	52,25	51,43	55,31	51,47	54,75
IKU	85,57	89,02	87,75	88,78	88,93	89,15
IKL	44	49,21	49,29	46,78	48,48	50,26
IKAL	-	-	-	-	-	76,45
IKLH	58,74	62,07	61,47	61,94	68,43	71,03

Sumber: Pusdatin KLHK, 2021

Tabel 9. Rentang Nilai IKLH

Kategori	Rentang Nilai
Sangat Baik	IKLH > 80
Baik	70 < IKLH ≤ 80
Cukup Baik	60 < IKLH ≤ 70
Kurang Baik	50 ≤ IKLH ≤ 60
Sangat Kurang Baik	40 ≤ IKLH < 50
Waspada	30 ≤ IKLH < 40

Sumber: Pusdatin KLHK, 2020

Untuk Predikat IKLH 2021 masih menggunakan nilai sementara pada hasil expose IKLH KLHK 2021. Predikat IKLH Provinsi Kalimantan Selatan berada pada predikat **Baik**. Nilai IKLH ini berada diatas IKLH Nasional (70,06). Sementara itu nilai IKA berada dibawah nilai IKA Nasional (54,75) dalam predikat **Kurang Baik**; Nilai IKU berada diatas IKU Nasional (89,15) dalam predikat **Sangat Baik**; Nilai IKL berada dibawah IKL Nasional (50,26) dalam predikat **Kurang Baik**. Berikut ini adalah klasifikasi penjelasan kualitatif dari angka Indeks.

Tabel 10. Kriteria dan Indikator IKLH

No.	Indikator	Parameter			Bobot Lama	Bobot Baru
		IKLH 2018	IKLH 2019	IKLH 2020-2024		
1.	Kualitas Air Sungai	TSS	TSS	TSS	30%	0.340
		DO	DO	DO		
		BOD	BOD	BOD		
		COD	COD	COD		
		Total Fosfat	Total Fosfat	Total Fosfat		
		Fecal Coliform	Fecal Coliform	Fecal Coliform		
		pH	Total Coliform	pH		
		NH ₃ -N	-	NO ₃ -N		
		NO ₃ -N	-	-		
		TDS	-	-		
2.	Kualitas Udara	SO ₂	SO ₂	SO ₂	30%	0.428
		NO ₂	NO ₂	NO ₂		
3.	Kualitas Tutupan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Luas Tutupan Hutan, belukar, dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan dan kawasan berfungsi lindung (sempadan 	<ul style="list-style-type: none"> Tutupan hutan yang terdiri dari (1) hutan lahan kering primer; (2) hutan lahan kering sekunder/bekas tebangan; (3) hutan 	Tutupan Vegetasi Hutan <ul style="list-style-type: none"> Hutan Lahan Kering Primer (HLKP) 	40%	0.133

- | | | |
|--|---|--|
| <p>sungai, danau, dan pantai, lereng >25%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Terbuka Hijau, Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati | <p>mangrove primer;(4)hutan mangrove sekunder/bekas tebangan;(5)hutan rawa primer;(6)hutan rawa sekunder/bekas tebangan, dan (7) hutan tanaman;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutupan belukar dan beluar rawa pada kawasan hutan • Tutupan belukar dan belukar rawa pada areal penggunaan lain namun berada pada fungsi lindung (kemiringan lereng >25% dan pada sempadan sungai, danau, dan sempadan pantai) • Tutupan berupa Ruang Terbuka Hijau (hutan kota, taman kota), kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati (kehati). | <ul style="list-style-type: none"> • Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS) • Hutan Mangrove Primer (HMP) • Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS) • Hutan Rawa Primer (HRP) • Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS) • Hutan Tanaman <p>Tutupan Vegetasi Non Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau • RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota • Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL) |
|--|---|--|

4.	Kualitas Air Laut	-	-	TSS DO Minyak dan Lemak Amonia Total Orto-Fosfat	0.099
----	-------------------	---	---	--	-------

IKLH dalam RPJMN 2020-2024 terdiri dari 4 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Tabel 11. Rumus IKLH Tahun 2020-2024

IKLH	Rumus
Nasional	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$
Provinsi	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$
Kabupaten/Kota	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$

Berdasarkan Rapat Expose IKLH sementara oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, diperoleh informasi nilai-nilai sementara komponen indeks pembentuk IKLH tahun 2021.

Tabel 12. Hasil Perhitungan Sementara Komponen IKLH Kalsel Tahun 2021

IKA	IKU	IKL	IKAL
54.75	89.15	50.26	76.45

Merujuk pada rumus baru diperoleh nilai IKLH Sementara Prov.Kalsel tahun 2021 yaitu :

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (0.340 \times \text{IKA}) + (0.428 \times \text{IKU}) + (0.133 \times \text{IKL}) + (0.099 \times \text{IKAL}) \\
 &= (0.340 \times 54.75) + (0.428 \times 89.15) + (0.133 \times 50.26) + (0.099 \times 76.45) \\
 &= \mathbf{71.03}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan nilai indeks sementara diatas nilai IKLH Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan sebesar 2,60 poin dibanding tahun 2020 yaitu 68,43 menjadi 71,03. Nilai IKLH ini masih nilai sementara Expose IKLH oleh Dirjen PPKL karena masih dalam proses pengumpulan data-data dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan refresentatif. Nilai Indeks Kualitas Air mengalami kenaikan sebesar 4.49 poin dibanding tahun 2020 yaitu 50,26 menjadi 54.75.

Hasil pemantauan kualitas air berdasarkan hasil analisa ditemukan parameter yang melebihi Baku Mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI. Terdapat beberapa parameter kualitas air sungai yang dominan berkonsentrasi tinggi dan tidak memenuhi baku mutu yaitu parameter BOD, COD, CI bebas, Fecal coli dan Total coliform. Beberapa parameter lain yang berfluktuatif tidak memenuhi baku mutu di beberapa titik pantau namun tidak di setiap tahap pemantauan seperti parameter pH, TSS, Besi (Fe), Mangan (Mn), Sianida (CN), Detergen, Fenol, dan Amoniak (NH₃-N) . Parameter logam berbahaya yaitu Air Raksa (Hg) terdeteksi telah berada di bawah bakumutu pada beberapa sungai sejak tahun 2018 sampai dengan pemantauan tahun 2020 namun karena kendala pengujian di laboratorium penguji maka tahun 2021 parameter Hg tidak bisa diuji. Status mutu air sungai di semua titik pantau berdasarkan perhitungan Metode Indeks

Pencemaran berada dalam status memenuhi - cemar ringan - cemar sedang.

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Kegiatan yang diselenggarakan Tahun 2021 sebagai berikut:

- Penyusunan dan Pelaporan Keuangan dan Aset SKPD, target 5 Laporan, yaitu 4 Laporan Keuangan triwulan, dan 1 Laporan Aset;
- Persentase dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan yaitu sebesar 100% dengan pemenuhan laporan Perencanaan dan Evaluasi sebanyak 36 Laporan;
- Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga 24% terelisasi sejumlah 14,57% dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga 74% terealisasi sejumlah 63,74%, Sosialisasi mengenai pengurangan sampah dengan menggiatkan keaktifan bank sampah di 13 kab/kota se Kalsel. Penetapan hasil penilaian bank sampah di lingkup Pemprov Kalsel sebanyak 3 Bank Sampah;
- Pembinaan pada sekolah adiwiyata yang lolos, terdapat 57 sekolah adiwiyata provinsi, adiwiyata nasional, adiwiyata mandiri;
- Untuk dunia usaha, instansi dan komunitas ada sebanyak 40 Mitra Proklamasi dari dunia usaha, 10 Mitra dari dunia usaha dalam kegiatan WCD 2021, 34 Instansi yang berpartisipasi dalam penilaian Perkantoran Ramah Lingkungan dan ada sebanyak 11 Komunitas Lingkungan yang berpartisipasi dalam kegiatan DLH dalam Program Sungai Martapura Bungas;
- Untuk kegiatan Kalpataru didapatkan sebanyak 9 usulan dari Provinsi Kalimantan Selatan dan yang lolos terdapat 1 penerima penghargaan Kalpataru;
- Program Kampung Iklim dimana didapatkan sebanyak 75 desa/lokasi disemua kategori;
- Kegiatan Sasangga Banua ada usulan Pemda sebanyak 8 usulan, 6 usulan dari unsur kelompok dan 3 usulan dari unsur perorangan, dari masing-masing kategori dipilih 1 terbaik untuk diberikan penghargaan;

- Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi SDA kegiatan berjalan dengan baik dengan hasil akhir realisasi 100% dengan melakukan kemitraan dengan 75 mitra yang dilakukan melalui kegiatan Bicara Ilmiah Terkait Isu Startegis Masalah Lingkungan Provinsi Kalimantan;
- Pengendalian dan pengawasan limbah B3 pada 5 Perusahaan pengumpul LB3. Pengawasan pengelolaan Limbah B3 medis pada tempat karantina dan pemusnah sebanyak 7 RSUD di Kab/Kota, Perusahaan penghasil Limbah B3 sebanyak 4 perusahaan., Pengawasan kepada pemanfaat/pengolah Limbah B3 sebanyak 2 perusahaan;
- Pemantauan pemantauan kualitas air pada 13 sungai di 13 kab/kota dengan 38 (tiga puluh delapan) titik pantau, dan Pemantauan kualitas udara di 13 Kab/Kota yang terbagi menjadi 2 tahap dalam tahun 2021 ini;
- Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER) sebanyak 15 perusahaan pada tahun 2021 telah terverifikasi;
- Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan berupa buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD);
- Pengelolaan Lahan Gambut dan Akses Terbuka dengan target Lahan gambut sebanyak 2.000 Ha dan lahan Akses Terbuka yang diinventarisir sebanyak 2.000 Ha;
- Penyusunan Materi Teknis Jasa Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan, Verifikasi RPPLH kabupaten/kota Penyusunan Layanan Jasa Ekosistem untuk Materi Teknis Perubahan RPPLH sebanyak 1 Kabupaten/Kota;
- Pemantauan Sektor Energi dan Sektor Tutupan Lahan dan pembentukan kampung iklim sebanyak 75 lokasi;
- Dokumen lingkungan yang sudah dinilai dan dalam proses penilaian oleh Komisi Penilai Amdal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kewenangannya sebanyak 15 dokumen Amdal;
- Jumlah Perusahaan yang bergerak di sektor Pertambangan, Perkebunan dan Industri di Kalimantan Selatan yang diawasi

kebijakan Lingkungan Hidup-Nya pada tahun 2016 tercapai 40 perusahaan; 2017 tercapai 32 perusahaan;2018 tercapai 30 perusahaan;2019 tercapai 32 perusahaan ; 2020 tercapai 22 perusahaan;

- Verifikasi kasus lingkungan hidup dengan menindaklanjuti/diverifikasi 17 kasus lingkungan;
- Peningkatan Kapasitas SDM dan Peraturan LH dengan target MHA dan kearifan lokal terkait PPLH sebanyak 12 kelompok dan Persentase pelaksanaan sosialisasi/bimtek/ seminar yang memahami tentang PPLH sebanyak 100%.

2. Eselon II

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 13. Realisasi Kinerja sesuai Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,26	71,03	101,09%
Realisasi Pencapaian Sasaran Strategis				101,09%
Total Capaian Strategis				101,09%

Total Capaian strategis sebesar 101.09 % sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel sangat memuaskan.

Tabel 14. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dalam Pencapaian IKU

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	%Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	101,09%	90,71%	10,38%



Gambar 9. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dalam Pencapaian IKU

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian IKU Tahun 2021 dilakukan dengan Refocusing sub kegiatan dan pengurangan anggaran (22%), Memprioritaskan kegiatan yang memberi dampak langsung terhadap upaya perbaikan lingkungan, Meningkatkan Kemitraan dengan Gerakan Kemitraan Lingkungan. Selain itu Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, edukasi, dan kampanye ke masyarakat. Perjalanan dinas hanya digunakan untuk peninjauan/verifikasi lapangan dan pemantauan lingkungan (pengambilan sampel). Terdapat kegiatan yang didukung oleh dana APBN. Misalnya restorasi gambut, didukung dengan dana dari Tugas Pembantuan Restorasi Gambut dimana satuan kerja ada pada DLH Prov. Kalsel.

B. Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup jika dibandingkan dengan target jangka menengah yakni Tahun 2021 telah dapat memenuhi. Namun, jika dilihat dari per komponen pendukung capaian IKLH, masih terdapat komponen yang belum mencapai target akhir Renstra, seperti IKA dan IKU.

Tabel 15. Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Tahun 2020	2021		Capaian 2021 Terhadap target Akhir Renstra
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	46,16	68,43	70,26	71,03	101,09%

a. Upaya yang dilaksanakan

- Melakukan pemantauan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap lingkungan hidup.
- Pembinaan dan inovasi untuk mengajak peran serta masyarakat dalam mengurangi dan menangani sampah . Perlu juga dibangun sebuah sistem penanganan sampah yang difasilitasi oleh pemerintah sehingga kebijakan pengelolaan sampah dapat terakomodir dan diimplementasikan sampai ke tingkat tapak.
- Meningkatkan kinerja pelayanan TPAS Regional untuk dapat memfasilitasi kendala yang dihadapi oleh kabupaten/ kota.
- Memfasilitasi edukasi terkait perubahan iklim dan dampak perubahan iklim serta aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sampai di tingkat tapak.
- Melakukan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup di kawasan lindung dan pesisir sampai ke tingkat tapak.
- Melakukan upaya rehabilitasi dan konservasi SDA.
- Mengembangkan kawasan konservasi.
- Mengembangkan cakupan pengawasan ke wilayah kawasan pesisir dan lahan gambut.
- Mengembangkan aturan tegas dalam penegakan hukum pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- Pembinaan, monitoring dan evaluasi terus menerus kepada institusi LH Kab/ Kota dan pelaku usaha terkait penerapan aturan lingkungan hidup.

- Meningkatkan sumberdaya pengelolaan dan penanganan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

b. Hambatan dalam pencapaian

- Masih rendahnya kualitas air sungai merupakan sebuah hal yang harus disikapi dengan koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik lagi dengan instansi lain yang terkait urusan lingkungan hidup. Penyamaan persepsi terhadap permasalahan kualitas lingkungan hidup khususnya kualitas air harus dapat secara sinergi dan komprehensif dituangkan juga dalam program kegiatan dari berbagai instansi lain yang menunjang terwujudnya pengelolaan air.
- Masih rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam disiplin mengelola sampah. Budaya membuang sampah tidak pada tempat yang benar terbukti dengan masih banyaknya sampah yang ditemui di jalan dan sungai. Selain itu disiplin pemenuhan waktu membuang sampah juga masih rendah, sehingga sering ditemui tumpukan sampah setelah pengangkutan sampah oleh petugas.
- Perubahan iklim mengakibatkan terjadinya bencana hidrometrologi yang telah dirasakan dampaknya baik sosial, ekonomi maupun lingkungan.
- Belum optimalnya kolaborasi dan sinergitas antar pemerintah, antara pemerintah dengan berbagai elemen. Persamaan visi dalam pengelolaan lingkungan hidup harus terus dilakukan.
- Kondisi khusus yang tidak terduga seperti adanya pandemi covid-19 menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan.

c. Rencana tindak lanjut

1. Pengintegrasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Hal ini dilakukan dengan menyusun naskah perencanaan lingkungan hidup; mengembangkan sistem pendataan dan informasi; meningkatkan pengelolaan data dan informasi

berbasis sistem informasi geografis; meningkatkan penataan lingkungan hidup sesuai dengan tata ruang.

2. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Hal ini dilakukan dengan mengendalikan pencemaran melalui pemantauan kualitas air dan udara; mengendalikan pencemaran akibat limbah B3; dan melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar.

3. Peningkatan pengelolaan persampahan.

Strategi ini dapat dijalankan antara lain dengan mengoperasikan TPA Regional; melaksanakan penetapan perjanjian kerja sama mengenai Tipping Fee TPA Regional; membuat peraturan ataupun rencana aksi dan gerakan terkait penanganan/pengurangan sampah.

4. Pengendalian dampak perubahan iklim.

Hal ini dilakukan dengan pemantauan terhadap emisi gas rumah kaca; melakukan upaya pembinaan dalam hal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

5. Peningkatan sinergi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan instansi/ stakeholder terkait.

Strategi ini dapat dijalankan antara lain dengan koordinasi dalam penilaian dan evaluasi dokumen lingkungan; melakukan pembinaan dan penilaian kinerja terhadap perusahaan; melakukan pembinaan terhadap institusi pendidikan agar berwawasan lingkungan, serta melakukan pembinaan dan koordinasi dengan kab/kota dalam menciptakan kota bersih dan sehat

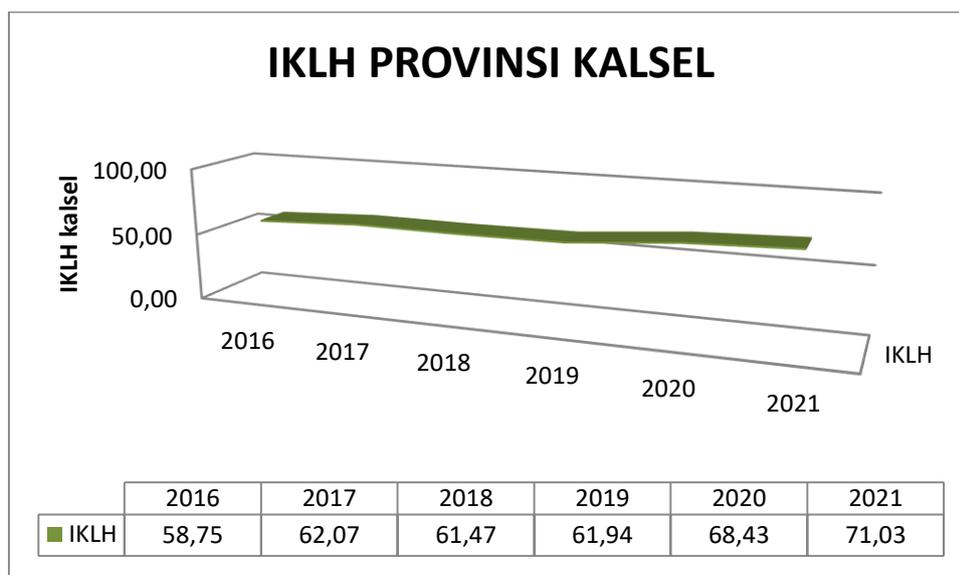
6. Peningkatan upaya pemeliharaan lingkungan hidup.

Pemeliharaan lingkungan hidup dapat berupa upaya konservasi flora fauna melalui taman kehati dan konservasi terhadap ekosistem pantai dan laut.

7. Peningkatan upaya pemulihan lingkungan hidup.
Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi terkait perbaikan kualitas lingkungan serta upaya pengelolaan lahan, baik lahan gambut maupun lahan akses terbuka.
8. Penerapan penegakan hukum lingkungan.
Memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap SDA dan Lingkungan Hidup, membuat pos pengaduan dan menindaklanjuti kasus LH.
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagai partner pemerintah dalam pengelolaan SDA dan LH.
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemitraan Dinas LH dengan forum komunitas LH/ organisasi di bidang LH, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan SDA dan LH bagi pembangunan selanjutnya.
10. Penguatan kapasitas laboratorium lingkungan.
Hal ini dapat dilakukan dengan memperoleh/mempertahankan Akreditasi Laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Meningkatkan jumlah parameter yang dapat diuji dan terakreditasi, serta penguatan kapasitas bagi laboratorium lingkungan di kab/kota.
11. Pengembangan kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi aparatur Dinas LH dan menambah jumlah pegawai berdasarkan analisis jabatan dan kompetensi yang diperlukan.
12. Pengadaan sarana dan prasarana operasional
Perlu untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup, baik itu untuk menunjang pekerjaan rutin maupun operasional untuk laboratorium lingkungan dan TPA Regional.
13. Pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara akuntabel.
Pelaporan serta evaluasi kinerja secara berkala, baik bulanan maupun triwulan dan semester.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Perhitungan IKLH telah dijelaskan pada subbag sebelumnya. Berikut akan dijabarkan analisis perhitungan pada setiap komponen IKLH.



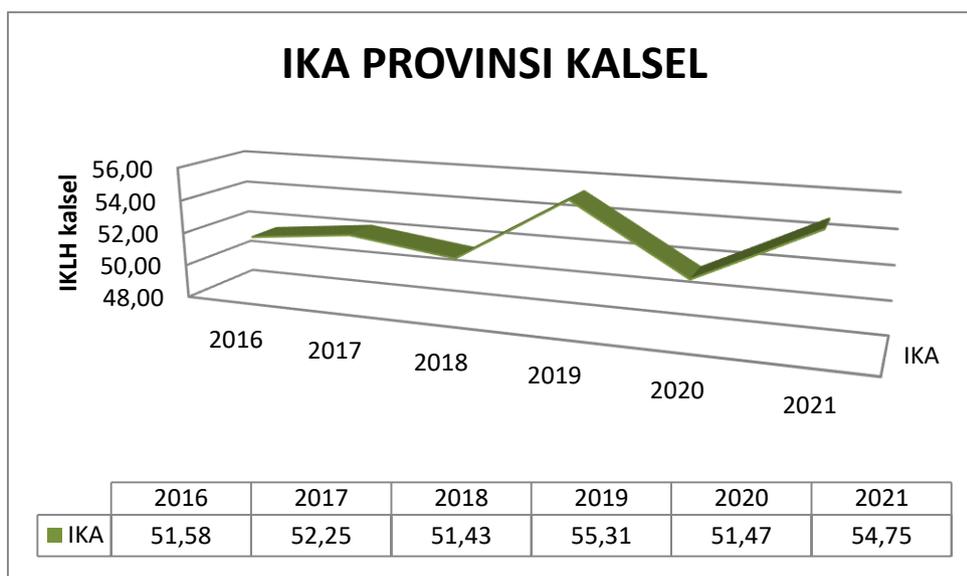
Gambar 10. Tren IKLH Provinsi Kalsel 2016 s.d 2021

Sumber : IKLH 2020, Pusdatin KLHK Hasil Perhitungan Sementara Prov. Kalsel pada aplikasi IKLH 2021

Perhitungan IKA

Tahun 2018 terdapat perubahan perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA). Jumlah parameter yang digunakan bertambah menjadi 10 parameter, yaitu DO, Fecal coliform, COD,pH,BOD, NH3-N, TP, TSS, NO3-N, dan TDS dengan metode Indeks Nasional Sanitation Foundation Water Quality Index (NSF-WQI). Hal ini menyebabkan perubahan range nilai IKA yaitu 0-100. Pada Tahun 2020, perhitungan IKA dikembalikan lagi seperti tahun 2014 dengan menggunakan 7 parameter yaitu TSS, DO,BOD,COD, Total Fosfat, Fecal coliform dan Total coliform dengan range nilai IKA 0-70. Untuk dapat melihat kecenderungan peningkatan atau penurunan nilai IKA, maka dilakukan perhitungan dengan metode yang sama, yaitu merujuk pada metode lama dengan menggunakan metode indeks pencemar dengan

7 parameter. Tren IKA 2015-2020 dengan metode yang sama tersebut disajikan dalam grafik berikut :



Gambar 11. Tren Indeks Kualitas Air Kalsel 2016 s.d 2021
(Sumber : Data Diolah dari IKLH 2019, Pusdatin KLHK dan Hasil Perhitungan Sementara Prov. Kalsel pada aplikasi IKLH 2021)

Perhitungan IKA Tahun 2020-2024 kembali menggunakan metode Indeks Pencemar namun dengan 8 parameter yaitu pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Nitrat, dan Fecal coliform.

Langkah-Langkah Penentuan Indeks Pencemar

1. Lakukan pemantauan kualitas air sungai;
2. Masing-masing titik pemantauan diasumsikan sebagai 1 (satu) data dan akan memiliki status mutu air. Sebagai contoh diambil titik pantau Sungai Musi pada periode III,;
3. Pilih 8 parameter (pH, DO, BOD, COD, TSS, TP, Nitrat dan Fecal Coli yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan IKA dan tentukan konsentrasinya dari masing-masing parameter;
4. Bandingkan konsentrasi parameter yang telah dipilih dengan nilai kriteria mutu air kelas II yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Apabila nilai (Ci/Lij) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (Ci/Lij) baru.
6. Setelah didapat angka rata-rata dan maksimalnya dari suatu titik, kemudian diberikan status mutu air

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$$

Dimana

L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)

C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)

IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j)

IP_j : $(C_1/L_{1j}, C_2/L_{2j}, \dots)$

$(C_i/L_{ij})_{\text{Maksimum}}$: Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}

Tabel 16. Indeks Pencemar

Nilai	Keterangan
$0 \leq IP_j \leq 1,0$	baik (memenuhi baku mutu)
$1,0 \leq IP_j \leq 5,0$	cemar ringan
$5,0 \leq IP_j \leq 10,0$	cemar sedang
$IP_j \geq 10,0$	cemar berat

Langkah-Langkah Penentuan IKA

1. Hitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk seluruh lokasi;
2. Hitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu dengan jumlah totalnya pada wilayah hulu, tengah dan hilir;
3. Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat (sesuai P.78 : 2013).

Berdasarkan langkah-langkah tersebut didapatkan nilai IKA Kalsel Tahun 2021 sebesar **54.75**, maka IKA Provinsi Kalimantan Selatan berada dalam predikat Cukup Baik. Penurunan nilai IKA ini disebabkan adanya penambahan jumlah parameter yang digunakan dalam perhitungan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 17. Predikat IKA

Nilai	Predikat
IKA>70	Sangat Baik
60<IKA≤70	Baik
50<IKA≤60	Cukup Baik
40<IKA≤50	Kurang Baik
30<IKA≤40	Sangat Kurang Baik
IKA<30	Waspada

Perhitungan Indeks Kualitas Udara

Berikut ini merupakan langkah-langkah perhitungan Indeks Kualitas Udara.

1. Verifikasi data hasil analisa laboratorium dari pemantauan kualitas udara ambien yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
2. Tabulasi data, terkait penyajian data dalam bentuk tabel: Nama provinsi, Nama kabupaten/kota, Lokasi sampling: perkantoran, industri, pemukiman dan transportasi, titik koordinat, data kualitas udara ambien (rata rata tahunan per lokasi sampling dengan satuan $\mu\text{g}/\text{m}^3$).
3. Perhitungan IKU dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menghitung rata-rata masing masing parameter NO_2 dan SO_2 tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap);
 - b. Menghitung rata-rata konsentrasi parameter NO_2 dan SO_2 kabupaten/kota tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter SO_2 dan NO_2 pada ke empat lokasisampling (transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran);
 - c. Menghitung rata-rata konsentrasi parameter SO_2 dan NO_2 tahunan provinsi dengan cara menghitung rata - rata konsentrasi tahunan kabupaten/kota;
 - d. Menghitung indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{IKU} = 100 - [50/0.9 \times (\text{Ieu} - 0.1)]$$

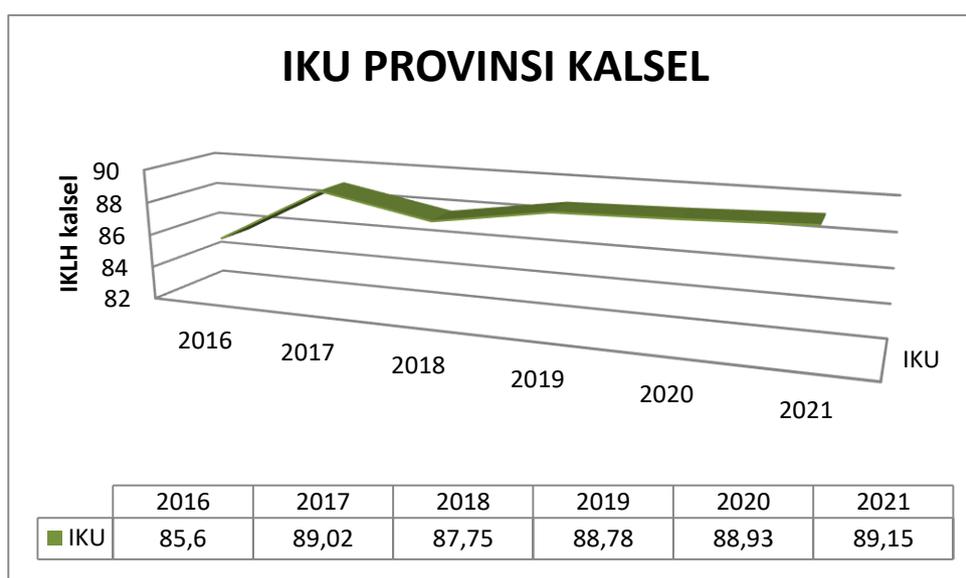
Keterangan:

- IEU adalah rata-rata dari konsentrasi SO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO₂ Ref EU dan NO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien NO₂ Ref EU
 - Baku mutu udara ambien Ref EU untuk SO₂ adalah 20 µg/m³ dan NO₂ adalah 40 µg/m³
4. Menghitung nilai IKU nasional dengan cara mengalikan nilai IKU provinsi dengan bobot provinsi yang merupakan perbandingan kontribusi luas daerah provinsi dan jumlah penduduk provinsi dibanding luas wilayah Indonesia dan jumlah total penduduk Indonesia, selanjutnya menjumlahkan nilai IKU dengan bobotnya di 34 provinsi.
 5. Mengklasifikasikan Nilai IKU sesuai kategori nilai berikut:

Tabel 18. Klasifikasi Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU)		
Sangat baik	X >	90
Baik	70 < X ≤	90
Cukup	50 ≤ X ≤	70
Kurang	30 ≤ X <	50
Sangat Kurang	X <	30

Berdasarkan langkah-langkah tersebut didapatkan nilai IKU Kalsel Tahun 2021 sebesar **89,15**.



Gambar 12. Tren Indeks Kualitas Udara Kalsel 2016 s.d 2021
(Sumber : Data Diolah dari IKLH 2019, Pusdatin KLHK dan Hasil Perhitungan Sementara Prov. Kalsel pada aplikasi IKLH 2021)

Perhitungan Indeks Kualitas Lahan

Komponen perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah sebagai berikut:

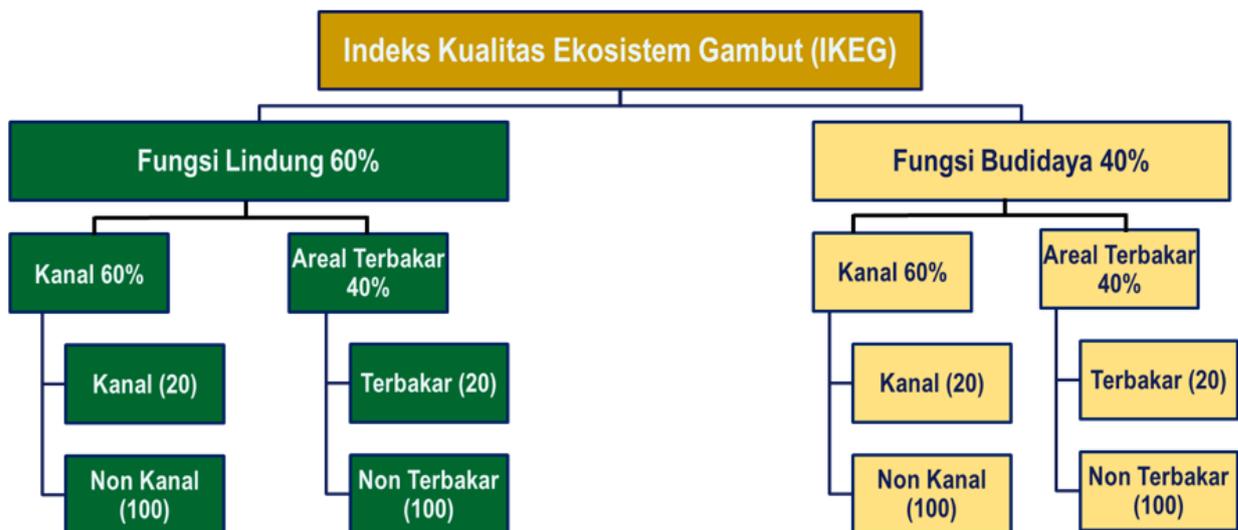
Faktor Koreksi : Kanal; Luasan Area Terbakar

Tutupan Vegetasi Hutan

- Hutan Lahan Kering Primer (HLKP)
- Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS)
- Hutan Mangrove Primer (HMP)
- Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS)
- Hutan Rawa Primer (HRP)
- Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS)
- Hutan Tanaman

Tutupan Vegetasi Non Hutan

- Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengankemiringan >25%, sempadan sungai,pantai dan danau
- RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)



$$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$$

$$DKK = \sum \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar}$$

DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal

Rumus di Tutupan Hutan di Lahan Gambut;

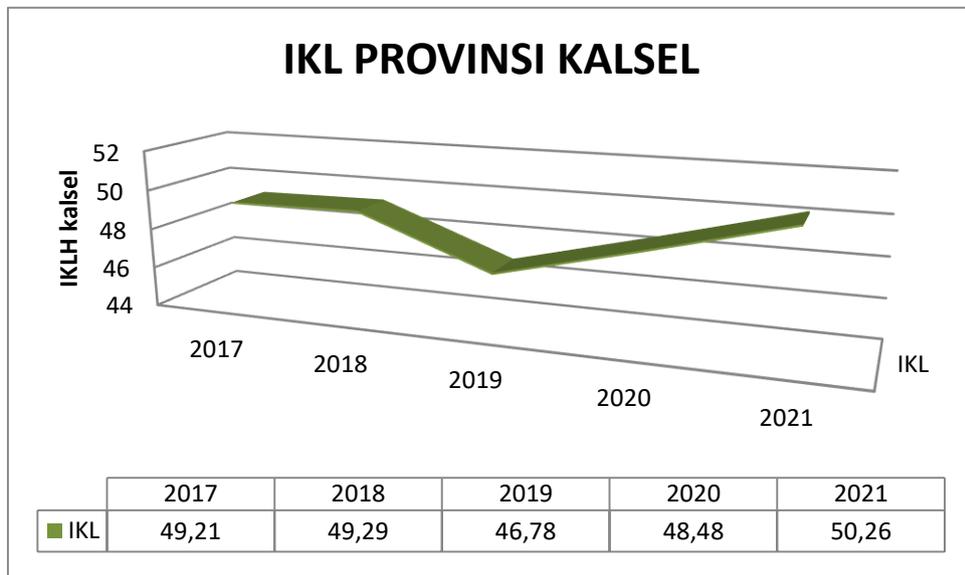
$$\begin{aligned} \text{W kanal di Lindung} &: 0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Kanal}{Luas\ FLEG} \\ \text{W kanal di Budidaya} &: 0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Kanal}{Luas\ FBEG} \\ \text{W terbakar di Lindung} &: 0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Bakar}{Luas\ FLEG} \\ \text{W terbakar di Budidaya} &: 0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Bakar}{Luas\ FBEG} \end{aligned}$$

Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung di Lahan Gambut;

$$\begin{aligned} \text{W kanal di Lindung} &: 0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLG_Kanal + BL_FLG_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG} \\ \text{W kanal di Budidaya} &: 0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Kanal + BL_FBG_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FBEG} \\ \text{W terbakar di Lindung} &: 0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLB_Bakar + BL_FLG_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG} \\ \text{W terbakar di Budidaya} &: 0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Bakar + BL_FBG_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FBEG} \end{aligned}$$

Gambar 13.Skema Perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

Berdasarkan langkah-langkah tersebut didapatkan nilai IKL Kalsel Tahun 2021 sebesar **50,26**.



Gambar 14.Tren Indeks Kualitas Lahan Kalsel 2016 s.d 2021
(Sumber : Data Diolah dari IKLH 2019, Pusdatin KLHK dan Hasil Perhitungan Sementara Prov. Kalsel pada aplikasi IKLH 2021)

Jika melihat dari tren IKL pada gambar di atas, maka terdapat peningkatan nilai IKL pada Tahun 2020. Hal ini dipengaruhi adanya penambahan komponen perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.

Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut

Parameter kualitas air laut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Parameter Kualitas Air Laut

No	Parameter	Sumber Pencemar	Dampak Pencemaran
1	TSS (Padatan tersuspensi total)	Berbagai sumber	Meningkatnya kekeruhan perairan akibat penambahan pasokan material-material dari daratan.
2	DO (Oksigen terlarut)	Domestik dan Industri	Sangat berpengaruh terhadap kehidupan ikan, terutama untuk pertumbuhan, memperbaiki jaringan dan reproduksi
3	Minyak dan Lemak	Domestik dan Industri	Pencemaran organik, potensi bahaya bagi biota
4	Amonia total	Domestik dan Pertanian	Bersifat toksik, potensi eutrofikasi
5	Orto-Fosfat	Domestik dan Pertanian	Bersifat toksik, potensi eutrofikasi

Metode Penentuan IKAL (dengan rumus NSF), Target IKAL 2020-2024, Intervensi utk pencapaian target, Lokasi Sampling (23 titik), dan Peta Pemantauannya.

$$IKAL = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$$

Q_i : Sub-index untuk parameter kualitas air laut ke i ,

W_i : Bobot parameter kualitas air laut ke i ,

n : Jumlah parameter kualitas air laut

Nilai Indeks Kualitas Air laut Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 yaitu 63,81. Nilai ini berada diatas baseline nilai IKAL Nasional sebesar 58,5.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara yang disampaikan dalam Rapat Expose IKLH sementara oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK pada

tanggal 10 Januari 2022, nilai IKAL Provinsi Kalimantan Selatan 2021 adalah 76.45 dengan target 68.69. Untuk perhitungan IKAL, masih akan disempurnakan karena berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi terdapat satu parameter yang tidak terlalu berkontribusi signifikan terhadap kualitas air laut sehingga ada perubahan pembobotan untuk setiap parameter.

3.1.1. SEKRETARIAT

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 20. Perbandingan Realisasi dengan Target Sekretaris

No	Kinerja Utama	Indikator	Target & Capaian 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan pada Dinas LH Prov. Kalsel	1 Nilai Akuntabilitas kinerja	A (81,97)	A (83.79)	102%
		1 Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian	90	90	100%
		2 Persentase hasil temuan APIP/BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100%

Indikator pertama yaitu Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup ditargetkan A. Nilai SAKIP untuk Tahun 2021 akan diumumkan pada Tahun 2022. Oleh karena itu, realisasi predikat SAKIP di Tahun 2021 ini berdasarkan realisasi predikat SAKIP di Tahun 2020 yang diumumkan pada Bulan Agustus 2021, mendapatkan predikat A dengan nilai 83.79, sehingga capaian kinerja sebesar 102%.

Indikator kedua yaitu Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian ditargetkan 90% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Indikator ketiga yaitu Persentase hasil temuan APIP/BPK yang ditindaklanjuti ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 21. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Sekretariat

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan pada Dinas LH Prov. Kalsel	1 Nilai Akuntabilitas kinerja	102% (81,97)	A (81,97)	A (83,79)	102%	A	102%
		2 Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian	-	90	90	100%	-	0.00%
		3 Persentase hasil temuan APIP/BPK yang ditindaklanjuti	99.96%	100%	100%	100%	100%	0.00%

Indikator pertama yaitu Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup ditargetkan A dengan nilai 81,97 dan terealisasi A dengan nilai 83,79, sehingga capaian kinerja sebesar 102%. Nilai ini masih perlu untuk terus ditingkatkan hingga akhir masa periode Renstra.

Indikator kedua dan ketiga merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran dan kepegawaian. Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian ditargetkan 90 dan terealisasi dengan nilai 90, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Indikator ketiga yaitu Persentase hasil temuan APIP/BPK yang ditindaklanjuti ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Indikator nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup atas kaidah-kaidah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Target indikator ini pada tahun 2021 adalah mendapat predikat A. Merupakan nilai SAKIP yang diperoleh ditahun 2020 dikarenakan untuk Tahun 2021 Nilai SAKIP belum keluar. Predikat ini diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja atas implementasi SAKIP

tahun 2020 seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel oleh tim auditor. Melihat nilai perolehan tersebut mengalami kenaikan poin dikarenakan Dinas LH terus berbenah melakukan perbaikan-perbaikan pada butir-butir penilaian yang belum maksimal di tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk indikator pemenuhan pengurusan administrasi perkantoran dan kepegawaian, Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas LH, Persentase aset yang tercatat tidak mengalami kenaikan atau penurunan kinerja dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin dilakukan sehingga Sekretariat selalu menjaga, melakukan perbenahan fasilitas ataupun keperluan-keperluan lain untuk menunjang kinerja karyawan yang ada di Dinas LH.

a. Upaya Yang telah dilakukan :

- Melakukan penertiban format perumusan surat keluar/surat masuk kantor berbasis aplikasi
- Melengkapi dan memperbaiki sarana prasarana kantor khususnya dibagian pelayanan
- Merekap segala urusan administrasi seluruh pegawai kantor

b. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Pengarsipan surat menyurat yang kurang terorganisir
- Ruang sarana pengarsipan surat/dokumen yang belum memadai

c. Rencana Tindak Lanjut

- Mengatur dan mengorganisir mulai dari masuk surat sampai kepada pengarsipannya
- Mengajukan anggaran ditahun berikutnya untuk rehab/perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dikantor

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.1.1.1. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 22. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

No	Kinerja Utama	Indikator	Target & Capaian 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan Dinas LH	1 Persentase pencapaian komponen perencanaan yang berkualitas sesuai sistem AKIP	97%	96%	98,96%
2	Meningkatnya kualitas evaluasi dan pelaporan Dinas LH	1 Persentase pencapaian komponen evaluasi dan pelaporan yang berkualitas sesuai sistem AKIP	78%	77.46%	99,30
Rata-Rata					100%

Indikator pertama yaitu Persentase pencapaian komponen perencanaan yang berkualitas sesuai sistem AKIP ditargetkan dengan nilai 28.80 dengan terget persentase sebesar 97% dan terealisasi dengan nilai 28.80 dengan persentase sebesar 98.97%, sehingga capaian kinerja sebesar 98.96%. Nilai ini merupakan nilai komponen perencanaan dalam SAKIP Periode Penilaian Tahun 2020 yang keluar di Bulan Agustus 2021.

Indikator kedua yaitu Persentase pencapaian komponen evaluasi dan pelaporan yang berkualitas sesuai sistem AKIP ditargetkan dengan jumlah semua komponen penilaian 53,18 dan terealisasi dengan nilai 54,99 dengan persentase sebesar 77.46%, sehingga capaian kinerja sebesar 99.30%. Nilai ini merupakan nilai komponen perencanaan dalam SAKIP Periode Penilaian Tahun 2020 yang keluar di Bulan Agustus 2021.

Dokumen perencanaan maupun laporan yang disusun di sub bagian perencanaan pelaporan diantaranya adalah Dokumen Renja Akhir Tahun 2021, Renja Awal Tahun 2022, Renja Perubahan Tahun 2021, RKA Perubahan Tahun 2021, RKA Tahun 2021, LKjIP Tahun 2021, Draft LAKIP Tahun 2021, Laporan Pengukuran Kinerja Bulanan, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021; Laporan Kinerja Tahunan 2021; Laporan Efisiensi Tahun 2021.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Indikator pertama yaitu Persentase pencapaian komponen perencanaan yang berkualitas sesuai sistem AKIP terdapat perubahan narasi indikator setelah adanya evaluasi SAKIP dari Kemenpan RB. pada tahun 2020 terealisasi dengan nilai 28,80 dan pada tahun 2021 terealisasi dengan nilai 28,80.

Indikator kedua yaitu Persentase pencapaian komponen evaluasi dan pelaporan yang berkualitas sesuai sistem AKIP terealisasi dengan nilai 54,99 di tahun 2020 dan pada tahun 2021 terealisasi dengan nilai 53,18. Terdapat penurunan komponen pelaporan.

Tabel 23. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan Dinas LH	1 Persentase pencapaian komponen perencanaan yang berkualitas sesuai sistem AKIP	96%	97%	96%	98.97%	97%	98.97%
2	Meningkatnya kualitas evaluasi dan pelaporan Dinas LH	1 Persentase pencapaian komponen evaluasi dan pelaporan yang berkualitas sesuai sistem AKIP	75.44%	78%	77.46%	99.31%	78%	99.31%

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Indikator nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup atas kaidah- kaidah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Target indikator ini pada tahun 2021 adalah mendapat predikat A Merupakan nilai SAKIP yang diperoleh ditahun 2020 dikarenakan untuk Tahun 2021 Nilai

SAKIP belum keluar. Predikat ini diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja atas implementasi SAKIP tahun 2020 seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel oleh tim auditor. Melihat nilai perolehan tersebut mengalami kenaikan poin dikarenakan Dinas LH terus berbenah melakukan perbaikan-perbaikan pada butir-butir penilaian yang belum maksimal di tahun sebelumnya. Terdapat penurunan komponen pelaporan. Hal ini disebabkan kriteria dan komponen pelaporan yang semakin banyak. Strategi untuk peningkatan indikator terus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk penyempurnaan laporan dan menyelesaikannya dengan rentang waktu yang telah disediakan.

a. Upaya Yang telah dilakukan :

- Akan dilakukan perbaikan secara terus menerus dari Komponen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

b. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Masih belum maksimal pemanfaatan instrumen pengukuran dan evaluasi

c. Rencana Tindak Lanjut

- Masih rendahnya AKIP untuk komponen pengukuran kinerja. Hal ini akan direview kembali tata cara pengukuran pada setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi secara terus menerus untuk memastikan target capaian yang akan dirumuskan secara terstruktur dan terukur.

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program dan kegiatan penunjang pada Subag Perencanaan dan Pelaporan adalah **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

3.1.1.2. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 24. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Persentase serapan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan	100%	90.71%	90.71%
		Persentase aset yang dikelola sesuai ketentuan	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					100%

Indikator pertama yaitu Persentase penyerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 90,71%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Indikator kedua yaitu Persentase aset yang dikelola sesuai ketentuan yang dibuat ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 25. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase serapan anggaran sesuai ketentuan	1 Persentase penyerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan	-	100%	90.71%	90.71%	100%	90.71%
		1 Persentase aset yang dikelola sesuai ketentuan	-	100%	100%	100%	100%	100%

Terdapat perubahan narasi indikator setelah adanya evaluasi SAKIP dari Kemenpan RB Indikator pertama yaitu Persentase penyerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 90,71% sama halnya dengan tahun 2020 terealisasi sebesar 100%.

Indikator kedua yaitu Persentase aset yang dikelola sesuai ketentuan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 100%, sama halnya pada tahun 2020 terealisasi sebesar 100%.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya sama-sama dapat mencapai 100%.

a. Upaya Yang telah dilakukan :

- Melakukan penertiban format perumusan laporan keuangan
- Melengkapi dan memperbaiki sarana prasarana kantor khususnya dibagian pelayanan
- Merekap segala urusan administrasi keuangan seluruh pegawai kantor

b. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Pembuatan laporan keuangan yang terhambat

c. Rencana Tindak Lanjut

- Mengatur dan mengorganisir Laporan keuangan

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program dan kegiatan penunjang pada Subag Keuangan dan Aset adalah **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3.1.1.3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 26. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Kinerja Utama	Indikator	Target & Capaian 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
		2 Persentase dokumentasi pelayanan surat menyurat	100%	100%	100%
		3 Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi kepegawaian secara tertib	100%	100%	100%
		4 Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kapasitas ASN	1 Persentase ASN yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dan bersertifikat	100%	100%	100%
Rata-Rata					100%

Indikator pertama yaitu Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% , sehingga capaian sebesar 100%.

Indikator kedua yaitu Persentase dokumentasi pelayanan surat menyurat ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% , sehingga capaian sebesar 100%.

Indikator ketiga yaitu Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi kepegawaian secara tertib ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 100%.

Indikator keempat Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 100%

Indikator kelima Persentase ASN yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dan bersertifikat sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 100%

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 27. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2020 terhadap target akhir renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Persentase dokumentasi pelayanan surat menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3 Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi kepegawaian secara tertib	45%	100%	100%	100%	100%	100%
		4 Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran	-	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kapasitas ASN	1 Persentase ASN yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dan bersertifikat		100%	100%	100%	100%	100%

Indikator pertama yaitu Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% , sehingga capaian sebesar 100%.

Indikator kedua yaitu Persentase dokumentasi pelayanan surat menyurat ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% , sehingga capaian sebesar 100%.

Indikator ketiga yaitu Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi kepegawaian secara tertib ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 100%

dengan jumlah pegawai yang terlayani sebanyak 50 orang terdiri dari pengurusan naik pangkat, berkala, cuti dan pensiun.

Indikator keempat Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 100%.

Indikator kelima Persentase ASN yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dan bersertifikat sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 100% dengan jumlah pegawai yang melaksanakan pelatihan bersertifikat sebanyak 6 orang pegawai.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Secara umum, kegiatan rutin perkantoran dan administrasi kepegawaian dapat terealisasi 100% seperti tahun-tahun sebelumnya. Sarana dan Prasarana dipenuhi berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh kantor, sedangkan untuk surat menyurat ditahun 2021 Dinas LH telah menggunakan administrasi keluar masuk surat berbasis aplikasi E-Office sehingga memudahkan dalam pemantauan serta pelaksanaan administrasi keluar masuk nya surat. Untuk Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib merupakan pegawai yang terlayani untuk keperluan naik pangkat, berkala, cuti, dan pensiun, kedepan indikator ini akan ditambahkan dengan pelayanan Sasaran Kinerja Pegawai.

a. Upaya Yang telah dilakukan :

- Melakukan penertiban format perumusan surat keluar/surat masuk kantor berbasis aplikasi
- Melengkapi dan memperbaiki sarana prasarana kantor khususnya dibagian pelayanan
- Merekap segala urusan administrasi seluruh pegawai kantor

b. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Pengarsipan surat menyurat yang kurang terorganisir
- Ruang sarana pengarsipan surat/dokumen yang belum memadai

c. Rencana Tindak Lanjut

- Mengatur dan mengorganisir mulai dari masuk surat sampai kepada pengarsipannya
- Mengajukan anggaran ditahun berikutnya untuk rehab/perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dikantor

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program dan kegiatan penunjang pada Subag Keuangan dan Aset adalah **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** adalah sebagai berikut

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

3.1.2 BIDANG TATA LINGKUNGAN

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 28. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Bidang Tata Lingkungan

No.	Kinerja Utama	Indikator	Target & Capaian 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pengendalian Terhadap Lahan/Ekoregion yang Terdampak	Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan	100%	100%	100%
2.	Menurunkan emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK dari Business As Usual	15,06%	31,06%	206%
Rata-Rata Capaian					100%

Indikator pertama yaitu Persentase luasan terkena dampak yang terkendali ditargetkan 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Ini artinya seluruh wilayah perencanaan dapat dikendalikan sebagaimana tertuang di dalam dokumen perencanaan.

Indikator kedua yaitu Persentase penurunan emisi GRK dari *Business As Usual* ditargetkan 15,06% dan terealisasi 31,06%, sehingga capaian kinerja sebesar 206%.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 29. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Bidang Tata Lingkungan

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 terhadap target akhir renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Pengendalian Terhadap Lahan/Ekoregion yang Terdampak	Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.	Menurunkan emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK dari Business As Usual	27.8%	15,06%	31,06%	206%	15.06%	206%
----	----------------------	---	-------	--------	--------	------	--------	------

Indikator pertama yaitu Persentase luasan terkena dampak yang terkendali ditargetkan 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2021 telah dilakukan upaya untuk pengendalian luasan yang terkena dampak melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Dokumen Lingkungan, dan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup se Kalimantan Selatan. Ini artinya seluruh wilayah perencanaan dapat dikendalikan sebagaimana tertuang di dalam dokumen perencanaan. Jika dibandingkan target akhir renstra maka capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar 100%,

Indikator kedua yaitu Persentase penurunan emisi GRK dari *Business As Usual* ditargetkan 15,06% dan terealisasi 31,06%, sehingga capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 206%.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Kinerja pada upaya pengendalian wilayah ekoregion terdampak tidak mengalami perubahan, hal ini ditunjukkan dari luasan terkendali sebesar 100% seluas 35.130,74 km².

Kinerja pada upaya penurunan GRK tahun 2021 mengalami peningkatan. Tingkat emisi agregat GRK tahun 2020 (tahun data) di Kalimantan Selatan mencapai 19.795 Gg CO₂-eq, dengan tingkat penurunan sebesar 31,06% dari BAU. Penurunan ini berasal dari emisi sektor energi sebesar 34,2%, sektor pertanian 27,5%, serapan sektor kehutanan 35,7%, sektor limbah 15%, dan sektor IPPU sebesar 16,3%. Penurunan tertinggi terjadi pada sektor kehutanan yang mengalami penyerapan 35,7%, hal ini sejalan dengan semakin masifnya pelaksanaan program Revolusi Hijau yang digagas dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Emisi sektor energi juga mengalami penurunan yang signifikan, hal ini sejalan dengan program (1) Pengurangan produksi batubara dan migas sejalan dengan pengembangan energi

terbarukan berbasis biofuel, (2) Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik terutama pembangkit listrik swasta dengan mendorong penggunaan energi terbarukan berbasis biofuel, (3) Efisiensi pemakaian bahan bakar untuk transportasi dengan mendorong pemakaian bahan bakar bernilai RON lebih tinggi, dan pengaturan alur transportasi darat dalam kota dan luar kota, (4) Penghematan pemakaian listrik terutama penggunaan lampu hemat energi, (5) Penuntasan konversi bahan bakar memasak ke LPG.

Sektor IPPU merupakan data inventori baru yang berasal dari industri produksi semen yang bersumber dari limestone dan klinker dengan penurunan emisi sebesar 16,3%. Sektor pertanian juga mengalami penurunan yang cukup signifikan yang berasal dari kelola pertanian yang makin baik, pengembangan budidaya padi sawah rendah emisi GRK melalui penerapan tata kelola hemat air dan varietas rendah emisi. Pada sektor limbah juga terjadi pengelolaan limbah yang lebih baik terutama pada penanganan sampah padat dengan beroperasionalnya TPA Sampah Regional Banjarbakula dan pengembangan kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) baik yang berbasis masyarakat maupun kelembagaan, pengembangan sistem pengolah air limbah (IPAL) aerob dan septic tank komunal yang dilengkapi dengan biodegister untuk menangkap gas metan yang diemisikan, pengelolaan limbah industri pengolahan CPO dan karet remah melalui skema aplikasi ke lahan.

Penurunan GRK Tahun 2021 didukung dengan program kampung iklim yang semakin meningkat yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya lokasi kampung iklim yang tersebar di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Program kampung iklim ini didalamnya melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu, penurunan GRK Tahun 2021 juga berasal dari kontribusi kinerja pengelolaan lingkungan sektor swasta terutama yang mengikuti penilaian proper.

a. Upaya – upaya yang telah dilakukan

Dalam menurunkan GRK telah dilakukan upaya sebagai berikut :

- Menyusun RAD GRK Provinsi Kalimantan Selatan
- Sosialisasi kegiatan rendah karbon
- Pembinaan dan pembentukan kampung iklim
- Peningkatan kapasitas masyarakat untuk membangun Desa Sasangga Banua dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- Melaksanakan proper baik nasional maupun daerah
- Upaya pengendalian wilayah ekoregion terdampak yang dilakukan :
- Penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), Jasa Lingkungan (Jasling)
- Melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Kebijakan Rencana dan Program (KRP) baik itu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota
- Penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
- Penguatan kapasitas komisi penilai Amdal dan institusi lingkungan hidup kabupaten/kota

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Secara umum kegiatan berjalan dengan baik. Namun perlu dilakukan peningkatan kinerja berupa penguatan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup baik dari pemerintah maupun swasta/masyarakat.

c. Rencana Tindak Lanjut

Melanjutkan upaya yang telah dilakukan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi serta tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan kegiatan

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Kinerja sebagaimana diuraikan di atas, dilaksanakan dengan dukungan:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan
 - a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
 - b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Kebijakan Rencana Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

3.1.2.1 SEKSI PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 30. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Kinerja Utama	Indikator	Target & Capaian 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya penjaminan Jasa Lingkungan	Persentase Jasa Lingkungan yang ditingkatkan/dipertahankan	35.94%	35,94 %	100 %
Rata-Rata Capaian					100%

Indikator kinerja utama yaitu persentase jasa lingkungan yang ditingkatkan/dipertahankan sebesar 35, 94 %. Indikator ini bermakna bahwa 35,94 % persen dari luas Provinsi Kalimantan Selatan direncanakan untuk ditingkatkan/dipertahankan fungsi jasa ekosistemnya. Jasa ekosistem yang akan ditingkatkan/dipertahankan adalah jasa ekosistem yang bernilai tinggi dan sangat tinggi untuk jasa pengaturan tata aliran air karena jasa ekosistem ini dapat mewakili sebagian besar jasa ekosistem lain yang dapat mencerminkan kondisi daya dukung daya tampung lingkungan hidup.

Dari target perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 35,94 % telah tercapai sebesar 35,94 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dengan target perencanaan telah tercapai 100 %. Untuk mendukung capaian kinerja ini didukung dengan targetkan 1 (satu) dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan terealisasi 1 (satu) dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Selain itu juga terdapat penyempurnaan 1 (satu) dokumen materi teknis pengelolaan jasa lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat tersusun. Ini artinya seluruh dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dihasilkan dapat tercapai sesuai target yang direncanakan.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 31. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya penjaminan Jasa Lingkungan	1 Persentase Jasa Lingkungan yang ditingkatkan/dipertahankan	100%	35.94%	35,94 %	100%	35,94%	100 %

Indikator kinerja utama yaitu persentase jasa lingkungan yang dapat dipertahankan/ditingkatkan sebesar 35,94 % dan terealisasi sebesar 35,94 % sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Ini artinya seluruh dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dihasilkan dapat tercapai sesuai target yang direncanakan.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Terdapat kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Tahun 2021, yaitu kegiatan verifikasi RPPLH kab/kota dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32. Daftar Verifikasi RPPLH Kabupaten/Kota Tahun 2021

No.	Kab/Kota	Perihal
1	Tanah Laut	Verifikasi Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

a. Upaya – upaya yang telah dilakukan

- Koordinasi dengan pemerintah pusat, UPT pemerintah pusat yang ada di daerah dan SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Selatan serta instansi terkait lainnya.
- Penyusunan dokumen materi teknis untuk menyusun kebijakan pengelolaan jasa lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

- Lambatnya ketersediaan data dasar yang diperlukan dari instansi teknis yang menyediakan data yang diperlukan untuk menyudsun dokumen perencanaan.
- Kurang tersedianya tenaga ahli yang dapat bekerja sama dalam penyusunan materi terkait penyusunan perencanaan lingkungan hidup
- Belum adanya peraturan perundangan turunan dari UU No. 32 Tahun 2009 terkait RPPLH
- Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran

c. Rencana Tindak Lanjut

- Melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan sinkronisasi dalam peningkatan sumber daya manusia
- Melakukan rapat-rapat koordinasi dan meningkatkan sinergi pemangku kepentingan terkait perencanaan lingkungan hidup

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Kegiatan penunjang kinerja yaitu kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dengan kegiatan:

1. Penyusunan Materi Teknis Jasa Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan,
2. Verifikasi RPPLH kabupaten/kota
3. Penyusunan Layanan Jasa Ekosistem untuk Materi Teknis Perubahan RPPLH.

3.1.2.2. SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 33. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan

No	Kinerja Utama	Indikator	Target & Capaian 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya luasan dampak lingkungan yang terkendali	Presentase luasan lahan terganggu yang terkendali	100 %	100%	100%
2	Meningkatnya penjaminan resiko pengamanan lingkungan	Persentase luasan yang dijamin pengamanan lingkungannya	0,69 %	0,94%	136%

Indikator pertama yaitu meningkatnya luasan dampak lingkungan yang terkendali ditargetkan 100% dan terealisasi 100% (15 perusahaan yang dinilai di KPA Provinsi Kalsel) sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Indikator kedua yaitu meningkatnya penjaminan resiko pengamanan lingkungan dengan indikator persentase luasan yang dijamin pengamanan lingkungannya yang ditargetkan sebesar 0,69% dan telah terealisasi sebesar 0,94% (6 dokumen KLHS RDTR) sehingga capaian kinerja sebesar 136%.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 34. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan

NO	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya luasan dampak lingkungan yang terkendali	1 Presentase Luasan lahan terganggu yang terkendali	-	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya penjaminan resiko pengamanan lingkungan	1 Persentase luasan yang dijamin pengamanan lingkungannya	-	0,69%	0,94%	136%	0,69%	136%

Indikator pertama yaitu meningkatnya luasan dampak lingkungan yang terkendali ditargetkan 100% dan terealisasi 100% (15 perusahaan yang dinilai di KPA Provinsi Kalsel) sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Indikator kedua yaitu meningkatnya penjaminan resiko pengamanan lingkungan dengan indikator persentase luasan yang dijamin pengamanan lingkungannya yang ditargetkan sebesar 0,69% dan telah terealisasi sebesar 0,94% (6 dokumen KLHS RDTR) sehingga capaian kinerja sebesar 136%.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Pertambangan Batubara PT. Sebuku Tanjung Coal dari Kapasitas 1.842.105 Ton/Tahun Menjadi Kapasitas Maksimal 3.701.315 Ton/Tahun dan Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dengan Kapasitas 2.500.000 Ton/Tahun (8.990,38 Ha).
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Pertambangan Batubara PT. Sebuku Sejaka Coal dari Kapasitas 1.052.632 Ton/Tahun Menjadi Kapasitas Maksimal 5.250.000 Ton/Tahun dan Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dengan Kapasitas 2.500.000 Ton/Tahun (8.139,93 Ha)

3. Rencana Usaha Perkebunan dengan Diversifikasi Usaha Tanaman Pangan oleh PT. Tunas Hutan Mandiri (8.067,01 Ha)
4. Rencana Usaha Ship to Ship Transfer Batubara PT. Dua Samudera Perkasa (625 Ha)
5. Kegiatan Pembangunan Jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Selaru-Sebuku dan Gardu Induk (GI) Selaru 150 KV PT PLN (1,8 Ha).
6. Kegiatan Pengembangan Pembangunan dan Pengoperasian Dermaga, Tangki Timbun, dan Fasilitas Penunjang Lainnya oleh PT. Pertamina (Persero) (6 Ha)
7. Kegiatan Pertambangan Batubara Metode Tambang Terbuka dan Metode Tambang Bawah Tanah PT. Sumber Kurnia Buana (10.920 Ha)
8. Kegiatan Pengerukan Kolam Pelabuhan dan Penambahan Crushing Plant pada Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. Borneo Indobara (625 Ha)
9. Kegiatan Penciutan Areal Lahan Usaha Pemanfaatan Hutan – Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Pengintegrasian Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ke dalam Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT Kirana Chatulistiwa (12.795 Ha)
10. Rencana Usaha Penyelenggaraan Alur Pelayaran PT. Dua Samudera Perkasa
11. Kegiatan Pembangunan Jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Batulicin-Tarjun dan Gardu Induk (GI) Tarjun 150 KV PT. PLN (1,5 Ha)
12. Rencana Pembangunan dan Operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Karang Putih Desa Karang Putih, Kecamatan Kelua DLH Kabupaten Tabalong (3,298 Ha)
13. Pembangunan dan operasional Depo Limbah B3 Eks TPA Maburai DLH Kabupaten Tabalong (0,010578 Ha)
14. Pembangunan dan Operasional RS Baru RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara (3,83 Ha)

15. Pembangunan dan Operasional Terminal Khusus dan Sarana Pendukungnya Kabupaten Kotabaru PT Bauntung Batuah Ruhuy Rahayu (4,62 Ha)

Terdapat indikator kegiatan yang baru dilaksanakan pada Tahun 2021, yaitu kinerja mengenai persentase meningkatnya penjaminan resiko pengamanan lingkungan. Sepanjang tahun 2021 terdapat 6 permohonan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Terhadap permohonan tersebut telah dilaksanakan validasi oleh tim validator dan telah diterbitkannya SK Validasi KLHS serta pengumuman validasi KLHS. KLHS RDTR yang telah dilakukan validasi yakni sebagai berikut:

1. KLHS RDTR PZ BWP Takisung Kabupaten Tanah Laut
2. KLHS RDTR PZ Kota Baru Aerocity Kota Banjarbaru
3. KLHS RDTR PZ BWP Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
4. KLHS RDTR PZ BWP Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
5. KLHS RDTR WP KPE Mantuil Kota Banjarmasin
6. KLHS RDTR WP Perkotaan Martapura Kabupaten Banjar

Selain KLHS RDTR, sepanjang tahun 2021 juga terdapat 8 permohonan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 2 permohonan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Terhadap permohonan tersebut telah dilaksanakan validasi oleh tim validator. KLHS RPJMD dan RTRW yang telah dilakukan validasi yakni sebagai berikut:

1. KLHS RPJMD Kabupaten Banjar
2. KLHS RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu
3. KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah
4. KLHS RPJMD Kabupaten Kotabaru
5. KLHS RPJMD Kabupaten Balangan
6. KLHS RPJMD Kota Banjarbaru
7. KLHS RPJMD Kota Banjarmasin
8. KLHS Revisi RPJMD Kabupaten Tabalong
9. KLHS Revisi RTRW Kabupaten Tabalong

7. KLHS Revisi RTRW Kabupaten Barito Kuala

a. Upaya – upaya yang telah dilakukan

1. Pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.
2. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Selatan serta instansi terkait lainnya.
3. Melakukan fasilitasi dan pembinaan serta asistensi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun KLHS.
4. Menganalisis dan menelaah kebijakan, rencana dan program yang berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan, berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Masih banyak dijumpai perbedaan persepsi pemangku kepentingan lintas sektor lintas wilayah dalam pengambilan kebijakan, rencana dan program

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan.
2. Melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan kepada pemangku kepentingan

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi dan sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Adapun pelaksanaan kegiatannya meliputi kegiatan Pembinaan/Validasi/Verifikasi KLHS, Verifikasi Kesesuaian Data dan Laporan Pra Validasi KLHS dan Pembinaan/Evaluasi Penatalaksanaan Dokumen Lingkungan.

3.1.2.3. SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 35. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

No.	Kinerja Utama	Indikator	Target dan Capaian 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunkan emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK dari Business As Usual	-15,06%	-31,06%	206%
2	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Energi dan Tutupan Lahan	Persentase pengurangan emisi sektor GRK di Sektor Energi	-17,10%	-34,2%	200%
		Persentase pengurangan emisi sektor GRK di Sektor Tutupan Lahan	28,10%	35,7%	127%
3	Meningkatnya partisipasi dunia usaha, dunia pendidikan, komunitas dan masyarakat dalam pelestarian LH	Persentase kampung atau desa yang melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	35 Lokasi	75 Lokasi	214%
Rata-Rata Capaian					187%

Indikator pertama berupa penyusunan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 untuk tahun inventori 2020 telah disusun sebagaimana amanat ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2021 dilakukan perhitungan GRK dari lima sektor, dan tersaji dalam 1 (satu) buah laporan sehingga target yang ditetapkan terpenuhi 206%. Persentase penurunan emisi GRK dari *Business As Usual* ditargetkan 15,06% dan terealisasi 31,06%, sehingga capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 206%.

Indikator kedua yaitu Persentase Emisi GRK Sektor Energi dan Tutupan Lahan, Sektor Energi yang dihitung ditargetkan -17,10% dan terealisasi -34,2%, sehingga capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra sebesar 200%, untuk Sektor Tutupan Lahan yang dihitung ditargetkan 28,10% dan terealisasi 35,7%, sehingga capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra sebesar 127%.

Indikator ketiga yaitu terbentuknya kampung iklim di 35 lokasi, sedangkan realisasi pada tahun 2021 kampung iklim yang terbentuk sebanyak 75 lokasi. Dengan demikian indikator kinerja terpenuhi dengan capaian 214 %.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 36. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Energi dan Tutupan Lahan	1 Persentase pengurangan emisi sektor GRK di Sektor Energi	-	17.10%	34.2%	200%	17,10%	200%
		2 Persentase pengurangan emisi sektor GRK di Sektor Tutupan Lahan	-	32.50%	35.7%	127%	28,10%	127%
2	Meningkatnya partisipasi dunia usaha, dunia pendidikan, komunitas dan masyarakat dalam pelestarian LH	1 Persentase kampung atau desa yang melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	55 Lokasi	26 Lokasi	75 Lokasi	214%	35 Lokasi	214%

Indikator pertama yaitu Persentase pengurangan emisi sektor GRK di Sektor Energi pada tahun 2020 masih belum bisa dihitung dikarenakan adanya evaluasi perubahan indikator kinerja pada Evaluasi SAKIP. pada tahun 2021 terealisasi 34,2%, sehingga capaian kinerja 200%.

Indikator kedua yaitu Persentase pengurangan emisi sektor GRK di Sektor Tutupan Lahan pada tahun 2020 masih belum bisa dihitung dikarenakan adanya evaluasi perubahan indikator kinerja pada Evaluasi SAKIP. Pada tahun 2021 terealisasi 35.7%, sehingga capaian kinerja 127%.

Indikator ketiga yaitu Persentase kampung atau desa yang melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tahun 2020

terrealisasi 55 Lokasi, dan pada tahun 2021 terealisasi dengan 75 lokasi, sehingga capaian kinerja 214%.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Permasalahan emisi GRK di Kalimantan Selatan bersumber dari kegiatan produksi dan penggunaan energi, kegiatan kehutanan dan perubahan tutupan lahan, kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan, dan kegiatan pengelolaan limbah domestik dan industri. Sebagai acuan dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (PEP), diperlukan proyeksi- ulang tingkat emisi rujukan (REL, *Reference Emission Level*) hingga tahun 2030.

Tingkat emisi rujukan agregat tahun 2030 mencapai 38.437 Gg CO₂-eq. Pangsa emisi rujukan 2030 ini berasal dari bidang energi dan transportasi sebesar 24.341 Gg CO₂-eq (63,3%), bidang kehutanan dan perubahan tutupan lahan 4.598 Gg CO₂-eq (12,0%), bidang pertanian 7.759 Gg CO₂-eq (20,2%), dan pengelolaan limbah domestik dan industri sebesar 1.739 Gg CO₂-eq (4,5%).

Skenario Rencana Aksi Daerah untuk menurunkan emisi GRK dibuat berdasarkan dokumen RPJP 2005-2025 dan RPJM 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan, dan Rencana Strategis SKPD terkait. Berdasarkan skenario dimaksud, target penurunan emisi GRK agregat tahun 2030 adalah 7.682 Gg CO₂-eq atau 19,99% dari tingkat emisi rujukan tahun 2030 sebesar 38.437 Gg CO₂-eq. Target ini masih di bawah target nasional 29,0%. Untuk mendongkrak target penurunan memenuhi atau bahkan melampaui target nasional tersebut, diperlukan upaya peningkatan rencana aksi melalui partisipasi para pihak pada setiap sektor atau bidang yang berkontribusi pada penurunan emisi GRK di Kalimantan Selatan.

Sejalan dengan komitmen nasional Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi GRK, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi GRK melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2013. Dalam RAD-GRK Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan *baseline* atau *business as usual* (BAU-baseline), total

emisi dari sumber berbasis lahan sebesar 107,13 Mt CO₂-eq (2011-2020); 26,344 Mt CO₂-eq (2010-2020) dari energi, transportasi dan industri; dan 6,481 Mt CO₂-eq (2010-2020) dari limbah. Sejalan dengan RAD tersebut, maka diperlukan kegiatan inventarisasi emisi GRK di setiap wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Untuk melihat seberapa besar emisi GRK yang terjadi pada suatu periode/tahun tertentu dari suatu wilayah, serta untuk melihat besaran penurunan emisi GRK atas upaya-upaya yang telah dilakukan, maka inventarisasi emisi GRK harus dilaksanakan. Inventarisasi emisi GRK bertujuan untuk menyediakan :

- a. Informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Informasi pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa Gubernur bertugas menyelenggarakan inventarisasi GRK di tingkat provinsi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan inventarisasi GRK di kabupaten dan kota di wilayahnya. Di samping itu, Gubernur melaporkan hasil kegiatan inventarisasi GRK dari kabupaten dan/atau kota kepada Menteri satu kali dalam setahun.

Menurut Peraturan Presiden No 71 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, sektor yang dilaporkan untuk sumber emisi dan rosot yang masuk dalam inventarisasi GRK dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan ketersediaan data aktivitas. Kategori kunci emisi dan serapan GRK. Sektor yang dapat dilaporkan di Kalimantan Selatan meliputi: (1) sektor energi yang terdiri dari: penggunaan energi untuk industri pembangkit, transportasi dan rumah tangga, serta produksi batubara dan migas, (2) sektor AFOLU yang terdiri dari: pertanian, peternakan, kehutanan dan

perubahan tutupan lahan, (3) sektor limbah yang terdiri dari limbah padat dan cair domestik dan limbah cair industri, dan (4) sektor Industri (IPPU).

Adapun tingkat emisi dan serapan GRK tahun 2020 mencapai agregat (total) 19.795 Gg CO₂-eq yang terdiri dari Energi 8.622 (43,6%), IPPU 5.856 (29,6%), Pertanian 3.654 (18,5%), sektor kehutanan dan perubahan tutupan lahan lainnya menyerap C sebesar 996 Gg CO₂-eq (5,0%), dan Limbah 667 (3,4%) Gg CO₂-eq. Dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 menunjukkan status emisi masing-masing 20.117 dan 26.666 Gg CO₂-eq. Kontribusi penurunan emisi pada tahun 2020 adalah 31,1% dari BAU 28.712 Gg CO₂-eq. Dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 penurunannya adalah masing-masing 20,3% dan 0,8% dari BAU masing-masing.

Kecenderungan emisi GRK di Kalimantan Selatan dari baseline tahun 2010 menunjukkan penurunan emisi dari tahun 2011 – 2020 sangat berfluktuasi. Kecenderuan emisi meningkat pada periode 2011 – 2016, sedangkan pada periode 2017 – 2020 cenderung terjadi penurunan emisi GRK dari BAU. Proyeksi capaian penurunan emisi GRK pada tahun 2030 adalah 36,1% yang sejalan dengan capaian Nasional 29% pada 2030. Kontribusi per sektor penurunan emisi yang ditargetkan pada 2030 ialah: Kehutanan (69,3%), Limbah (51,1%), Energi (34,7%), IPPU (28,9%) dan Pertanian (27,4%).

Tingkat Emisi GRK menggambarkan proyeksi emisi GRK pada skenario BAU dan skenario Aksi Mitigasi sampai dengan tahun 2030. Tingkat emisi GRK tahun 2030 pada skenario BAU diproyeksikan mencapai 47.775 Gg CO₂-eq, sementara pada skenario Aksi Mitigasi diproyeksikan mencapai 30.540 Gg CO₂-eq. Hal ini berarti bahwa tingkat emisi GRK di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2030 diproyeksikan akan menurun sebesar 36,07%. Proyeksi penurunannya melampaui komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030.

Sementara itu proyeksi tingkat emisi GRK tahun 2020 pada skenario BAU dan skenario Aksi Mitigasi masing-masing mencapai 28.712 dan 22.997 Gg CO₂-eq, sedangkan realisasinya sebesar

19.795 Gg CO2-eq, dengan kata lain terjadi penurunan emisi GRK sebesar 31,1% dan targetnya 19,9% (dibanding BAU).

Tabel 37 : Perubahan emisi GRK historis 2011 - 2020, dan target penurunan emisi dan serapan GRK sektoral dan agregatnya di Kalimantan Selatan hingga tahun 2030.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Historis (Gg CO2-eq)	9.527	11.026	13.158	12.685	15.438	16.429	17.168	16.983	15.564	-
BAU (Gg CO2-eq)	13.177	13.863	15.896	16.731	17.274	18.238	19.250	20.317	21.571	22.971
Mitigasi (Gg CO2-eq)	13.046	13.586	15.477	16.166	16.534	17.003	17.476	17.984	18.583	19.182
Target										
Energi	0,0%	-0,3%	-0,4%	-0,5%	-0,8%	-3,9%	-6,8%	-9,6%	-12,2%	-14,7%
Pertanian	-1,3%	-2,6%	-3,8%	-5,2%	-6,5%	-8,2%	-9,9%	-11,7%	-13,4%	-14,9%
Kehutanan	-10,3%	-15,9%	-19,0%	-20,8%	-21,8%	-22,2%	-22,2%	-21,9%	-23,5%	-28,1%
Limbah	-0,3%	-0,2%	-0,4%	-1,6%	-2,9%	-4,2%	-7,8%	-11,0%	-13,8%	-16,6%
Agregat	-1,0%	-2,0%	-2,6%	-3,4%	-4,3%	-6,8%	-9,2%	-11,5%	-13,8%	-16,5%
Realisasi										
Energi	0,0%	-0,2%	-0,3%	-0,4%	-0,7%	-4,0%	-4,0%	-5,7%	-7,6%	
Pertanian	-7,4%	-11,0%	-15,9%	-16,1%	-17,9%	-19,0%	-19,3%	-32,4%	-34,2%	
Kehutanan	-433,5%	-243,7%	-173,6%	-238,5%	-55%	-18,6%	-24,7%	-31,6%	-118,3%	
Limbah	-1,5%	-2,8%	-3,7%	-6,4%	-9,7%	-14,0%	-16,9%	-23,8%	-26,5%	
Agregat	-27,7%	-20,5%	-17,2%	-24,2%	-10,6%	-9,9%	-10,8%	-16,4%	-27,8%	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Historis (Gg CO2-eq)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAU (Gg CO2-eq)	24.129	25.436	26.899	28.465	30.144	31.933	33.856	35.927	38.161	40.575
Mitigasi (Gg CO2-eq)	19.546	19.949	20.394	20.885	21.420	22.020	22.675	23.390	24.170	25.080
Target										
Energi	-17,1%	-19,4%	-21,7%	-23,8%	-25,9%	-27,9%	-29,8%	-31,7%	-33,5%	-35,2%
Pertanian	-16,4%	-17,9%	-19,3%	-20,6%	-21,9%	-22,9%	-23,9%	-24,8%	-25,7%	-26,5%
Kehutanan	-32,5%	-37,9%	-43,9%	-49,1%	-53,7%	-57,6%	-61,1%	-64,2%	-66,9%	-69,3%
Limbah	-20,9%	-25,2%	-29,4%	-33,7%	-38,5%	-43,1%	-47,8%	-52,7%	-57,8%	-59,6%
Agregat	-19,0%	-21,6%	-24,2%	-26,6%	-28,9%	-31,0%	-33,0%	-34,9%	-36,7%	-38,2%
Realisasi										
Energi										
Pertanian										
Kehutanan										
Limbah										
Agregat										

Ket : Data yang di gunakan adalah Data Inventori tahun n-1

- **Kampung Iklim**

Untuk pembentukan kampung iklim terdapat peningkatan kinerja dari target yang direncanakan yaitu 35 lokasi dapat tercapai menjadi 75 lokasi kampung iklim. Hal ini karena pembinaan yang terus menerus dilakukan oleh Provinsi kepada institusi Kabupaten/ Kota dan masyarakat, berdampak pada meningkatkan pemahaman pihak Kabupaten/ Kota terhadap pentingnya pembentukan kampung iklim dalam mengantisipasi perubahan iklim. Selain itu, pemberian penghargaan kepada lokasi kampung iklim baik dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dari Gubernur semakin meningkatkan motivasi pihak pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) serta masyarakat untuk melakukan dan meningkatkan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.

- Rekapitulasi keikutsertaan Proklim di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 38 : Rekapitulasi Proklim di Kalimantan Selatan

No	Nama Kabupaten/ Kota	Peringkat Penghargaan Proklim			
		Lestari	Utama	Madya	Pratama
1	Kota Banjarmasin		15		
2	Kota Banjarbaru		4	2	
3	Kabupaten Banjar		4		
4	Kabupaten Tanah Laut	1	3	5	
5	Kabupaten HSS		5		
6	Kabupaten HST				2
7	Kabupaten HSU		1	1	
8	Kabupaten Tapin		1		
9	Kabupaten Balangan			8	
10	Kabupaten Tabalong		3	2	
11	Kabupaten Barito Kuala				1
12	Kabupaten Tanah Bumbu	1	4	8	
13	Kabupaten Kotabaru			2	2
	Total	2	39	29	5

Dalam melaksanakan kinerja Seksi PLH, terdapat upaya yang telah dilakukan, hambatan dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

a. Upaya – upaya yang telah dilakukan

- Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Secara umum kegiatan Inventarisasi GRK pada Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dapat berjalan dengan baik. Penyusunan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) tahun inventori 2020 dapat dilakukan dan selesai sesuai jadwal yang direncanakan dengan melakukan perhitungan GRK dari 5 (lima)

sektor. Penyusunan laporan Inventarisasi GRK dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa yang memiliki tenaga ahli yang sesuai untuk melakukan inventarisasi GRK. Target penyusunan laporan inventarisasi GRK dapat mencapai 100%. Untuk melengkapi data inventarisasi provinsi dan nasional, telah dilakukan sosialisasi kepada kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan yang bertujuan agar Kabupaten/ Kota secara periodik melaporkan inventarisasi GRK sebagaimana amanat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun arahan-arahan pengurangan emisi GRK di Provinsi Kalimantan Selatan di antaranya adalah :

- a. Arahan rencana aksi untuk menurunkan emisi GRK sektor energi meliputi:
 - Membatasi penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik terutama pembangkit listrik pada kegiatan industri dan manufaktur dengan mendorong penggunaan energi terbarukan berbasis biofuel
 - Menuntaskan konversi pemakaian bahan bakar minyak tanah dengan LPG
 - Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar pada kegiatan transportasi melalui program manajemen kebutuhan transportasi dan peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar.
 - Mengurangi ketergantungan pendapatan asli daerah atas produksi batubara.
2. Arahan rencana aksi untuk menurunkan emisi GRK sektor kehutanan dan perubahan tutupan lahan adalah pengendalian perubahan pola dan pemanfaatan ruang untuk mendukung Gerakan Revolusi Hijau. Di masa akan datang bidang ini menjadi andalan utama dalam penurunan emisi GRK di Kalimantan Selatan, karena ia mampu meningkatkan serapan GRK.
3. Arahan rencana aksi untuk menurunkan emisi GRK sektor pertanian meliputi:

- Meningkatkan efisiensi energi dan bahan dalam pengelolaan tanah dan budidaya padi sawah seperti pemakaian air, pupuk sintetis terutama urea, dan kapur
- Meningkatkan efisiensi energi dan bahan dalam pengelolaan ternak, terutama ternak sapi melalui pengembangan unit-unit biodigester untuk memanfaatkan gas metan, dan pengembangan pakan ternak rendah metan.

4. Arahana rencana aksi untuk menurunkan emisi GRK sektor pengelolaan

limbah meliputi:

- Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas TPA, sehingga mengurangi porsi sampah yang dibakar dan atau dibuang sembarangan
- Mengembangkan sanitasi pengelolaan limbah cair domestik yang lebih sehat.
- Meningkatkan pengawasan dan pengarahana tata-kelola limbah industri CPO dan karet remah untuk mengurangi emisi gas metan, melalui pemanfaatannya untuk sumber energi.
 - Kampung Iklim
 - Meningkatkan pembinaan pada masyarakat lokasi kampung iklim. Target 35 lokasi dapat tercapai menjadi 75 lokasi kampung iklim, sehingga target pembentukan kampung iklim tahun 2021 dapat mencapai 214 %.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Secara keseluruhan pencapaian target Indikator Kinerja Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Kampung Iklim tidak mengalami hambatan yang berarti.

c. Rencana Tindak Lanjut

- Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Dalam hal perbaikan kinerja, untuk melakukan inventarisasi GRK diperlukan pengayaan data dari berbagai sektor untuk mendukung perhitungan GRK. Selain itu, untuk melengkapi pelaporan inventarisasi GRK selain ketiga sektor yang telah dilakukan perhitungan emisi GRK nya, perlu

dilengkapi dengan perhitungan emisi dari sektor manufaktur. Hal penting lainnya untuk melengkapi data inventarisasi provinsi dan nasional, telah dilakukan sosialisasi kepada kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan yang bertujuan agar Kabupaten/ Kota secara periodik melaporkan inventarisasi GRK sebagaimana amanat ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perlu dilakukan koordinasi kepada SKPD sektor terkait untuk mengumpulkan data dan informasi aktivitas tiap sektor yang dapat menyumbang penurunan GRK.

- **Kampung Iklim**

Untuk meningkatkan kinerja perlu terus dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada kabupaten/ kota dan masyarakat kampung iklim. Hal ini untuk terus mengingatkan dampak perubahan iklim dan upaya semua pihak dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu diperlukan komunikasi lebih intensif untuk mengajak peran serta dunia usaha, dunia pendidikan, LSM dan komunitas lingkungan dalam mendukung dalam menginventarisasi dampak perubahan iklim suatu kawasan dan merencanakan aksi adaptasi dan mitigasi yang tepat.

D. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Kinerja

Pelaksanaan Inventarisasi GRK dapat dilaksanakan melalui kegiatan Pengendalian Perubahan Kampung Iklim dan Desa Sasangga Banua. Dalam menunjang tercapainya kinerja kegiatan Pengendalian Perubahan Iklim, maka koordinasi, konsultasi dan pembinaan secara terus menerus dari Pemerintah Pusat sangat diperlukan. Selain itu diperlukan sinergitas data dari setiap kegiatan yang ada pada DLH Prov Kalsel khususnya dan dari SKPD terkait lingkup Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat memperkaya informasi dan data inventarisasi GRK tingkat provinsi. Sedangkan untuk melengkapi laporan inventarisasi GRK di Provinsi Kalimantan Selatan penyusunan laporan dari Kabupaten/ Kota juga dituntut untuk dapat dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya.

Demikian juga pembentukan kampung iklim dapat dilaksanakan melalui kegiatan Pengendalian Perubahan Iklim. Koordinasi dan pembinaan kepada Kabupaten/ Kota sangat dirasakan manfaatnya dalam rangka upaya pembentukan kampung iklim. Pembinaan dan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat harus terus dilakukan untuk dapat memahami isu perubahan iklim dan menjalankan perannya dalam melakukan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Untuk identifikasi Desa Ramah Iklim dalam Pembentukan calon Desa Sasangga Banua di Provinsi Kalimantan Selatan diperlukan strategi berupa penguatan pemahaman dan kesadaran masyarakat desa tentang permasalahan lingkungan berkaitan dengan perubahan iklim dan dampaknya (menghasilkan identifikasi kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat serta permohonan usulan penguatan upaya adaptasi dan mitigasi dari tingkat desa kepada Pemerintah), mengajak sinergitas upaya pemerintah daerah dalam mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat desa serta melakukan identifikasi dan menilai kerentanan yang dihadapi lokasi sasaran sebagai dampak perubahan iklim dengan petunjuk teknis dari KLHK. Strategi lainnya yaitu meneruskan adaptasi dan mitigasi yang telah dilakukan dan memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, memperkuat kelembagaan masyarakat desa lokasi sasaran untuk perubahan iklim dan menetapkan target penurunan gas rumah kaca dan membangun jejaring peduli iklim bersama Instansi Pusat, Dinas LH Kab/ Kota dan Instansi terkait (pertanian, peternakan, perikanan, ESDM, PU, PMD, PPA) Membangun jejaring kemitraan peduli iklim dengan pihak swasta, perguruan tinggi dan LSM.

3.1.3 BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN KEMITRAAN

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 39. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan

No	Kinerja Utama	Indikator	Target & Capaian 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah	Presentase pengelolaan sampah di Kalsel	97%	78,31%	81%
2	Meningkatkan pengelolaan limbah B3	Persentase kegiatan/usaha yang menerapkan pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan	100%	100%	100%
3	Meningkatkan peran serta institusi maupun masyarakat di bidang lingkungan hidup	Presentase peningkatan peran serta mitra dan masyarakat dalam pelestarian LH	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					99%

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 40. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 terhadap target akhir renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Presentase pengelolaan sampah di Kalsel	81%	98%	69.08%	70.48%	85%	81.27%
2	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/ kegiatan yang menerapkan pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan	100%	100%	84,10%	84,10%	98%	84,10%

3	Meningkatnya peran serta institusi maupun masyarakat di bidang lingkungan hidup	Persentase peran serta mitra dan masyarakat dalam pelestarian LH	100%	100%	100%	100%	8 Aksi	6.52%
---	---	--	------	------	------	------	--------	-------

Indikator pertama pada kinerja utama pertama mengembangkan sistem penilaian, Indikator pertama pada kinerja pertama mengembangkan program dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yaitu presentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terealisasi 14,57%, indikator ini baru dibuat kebijakannya berdasarkan peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Indikator kedua pada kinerja kedua mengembangkan program dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yaitu presentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terealisasi 63,74 %, indikator ini baru dibuat kebijakannya berdasarkan peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Indikator Jumlah perusahaan/RS/Instansi yang diawasi terkait limbah B3 pada tahun 2020 terealisasi 37 perusahaan/RS dengan persentasi 128% dan pada tahun 2021 mengalami penambahan menjadi 16 perusahaan/RS yang terealisasi dengan persentasi 100%.

Indikator ketiga yaitu Presentase peningkatan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan pada tahun 2020 didapatkan 27 sekolah adiwiyata provinsi, pada tahun ini didapatkan 37 sekolah. Sedangkan adiwiyata nasional tahun sebelumnya didapatkan ada 7 sekolah, untuk tahun ini didapatkan 17 sekolah.

Indikator keempat yaitu Peningkatan peran serta institusi maupun masyarakat di bidang lingkungan hidup peduli LH pada tahun 2020 terealisasi penambahan 2 Mitra dan pada tahun 2021 terealisasi 75 Mitra (komunitas peduli lingkungan, instansi peduli

lingkungan, institusi peduli lingkungan, masyarakat peduli lingkungan) sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Terdapat penurunan kinerja dalam pengelolaan sampah di Kalsel. Potensi timbulan sampah tahun 2021 di Provinsi Kalimantan selatan sebanyak 320,220.74 Ton/Tahun. Jumlah pengurangan sampah sebanyak 46,666.46 Ton/Tahun dengan kegiatan pembatasan timbulan sampah, sampah termanfaatkan di sumber sampah dan sampah didaur ulang di sumber. Jumlah penanganan sampah sebanyak 204,115.30 Ton/Tahun dengan kegiatan pemilahan/pengumpulan sampah, pengangkutan sampah ke tempat pengolahan sampah atau tempat pemrosesan akhir (TPA), pengolahan sampah menjadi bahan baku dan sumber energi dan pemrosesan akhir di TPA.

Dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk di Kalimantan Selatan semakin meningkat pula volume dan jenis sampah semakin hari semakin bertambah dan berpotensi menimbulkan permasalahan persampahan dan berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Bahwa dalam rangka mencegah permasalahan dan dampak sebagaimana dimaksud, pengelolaan sampah dipandang perlu dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu di tingkat Daerah agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Lomba Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi wahana untuk menggali kepedulian masyarakat Kalimantan Selatan terhadap upaya pengurangan sampah dan menjadikan sampah menjadi sumberdaya dan bernilai ekonomi serta ikut berkomitmen untuk menjaga kebersihan lingkungannya dari sampah khususnya di wilayah Banjarbakula. Peserta yang diikuti oleh Bank Sampah yang berbasis Masyarakat di wilayah Banjarbakula dengan tujuan pengurangan sampah yang masuk ke TPA Regional Banjarbaku

atau hanya residu setelah dipilah di Bank Sampah. Para pemenang di wilayahnya akan menjadi contoh yang akan diikuti oleh pengelola bank sampah lain di masyarakat sehingga mampu mengurangi timbulan sampah yang dapat mencemari lingkungan.

Capaian kinerja pengelolaan limbah B3 di tahun 2021 yaitu 113%. Terjadi penurunan jumlah Perusahaan/Rumah Sakit yang diawasi menjadi 16 Perusahaan/Rumah Sakit dari tahun sebelumnya yang hanya 37 Perusahaan/Rumah Sakit. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan pengendalian dan pengawasan limbah B3 pada 4 Perusahaan Pengumpul Limbah B3 yaitu PT. Nazar, PT. Mitra Abadi Salsabila (MAS), PT. Maju Asri Jaya dan CV. Barokah.

Pengawasan pengelolaan Limbah B3 medis pada tempat karantina dan pemusnah untuk tahun 2021 ini dilaksanakan diantaranya kepada fasilitas pelayanan Kesehatan seperti RSUD Hadji Boejasin, RSUD H. Badaruddin Kasim, RSUD Balangan, RSUD Pambalah Batung, RSUD Brigjend H. Hasan Basry, RSUD Datu Sanggul dan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor.

Perusahaan penghasil Limbah B3 yang dilaksanakan pengawasan di tahun 2021 ini adalah PT. Patria Maritim Perkasa, PT. Surya Sakti Darma Kencana, PT. Barito Galangan Nusantara dan PT. Restu Ibu.

Pengawasan kepada pemanfaat/pengolah Limbah B3 juga dilakukan kepada PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.

Untuk capaian sekolah yang berbudaya lingkungan Sekolah adiwiyata provinsi mengalami penurunan yang disebabkan Karena menurunnya jumlah sekolah yang dikirim oleh kab/kota. Beberapa kabupaten/kota tidak menganggarkan kegiatan sekolah adiwiyata mandiri diusulkan ketika sekolah tersebut sudah menjadi sekolah adiwiyata nasional selama (dua) tahun berturut-turut. Untuk tahun 2020 penilaian sekolah adiwiyata nasional dan mandiri ditiadakan oleh KLHK karena pandemi Covid19. Jumlah sekolah adiwiyata nasional di Tahun 2019 dan 2021 meningkat dari 7 sekolah menjadi 17 sekolah, namun nilai ini masih cukup rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2017

terbanyak yaitu sebanyak 51 sekolah. Sedangkan untuk sekolah adiwiyata mandiri tidak terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu stagnan sebanyak 3 sekolah.

Untuk kegiatan lainnya seperti Kalpataru di tahun 2020 dari sejumlah usulan yang disampaikan ke KLHK masih belum ada yang lolos, sedangkan pada tahun ini dari sejumlah usulan yang disampaikan didapatkan 1 usulan yang lolos. Kegiatan selanjutnya seperti Proklamasi dimana didapatkan peningkatan jumlah usulan maupun desa/lokasi yang ditetapkan sebagai Proklamasi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 75 desa/lokasi. Kegiatan selanjutnya ada perkantoran ramah lingkungan dimana terdapat peningkatan jumlah unit kerja/kantor yang berpartisipasi dimana pada tahun 2020 ada sebanyak 16 kantor yang berpartisipasi di tahun ini ada sebanyak 34 kantor. Sasanga Banua yang diinisiasi pada tahun ini juga banyak diikuti oleh para partisipan mulai dari kategori pemerintah daerah, kelompok maupun perorangan dimana masing-masing secara berturut-turut ada sebanyak 7, 6, dan 3 usulan pada masing-masing kategori.

a. Upaya-Upaya yang telah dilakukan

- Aktif dalam melakukan sosialisasi atau pembinaan ke Kab/Kota dalam hal persampahan, limbah B3 maupun kegiatan kemitraan pada gerakan peduli LH.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kab/Kota terkait penyampaian informasi terkait regulasi ataupun informasi lainnya pada kegiatan yang ada di PSLB3K.
- Melakukan pengawasan pengelolaan persampahan di TPA maupun pengawasan pengelolaan limbah B3.
- Melakukan pengusulan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh KLHK di tingkat Nasional seperti Adiwiyata, Kalpataru, Proklamasi dan lainnya.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia untuk tingkat kelancaran dan keberhasilan capaian.

- Kurangnya sarana dan prasarana seperti PC (Personal Computer), Mesin Fotokopi dan Printer untuk sebagai alat penunjang kegiatan di bidang dan PC sebagai basis data bidang.

c. Rencana Tindak Lanjut

- Lebih proaktif lagi dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan terutama kepada Kab/Kota yang masih belum terlihat kemajuannya secara signifikan.
- Meningkatkan pengawasan dalam hal pencegahan terjadinya pencemaran maupun kerusakan LH pada pengelolaan sampah terutama di TPA dan pengelolaan limbah B3.
- Lebih dini dalam menjemput bola untuk pengumpulan usulan untuk diikutsertakan dalam penilaian kegiatan yang dilaksanakan oleh KLHK dan mempersiapkannya secara baik dan matang dengan pembinaan yang intensif untuk meningkatkan persentase kelolosan dalam penilaian di pusat.

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program penunjang kinerja adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraandengan kegiatan yaitu:

- Implementasi kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dengan kegiatan Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 . Dukungan tersebut pada tahun 2021 berupa tambahan anggaran untuk Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Unit Incinerator dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- Analisis dari hasil kegiatan Peran Serta Masyarakat adalah perlunya dukungan dari berbagai *stake holder* terkait seperti dari dunia usaha, instansi maupun komunitas. Untuk sekolah Adiwiyata perlu adanya dukungan dari pihak lain seperti Disdikbud. Prov maupun Kab/Kota dan Kanwil Kemenag Prov maupun Kab/Kota. Kegiatan lainnya pun juga tidak luput dari dukungan dari lapisan elemen masyarakat untuk ketercapaian tujuan Dinas.

3.1.3.1 SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 41. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan

No	Kinerja Utama	Indikator	Target & Capaian 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pengurangan dan penanganan sampah	1 Presentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	24%	14,57%	60,70%
		2 Presentase Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis Rumah Tangga	74%	63,74%	86,13%
Rata-Rata Capaian				78,31%	79,90%

Kinerja Utama yaitu Meningkatkan pengurangan dan penanganan sampah yaitu dengan Indikator kinerja pertama yaitu Presentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ditargetkan 24% dan terealisasi 14,57%, sehingga capaian kinerja sebesar 60,70%.

Indikator kedua yaitu Presentase Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis Rumah Tangga ditargetkan 74% pada tahun 2021 dan terealisasi 63,74%, sehingga capaian kinerja sebesar 86,13%.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 42. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya pengurangan dan penanganan sampah	1 Presentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	94%	24%	14,57%	60,70%	24%	60,70%
		2 Presentase Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis Rumah Tangga	75%	74%	63,74%	86,13%	74%	86,13%

Kinerja Utama yaitu Meningkatnya pengurangan dan penanganan sampah dengan Indikator kinerja pertama yaitu Presentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terealisasi sebesar 14,57% ditahun 2021 dan ditahun 2020 terealisasi sebesar 21%, sehingga terjadi penurunan capaian atau hanya tercapai 60,70% dari target yang telah ditentukan.

Indikator kedua Presentase Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis Rumah Tangga terealisasi 63,74% ditahun 2021, sedangkan ditahun 2020 terealisasi sebesar 58%. sehingga terjadi peningkatan capaian.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Terjadi penurunan kinerja terhadap Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga hal ini disebabkan oleh banyaknya bank sampah yang tidak beroperasi selama pandemi covid-19. Selain itu pada masa covid-19 terjadi perubahan perilaku masyarakat yang menyebabkan semakin banyaknya timbulan sampah dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah. Sebagaimana data SIPSN Potensi timbulan sampah tahun 2021 di Provinsi

Kalimantan selatan sebanyak 320,220.74 Ton/Tahun, dengan Jumlah pengurangan sampah sebanyak 46,666.46 Ton/Tahun melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, sampah dimanfaatkan di sumber sampah dan sampah didaur ulang di sumber.

Sedangkan data SIPSN untuk penanganan sampah sebanyak 204,115.30 Ton/Tahun melalui kegiatan pemilahan/pengumpulan sampah, pengangkutan sampah ke tempat pengolahan sampah atau tempat pemrosesan akhir (TPA), pengolahan sampah menjadi bahan baku dan sumber energi dan pemrosesan akhir di TPA.

Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu mulai dari tingkat tapak termasuk juga untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tidak hanya manfaat kesehatan maupun lingkungan.

Untuk meningkatkan pengurangan sampah dan menjadikan sampah menjadi sumberdaya dan bernilai ekonomi serta ikut berkomitmen untuk menjaga kebersihan lingkungannya dari sampah khususnya di wilayah Banjarkakula dilaksanakan Lomba Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Tahun 2021. Peserta diikuti oleh Bank Sampah yang berbasis Masyarakat di wilayah Banjarkakula dengan tujuan pengurangan sampah yang masuk ke TPA Regional Banjarkakula atau hanya residu setelah dipilah di Bank Sampah. Para pemenang di wilayahnya akan menjadi contoh yang akan diikuti oleh pengelola bank sampah lain di masyarakat sehingga mampu mengurangi timbulan sampah yang dapat mencemari lingkungan

Tabel. 43 Daftar Penetapan Hasil Penilaian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan

No	NAMA BANK SAMPAH	KAB/KOTA	NILAI	PERINGKAT
1	Bank Sampah Kenanga Mika	Banjarmasin	1504	I
2	Bank Sampah Idola Tungkaran	Banjar	1478	II
3	Bank Sampah Khalid	Banjarbaru	1464,8	III

a. Upaya-Upaya yang telah dilakukan

- Melakukan pengawasan pengelolaan persampahan ke kabupaten/kota
- Membuat Surat Edaran tentang Larangan Menggunakan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
- Membuat Surat Edaran tentang Himbauan Menjadi Nasabah Bank Sampah.
- Membuat Surat Edaran tentang Larangan Penggunaan Air Minum Dan Makanan Berkemasan Bahan Plastik Atau Styrofoam Serta Kantong Plastik Sekali Pakai Lingkup Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan.
- Membuat Surat Edaran tentang himbauan pengurangan penggunaan kemasan plastik pada pembagian daging qurban hari raya idul adha 1442 H.
- Membuat Tim URC Penanganan sampah lingkup pemprov kalsel nomor 188.44/0225/KUM/2020
- Mengadakan lomba penilaian perkantoran ramah lingkungan pemprov kalsel tahun 2021 nomor 188.44/0685/KUM/2021
- Mengadakan kegiatan Aksi Jumat Bersih pada program Sungai Martapura Bungas

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia untuk pengelolaan persampahan
- Keterbatasan sarana prasarana penunjang kegiatan
- Keterbatasan anggaran
Kurangnya koordinasi lintas sektor terkait

c. Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan Sampah
- Berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Dinas untuk memaksimalkan dan mengefektifkan peran pemeliharaan dan pengelolaan TPS dan T PA
- Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku
- Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap kegiatan yang dilakukan
- Berkoordinasi dengan dengan Kab/Kota
- Melakukan penyusunan informasi pengelolaan sampah di tingkat provinsi
- Melakukan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
- Melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri
- Melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam
- Pembinaan pendaurulangan sampah

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program penunjang kinerja adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan yaitu:

1. Implementasi kebijakan pengelolaan persampahan UU No. 18/2008
2. Implementasi kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga

Pelaksanaan peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pengelolaan Sampah Daerah

3.1.3.2. SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B3

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Perbandingan Realisasi dan target Seksi Pengelolaan Limbah B3 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 44. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya persentase pemenuhan komitmen ijin pengumpulan LB3	1 Persentase ketaatan penghasil, pengangkut, penimbun dan pengolah limbah B3	100%	84,10%	84,10%
		2 Persentase pemenuhan komitmen aturan pengumpulan Limbah B3	100%	100%	100%
Rata - Rata Capaian					100 %

Indikator pertama yaitu persentasi jumlah perusahaan/RS/Instansi yang diawasi terkait limbah B3 ditargetkan 16 perusahaan/RS dan terealisasi 18 perusahaan/RS, sehingga capaian kinerja sebesar 113%.

Indikator kedua yaitu persentasi jumlah dokumen terkait pembangunan incinerator yang dapat diselesaikan yang ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 45. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya persentase pemenuhan komitmen ijin pengumpulan LB3	1 Persentase ketaatan penghasil, pengangkut, penimbun dan pengolah limbah B3	n/a (37 Perusahaan / RS)	100%	84,10%	84,10%	100% 125 Perusahaan / RS	n/a 100%

		2	Persentase pemenuhan komitmen aturan pengumpulan Limbah B3	-	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	---	--	---	------	------	------	------	------

Indikator pertama yaitu persentase ketaatan penghasil, pengangkut, penimbun dan pengolah limbah B3 berizin pada terealisasi dengan persentase 100% dari jumlah keseluruhan usaha/kegiatan/RS di Kalimantan Selatan sebanyak 390 dengan rincian 221 Kegiatan/Usaha dan 169 Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan data dari siraja limbah terdapat 62 perusahaan yang dinyatakan tidak taat atau 15,90% Dimana pada tahun 2021 telah dilakukan pengawasan secara langsung pada 18 perusahaan/RS ditemukan sebanyak 6 perusahaan/RS yang perlu upaya perbaikan terhadap pengelolaan Limbah B3 dan telah dilakukan perbaikan dalam rentang waktu tahun yang sama sehingga dinyatakan ketaatan 100%.

Indikator kedua yaitu Persentase pemenuhan komitmen aturan pengumpulan Limbah B3 pada tahun 2021 sebesar 100%.

Pada tahun 2021 dilakukan Penyusunan Dokumen Amdal Pembangunan Unit Incinerator untuk pemenuhan syarat administrasi pembangunan unit incinerator di lokasi TPA Sampah Regional.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Capaian kinerja persentase ketaatan penghasil, pengangkut, penimbun dan pengolah limbah B3 berizin di tahun 2021 Terjadi penurunan pada tahun sebelumnya 94,95% pada tahun 2021 sebesar 90%.

Jumlah Perusahaan/Rumah Sakit yang diawasi sebanyak 18 melalui kegiatan pengendalian dan pengawasan limbah B3. Untuk kegiatan pengumpul Limbah B3 dilakukan pengawasan pada 5 Perusahaan Pengumpul Limbah B3 yaitu PT. Nazar Kotabaru dan PT. Nazar Tanah Laut, PT. Mitra Abadi Salsabila (MAS), PT. Maju Asri Jaya dan CV. Barokah dengan tingkat ketaatan 80%.

Pengawasan pengelolaan Limbah B3 medis di tempat karantina dan pemusnah untuk tahun 2021 ini dilaksanakan pada 7

fasilitas pelayanan Kesehatan yaitu RSUD Hadji Boejasin, RSUD H. Badaruddin Kasim, RSUD Balangan, RSUD Pambalah Batung, RSUD Brigjend H. Hasan Basry, RSUD Datu Sanggul dan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dengan tingkat ketaatan 71,42%

Perusahaan penghasil Limbah B3 yang dilaksanakan pengawasan di tahun 2021 pada 4 perusahaan PT. Patria Maritim Perkasa, PT. Surya Sakti Darma Kencana, PT. Barito Galangan Nusantara dan PT. Restu Ibu.

Pengawasan kepada pemanfaat/pengolah Limbah B3 juga dilakukan kepada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, Incinerator Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 46. Daftar Perusahaan yang diawasi pengelolaan Limbah B3 secara langsung

No.	Lokasi	Perusahaan	Sektor	Kelompok	SIFAT	Katagori	Keterangan
1	Kab. Tanah Laut	PT. Nazar	Transporter/Pengumpul	Pengumpul	Aktif	Taat dengan Catatan	02 - 03 Maret 2021
2	Kab. Tanah Bumbu	CV. Barokah	Industri	Pengumpul	Aktif	Taat	29 - 31 Maret 2021
3	Kab. Kotabaru	PT. Mitra Abadi Salsabila (MAS)	Industri	Pengumpul	Aktif	Taat	03 - 05 Mei 2021
4	Kab. Kotabaru	PT. Nazar	Transporter/Pengumpul	Pengumpul	Akrif	Taat dengan Catatan	14 - 16 Juli 2021
5	Kab. Tabalong	PT. Maju Asri Jaya	Transporter/Pengumpul	Pengumpul	Aktif	Taat	15 - 17 November 2021
6	Kab. Kotabaru	PT. Nazar	Transporter/Pengumpul	Pengumpul	Akrif	Taat dengan Catatan	18 - 20 November 2021
7	Kab. Tanah Laut	RSUD Hadji Boejasin	Kesehatan/RS	Penghasil	Aktif	Taat dengan Catatan	09 - 10 Maret 2021
8	Kab. Tabalong	RSUD H. Badaruddin Kasim	Kesehatan/RS	Penghasil	Aktif	Taat dengan Catatan	23 - 25 Maret 2021
9	Kab. Balangan	RSUD Balangan	Kesehatan/RS	Penghasil	Aktif	Taat	15 - 17 Maret 2021
10	Kab. HSU	RSUD Pambalah Batung	Kesehatan/RS	Penghasil	Aktif	Taat	23 - 25 Februari 2021

11	Kab. Barito Kuala	PT. Patria Maritim Perkasa	Industri	Penghasil	Akrif	Taat dengan Catatan	22 - 23 November 2021
12	Kab. Tanah Laut	PT. Surya Sakti Darma Kencana	Industri	Penghasil	Aktif	Taat	01 - 02 Desember 2021
13	Kab. Barito Kuala	PT. Barito Galangan Nusantara	Industri	Penghasil	Aktif	Taat dengan Catatan	04 - 05 November 2021
14	Kab. Kotabaru	PT. Restu Ibu	Industri	Penghasil	Aktif	Taat	11 - 13 Oktober 2021
15	Kab. HSS	RSUD Brigjend H. Hasan Basry	Kesehatan/RS	Penghasil LB3 Infeksius	Aktif	Taat	02 - 03 Maret 2021
16	Kab. Tapin	RSUD Datu Sanggul	Kesehatan/RS	Penghasil LB3 Infeksius	Aktif	Taat	24 - 25 Juni 2021
17	Kab. Tanah Bumbu	RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor	Kesehatan/RS	Penghasil LB3 Infeksius	Aktif	Taat dengan Catatan	21 - 23 Oktober 2021
18	Kab. Kotabaru	PT. Indocement Tunggul Prakarsa	Semen	Pemanfaat	Aktif	Taat	16 - 18 Juni 2021
19	Kab. Barito Kuala	Incinerator Barito Kuala	Incinerator	Pemanfaat / Pengolah	Aktif	-	28 - 29 September 2021

Disamping itu dilakukan juga pembinaan secara langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dan HSU.

a. Upaya yang telah dilakukan

Melakukan sosialisasi kepada Penghasil Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat/Pengolah Limbah B3 dan Penghasil Limbah B3 Infeksius di Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat melakukan Pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan. Disamping itu juga dilakukan pengawasan dan pembinaan.

Melakukan pemantauan terhadap pelaporan limbah infeksius khususnya limbah Covid-19 melalui aplikasi Limedcov secara berkala (2 minggu sekali).

Melakukan pemantauan/pendampingan terhadap tindak lanjut dari temuan dilapangan pada saat pengawasan dan pembinaan untuk memastikan perusahaan melakukan pemenuhan kewajibannya/perbaikan.

Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota untuk secara terus menerus melakukan pengawasan kepada perusahaan Penghasil Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat/Pengolah Limbah B3 dan Penghasil Limbah B3 Infeksius di wilayah kerjanya.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Beberapa hambatan yang ditemukan pada kegiatan Pengelolaan Limbah B3 adalah :

- Dengan masih berlangsungnya pandemi covid-19 tentu sangat berpengaruh kepada banyaknya kegiatan verifikasi lapangan yang seharusnya sudah terjadwal menjadi terdunda dikarenakan meningkatnya kasus penularan covid-19 dilokasi perusahaan/RS yang akan dituju.
- Di tahun 2021, dengan terbitnya PP 22 Tahun 2021 banyak kegiatan usaha penghasil Limbah B3 yang belum mengintegrasikan rincian pengelolaan Limbah B3 kedalam persetujuan lingkungan.
- Pada beberapa kasus temuan lapangan yang mengharuskan dilakukan pemulihan lahan terkontaminasi masih diperlukan keterlibatan pihak KLHK yang memiliki kewenangan sebagai institusi yang boleh melaksanakan kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi, hal ini menjadi kendala dikarenakan pemulihan

lahan terkontaminasi wajib segera dilaksanakan akan tetap perlu waktu untuk berkoordinasi dengan KLHK yang terkadang memerlukan waktu yang tidak singkat.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dalam hal perbaikan kinerja diperlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang PP 22 Tahun 2021 dan Permen LHK no 6 tahun 2021 agar semua kegiatan usaha penghasil Limbah B3 memiliki dokumen lingkungan sebagai panduan dalam pengelolaan Limbah B3 sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketaatan Perusahaan/RS.
- Meningkatkan kapasitas bagi pelaku usaha dan Aparatur melalui bimbingan teknis maupun diklat pengelolaan Limbah B3.
- Akan diintensifkan kegiatan pembinaan pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan media perairan dikarenakan pada tahun 2021 ini ada beberapa perusahaan perbaikan kapal disepanjang sungai barito yang belum maksimal dalam pengelolaan Limbah B3 nya. Pengintensifkan kegiatan ini dilakukan untuk menunjang indeks kualitas air Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program penunjang kinerja adalah program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dengan kegiatan Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 . Dukungan tersebut pada tahun 2021 berupa tambahan anggaran untuk Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Unit Incinerator dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

3.1.3.3. SEKSI KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 47. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatnya partisipasi dunia usaha, dunia pendidikan, komunitas dan masyarakat dalam pelestarian LH	1. Persentase sekolah yang berbudaya lingkungan	32 sekolah	37 sekolah	100%
		2. Persentase dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan pelestarian LH	95 mitra	67 mitra	100%
		3. Persentase partisipasi komunitas yang melakukan kegiatan pelestarian lingkungan	n/a	11 komunitas	
		4. Persentase peningkatan pelestari lingkungan	n/a	17 Pelestari Lingkungan	
Rata-rata Capaian					100%

Terkait Kegiatan Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat untuk realisasi tahun 2021 sampai 100% dimana untuk sekolah Adiwiyata Provinsi untuk usulan dari Kabupaten/Kota sejumlah 49 sekolah saja dan tidak semua Kabupaten/Kota melakukan pengusulan ke Tingkat Provinsi dan hasil yang lolos penilaian pada tahun ini hanya 37 sekolah. Lain halnya dengan Adiwiyata ditingkat nasional dan mandiri dimana terdapat peningkatan jumlah sekolah adiwiyata yang lolos ditingkat nasional yaitu pada tahun ini didapatkan ada sebanyak 17 sekolah yang lolos menjadi sekolah adiwiyata nasional dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 7 sekolah saja yang lolos, sedangkan untuk yang tingkat mandiri tahun ini didapatkan 3 sekolah.

Untuk kegiatan Kalpataru dimana tahun ini didapatkan kemajuan dari segi pengusulan maupun kelulusan di tingkat nasional dimana untuk usulan didapatkan ada sebanyak 9 usulan dari Provinsi Kalimantan Selatan dan yang lolos terdapat 1 penerima penghargaan Kalpataru. Kegiatan lainnya yaitu Program Kampung Iklim dimana didapatkan sebanyak 75 desa/lokasi disemua kategori.

Untuk dunia usaha, instansi dan komunitas ada sebanyak 40 Mitra Proklam dari dunia usaha, 10 Mitra dari dunia usaha dalam kegiatan WCD 2021, 27 Instansi yang berpartisipasi dalam penilaian Perkantoran Ramah Lingkungan dan ada sebanyak 11 Komunitas Lingkungan yang berpartisipasi dalam kegiatan DLH dalam Program Sungai Martapura

Bungas dan kegiatan lainnya, sehingga didapatkan 95 Mitra dari dunia usaha, instansi dan komunitas.

Kegiatan lainnya seperti Sasangga Banua ada usulan dari unsur Pemda ada sebanyak 8 usulan, 6 usulan dari unsur kelompok dan 3 usulan dari unsur perorangan, dari masing-masing kategori dipilih 1 terbaik untuk diberikan penghargaan..

Untuk Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi SDA kegiatan berjalan dengan baik dengan hasil akhir realisasi 100% dengan melakukan kemitraan dengan 75 mitra yang dilakukan melalui kegiatan Bicara Ilmiah Terkait Isu Startegis Masalah Lingkungan Provinsi Kalimantan yang dilakukan melalui Zoom kepada 53 Komunitas Lingkungan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan & 18 Mitra yang dilakukan melalui kegiatan World Cleanup Day, 18 Instansi pemerintah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan kegiatan ini meningkatkan kepedulian publik mengenai permasalahan sampah di lingkungan, mengajak seluruh lapisan masyarakat dan instansi serta komunitas untuk berpartisipasi dan berkolaborasi di kegiatan WCD 2020, mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah dari rumah.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 48.Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat

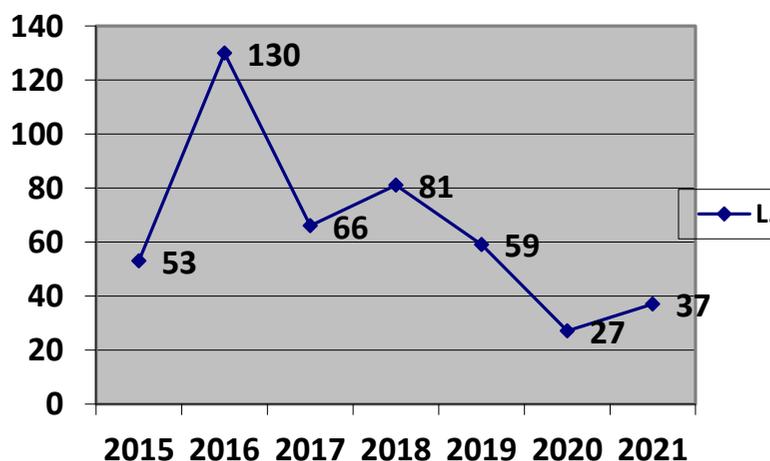
No	Kinerja Utama	Indikator	Realisasi		Target 2021		Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra
			2020	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya partisipasi dunia usaha, dunia pendidikan, komunitas dan masyarakat dalam pelestarian LH	1. Persentase sekolah yang berbudaya lingkungan	27 sekolah	32 sekolah	37 sekolah 67 mitra	100%	0,77%	
		2. Persentase dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan pelestarian LH	-	95 mitra	11 komunitas	100%	43,14%	
		3. Persentase partisipasi komunitas yang melakukan kegiatan pelestarian lingkungan		n/a	17 Pelestari Lingkungan	100%	11,11%	
		4. Persentase peningkatan pelestari lingkungan		n/a				

Perbedaan dengan realisasi pada tahun sebelumnya untuk kegiatan Adiwiyata dimana terjadi peningkatan persentase sekolah yang lolos dalam penilaian terutama pada adiwiyata tingkat provinsi dan nasional dimana pada tahun sebelumnya hanya didapatkan 27 sekolah adiwiyata provinsi, pada tahun ini didapatkan 37 sekolah. Sedangkan adiwiyata nasional tahun sebelumnya didapatkan ada 7 sekolah, untuk tahun ini didapatkan 17 sekolah.

Sedangkan untuk realisasi terkait kegiatan Kalpataru adalah dimana terutama untuk Kalpataru di 2019 didapatkan 1 penerima penghargaan kalpataru, sedangkan 2020 belum ada yang lolos dan kemudian 2021 diraih 1 penerima penghargaan kalpataru lagi.

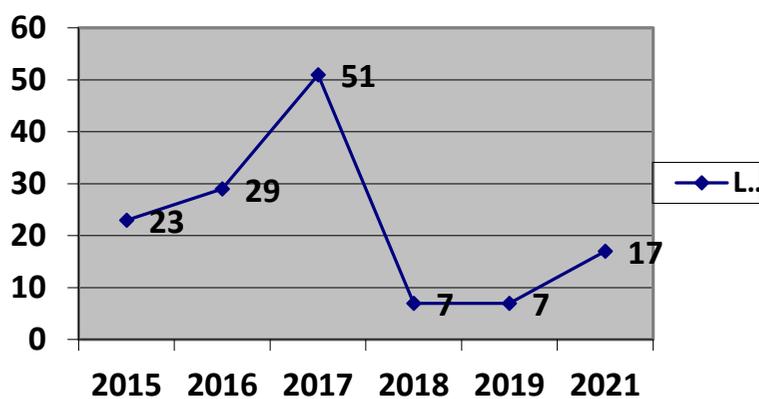
C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- Grafik Sekolah Adiwiyata Provinsi



Gambar 15 . Grafik Perolehan Adiwiyata Tingkat Provinsi
(Sumber: Dinas LH Prov. Kalsel, 2021)

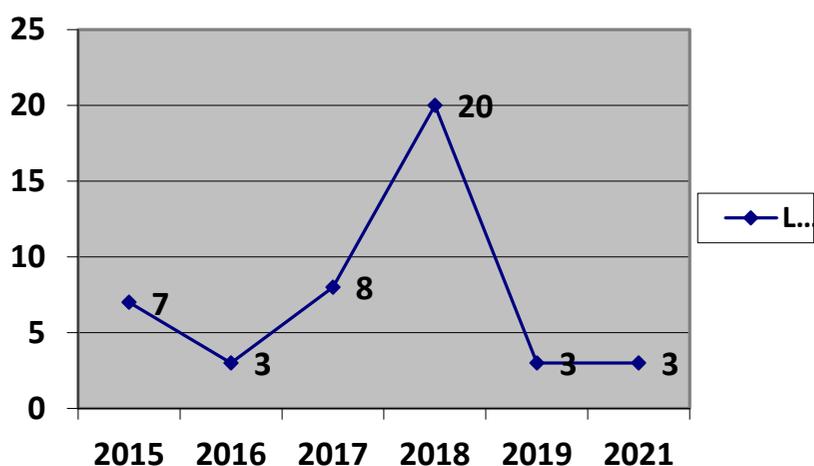
- Grafik Sekolah Adiwiyata Nasional



Gambar 16 . Grafik Perolehan Adiwiyata Tingkat Nasional
(Sumber: Dinas LH Prov. Kalsel, 2021)

Penurunan ini disebabkan Karena menurunnya jumlah sekolah yang dikirim oleh kab/kota. Beberapa kabupaten/kota tidak menganggarkan kegiatan sekolah adiwiyata ini.

- **Grafik Sekolah Adiwiyata Mandiri**



Gambar 17 . Grafik Perolehan Adiwiyata Tingkat Mandiri
(Sumber: Dinas LH Prov. Kalsel, 2021)

Sekolah adiwiyata mandiri diusulkan ketika sekolah tersebut sudah menjadi sekolah adiwiyata nasional selama (dua) tahun berturut-turut. Untuk tahun 2020 penilaian sekolah adiwiyata nasional dan mandiri ditiadakan oleh KLHK karena pandemi Covid19. Jumlah sekolah adiwiyata nasional di Tahun 2019 dan 2021 meningkat dari 7 sekolah menjadi 17 sekolah, namun nilai ini masih cukup rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2017 terbanyak yaitu sebanyak 51 sekolah. Sedangkan untuk sekolah adiwiyata mandiri tidak terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu stagnan sebanyak 3 sekolah.

Untuk kegiatan lainnya seperti Kalpataru di tahun 2020 dari sejumlah usulan yang disampaikan ke KLHK masih belum ada yang lolos, sedangkan pada tahun ini dari sejumlah usulan yang disampaikan didapatkan 1 usulan yang lolos. Kegiatan selanjutnya seperti Proklim dimana didapatkan peningkatan jumlah usulan maupun desa/lokasi yang ditetapkan sebagai Proklim dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 75 desa/lokasi. Kegiatan selanjutnya ada perkantoran ramah lingkungan dimana terdapat peningkatan jumlah unit kerja/kantor yang berpartisipasi dimana pada tahun 2020 ada sebanyak 16 kantor yang berpartisipasi di tahun ini ada sebanyak 27 kantor. Sasangga Banua yang diinisiasi pada tahun ini juga banyak diikuti oleh para partisipan mulai dari kategori pemerintah daerah, kelompok maupun perorangan

dimana masing-masing secara berturut-turut ada sebanyak 7, 6, dan 3 usulan pada masing-masing kategori.

a. Upaya yang telah dilakukan

- Pembinaan Adiwiyata
- Melaksanakan penilaian Adiwiyata
- Pembinaan Kalpataru
- Pembinaan Proklim
- Sosialisai Perkantoran Ramah Lingkungan
- Melaksanakan Penialian Perkantoran Ramah Lingkungan
- Sosialisasi kegiatan Apresiasi Sasangga Banua
- Melaksanakan Penialian Apresiasi Sasangga Banua
- Sosialisasi kegiatan terkait Gerakan Peduli Lingkungan

b. Hambatan dalam pencaian kinerja

Secara umum hambatan dalam pelaksanaan kinerja seksi kemitraan dan peran serta masyarakat adalah masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang belum bisa melakukan pengusulan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan pada seksi kemitraan dan peran serta masyarakat yang mana terkendala anggaran di daerah sehingga menyebabkan kurangnya jumlah usulan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kinerja perlu terus dilakukan sosialisasi, kampanye, advokasi dan pembinaan kepada kabupaten/kota serta masyarakat terhadap Gerakan Peduli Lingkungan. Hal ini untuk terus meningkatkan kinerja, selain itu diperlukan komunikasi lebih intensif untuk mengajak peran serta dunia usaha, dunia pendidikan, LSM dan komunitas lingkungan dalam mendukung dalam kesadaran kepedulian terhadap lingkungan hidup.

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis dari hasil kegiatan Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat adalah perlunya dukungan dari berbagai *stake holder* terkait seperti dari dunia usaha, instansi maupun komunitas. Untuk Adiwiyata perlu adanya dukungan dari pihak lain seperti Disdikbud Prov maupun Kab/Kota dan Kanwil Kemenag Prov maupun Kab/Kota. Kegiatan lainnyapun juga tidak luput dari dukungan dari lapisan elemen masyarakat untuk ketercapaian tujuan Dinas.

3.1.4 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 49. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya status mutu air sungai	Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter Indeks Kualitas Air	11.54%	11.54%	100%
2	Meningkatnya kualitas Udara menjadi kategori Baik dan Sangat Baik	Persentase kualitas udara dengan kategori baik dan sangat baik	100%	100%	100%
3	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Peningkatan luas tutupan lahan	20% (5000 ha) 28.200	100%	100%
Rata - Rata Capaian					100%

Indikator pertama yaitu persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter Indeks Kualitas Air ditargetkan 11,54% dan terealisasi 11,54% sehingga capaian kinerja sebesar 100%

Indikator kedua yaitu Persentase parameter kualitas udara hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu ditargetkan 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Indikator Ketiga yaitu Persentase laporan mengenai pemantauan lingkungan yang disusun dan diinformasikan ditargetkan 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 50. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya status mutu air sungai	1 Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter Indeks Kualitas Air	-	11.54%	11.54 % (6 data memenuhi)	100%	17.31%	66,67%

2	Meningkatnya kualitas Udara menjadi kategori Baik dan Sangat Baik	2	Persentase kualitas udara dengan kategori baik dan sangat baik	100%	100%	100% (13 Kab/Kota Kategori baik dan sangat baik)	100%	100%	100%
3	Meningkatnya luasan tutupan lahan	1	Peningkatan luas tutupan lahan	-	20% (5000 ha) 28.200	100%	100%	100%	100%

Indikator pertama yaitu Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter Indeks Kualitas Air pada tahun 2020 terealisasi 9,62 % dengan 5 data status memenuhi parameter Indeks Kualitas Air dari 52 titik pantau sungai dan pada tahun 2021 terealisasi 11,54% dengan 6 data status memenuhi parameter Indeks Kualitas Air dari 52 titik pantau sungai

Indikator kedua yaitu persentase kualitas udara dengan kategori baik dan sangat baik pada tahun 2020 terealisasi 100% dan pada tahun 2021 dengan kategori baik dan sangat baik terealisasi 100%.

Indikator ketiga yaitu Persentase peningkatan luas tutupan lahan pada tahun 2019 terealisasi 100%, pada tahun 2020 terealisasi 100% dan pada tahun 2021 terealisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Lokasi pemantauan kualitas air yang menggunakan Dana APBD adalah Sungai Martapura Kota Banjarmasin dan Kab.Banjar, Sungai Riam Kanan-Riam Kiwa Kab. Banjar, Saluran Irigasi di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, Sungai Negara di Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sungai Amandit di Kab.Hulu Sungai Selatan, Sungai Tapin di Kab.Tapin, Sungai Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sungai Balangan di Kabupaten Balangan, Sungai Tabalong di Kabupaten Tabalong, Sungai Tabanio di Kabupaten Tanah Laut, Sungai Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu, dan Sungai Cantung di Kabupaten Kotabaru. Sementara lokasi pemantauan kualitas air yang menggunakan dana APBN KLHK adalah Sungai Barito di Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin, dan Kab.Banjar, muara Sungai Martapura di Kota Banjarmasin, dan muara Sungai Negara di Kabupaten Barito Kuala.

Hasil pemantauan kualitas air berdasarkan hasil analisa ditemukan parameter yang melebihi Baku Mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI. Terdapat beberapa parameter kualitas air sungai yang dominan berkonsentrasi tinggi dan tidak memenuhi baku mutu yaitu parameter BOD, COD, Cl bebas, Fecal coli dan Total coliform. Beberapa parameter lain yang berfluktuatif tidak memenuhi baku mutu di beberapa titik pantau namun tidak di setiap tahap pemantauan seperti parameter pH, TSS, Besi (Fe), Mangan (Mn), Sianida (CN), Detergen, Fenol, dan Amoniak (NH₃-N) . Parameter logam berbahaya yaitu Air Raksa (Hg) terdeteksi telah berada di bawah bakumutu pada beberapa sungai sejak tahun 2018 sampai dengan pemantauan tahun 2020 namun karena kendala pengujian di laboratorium penguji maka tahun 2021 parameter Hg tidak bisa diuji. Status mutu air sungai di semua titik pantau berdasarkan perhitungan Metode Indeks Pencemaran berada dalam status memenuhi - cemar ringan - cemar sedang. Adapun hasil pemantauan kualitas air dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 51 : Data Hasil Pemantauan Tahun 2021

REKAPITULASI DATA HASIL PEMANTAUAN KUALITAS AIR SUNGAI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021

Tahap I (Bulan Maret-April)

Prov	Nama Sungai	Kode Titik Sampling	Nama Titik Sampling	Titik Koordinat	Waktu Sampling				Tanggal Analisis	Cuaca	Musim	PARAMETER UJI							Keterangan	
					Jam	Tgl	Bln	Thn				Debit	Suhu	pH	DHL	TDS	TSS	DO		BOD
												-	Dev 3	6-9	-	1000	40	6		2
K A L I M A N T A N S E L A T A N	Martapura	1.MTP 01	1.Tambak Anyar Ilir- Banjar	S:03°24'7.72" E:114°52'0.42"	10.00	18	3	2021	18/3/2021 - 29/3/2021	Cerah	-	m ³ /s	°c	-	µs/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	Satuan
		2.MTP02	2.Sei Rangas - Banjar	S:03°19' 8.0" E :114°46' 47.78"	10.15	18	3	2021	18/3/2021 - 29/3/2021	Cerah		37,5	28,0	8,1	127,0	65,0	140,0	4,7	36,7	BM Kelas I
		3.MTP03	3.Sei.Lulut - Banjar	S:03°18' 53,0" E :114°37' 52,5"	12.15	18	3	2021	18/3/2021 - 29/3/2021	Cerah		30,0	30,0	7,6	124,0	62,0	53,0	4,4	25,6	BM Kelas II
		4.MTP04	4. Basirih - Kota Banjarmasin	S:03°20' 47,0" E :114°33' 12"	10.45	19	3	2021	19/3/2021 - 29/3/2021	Cerah		45,0	32,0	7,4	137,0	69,0	129,0	2,7	27,4	BM Kelas III
	Irigasi	1.Ds. Sungai Landas - Banjar	S:03°27'1.82"; E:114°56'22.38"U	14.55	15	3	2021	15/3/2021 - 29/3/2021	Cerah	18,8		30,0	7,2	141,0	70,0	15,0	2,2	36,2	BM Kelas IV	
		2. Tengah	2.Intake PDAM - Kota Banjarbaru	S:03°25'44.95"; E:114°50'19.60 "U	16.20	15	3	2021	15/3/2021 - 29/3/2021	Berawan		5,6	30,0	7,4	116,0	57,0	5,0	3,2	2,9	
		3. Hilir	3.Ds. Sei. Tabuk Keramat - Banjar	S:03°18'51.30"; E:114°14'53.80 "U	09.40	16	3	2021	16/3/2021 - 29/3/2021	Cerah		3,2	29,0	7,1	111,0	55,0	9,0	4,2	2,7	
	Riam Kanan	1. Hilir	1.Ds. Pingaran Ulu-Banjar	S:03°23'26,20"; E:114°54'28.40"	11.00	19	3	2021	19/3/2021 - 29/3/2021	Cerah		3,2	30,0	5,8	77,0	39,0	21,0	1,1	12,2	
	Riam Kiwa	1. Hilir	1.Ds. Astambul Kota - Banjar	S:03°22'49,649"; E:114°53'53,117"	12.10	18	3	2021	18/3/2021 - 29/3/2021	Cerah		57,5	29,0	7,8	181,0	90,0	11,0	3,8	32,6	
	Negara	1. Hulu	1.Ds. Jarang Kuantan - HSU	S:02°26'40.1"; E:115°14'30.2"U	15.30	9	4	2021	9/4/2021 - 17/4/2021	Cerah		52,8	28,0	7,7	314,0	152,0	138,0	4,5	35,2	
		2. Hilir	2.Ds. Teluk Mesjid - HSU	S:02°28'55.61"; E:115°12'27.65"U	11.50	9	4	2021	9/4/2021 - 17/4/2021	Cerah		60,0	29,0	7,6	125,0	62,0	88,0	4,6	3,6	
		1. Hulu	1.Ds. Hakurung - HSS	S:02° 32' 49.90" E:115°08' 28.18"	12.45	1	4	2021	1/4/2021 - 15/4/2021	Cerah		24,0	28,0	8,3	177,0	63,0	114,0	5,0	13,8	
		2. Tengah	2.Ds. Tumbukan Banyu - HSS	S:02°37'50.1"; E:115°06'17.9"U	10.15	1	4	2021	1/4/2021 - 15/4/2021	Cerah		391,0	28,0	6,8	108,0	53,0	111,0	2,5	2,9	
		3. Hilir	3.Ds. Bajayau - HSS	S:02°40'58.58"; E:115°01'21.14 "U	11.10	2	4	2021	1/4/2021 - 15/4/2021	Cerah		385,0	29,0	6,4	83,3	42,0	8,0	0,5	12,9	
		1. Hulu	1.Ds. Margasari - Tapin	S:02°52'50.50"; E:114°56'7.50 "U	11.40	1	4	2021	1/4/2021 - 15/4/2021	Cerah		328,0	31,0	6,4	88,2	44,0	9,0	0,7	2,6	
	Tapin	2. Tengah	2.Ds. Sei. Puting - Tapin	S:02°56'16.53"; E:114°53'48.76"U	15.25	1	4	2021	1/4/2021 - 15/4/2021	Cerah		259,0	30,0	6,2	85,5	43,0	12,0	5,8	3,7	
		3. Hilir	3.Ds. Kaladan - Tapin	S:02°58'19.50"; E:114°49'22.5 "U	17.10	1	4	2021	1/4/2021 - 15/4/2021	Cerah		256,0	30,0	6,1	74,1	37,0	39,0	5,8	9,4	
		1. Hilir	1.Ds. Baringin A - Tapin	S:02°52'57.60"; E:114°56'36.29"	10.20	1	4	2021	1/4/2021 - 15/4/2021	Cerah		285,0	29,0	6,1	81,6	41,0	12,0	4,9	3,9	
	Barabai	1. Hulu	1.Ds. Bulayak - HST	S:02°38'32.2"; E:115°27'13.2 "U	09.20	6	4	2021	6/4/2021 - 15/4/2021	Cerah		713,0	27,0	5,9	156,0	78,0	7,0	5,0	14,6	
		2. Tengah	2.Ds. Pajukungan - HST	S:02°36'3.33"; E:115°21'16.39 "U	13.30	6	4	2021	6/4/2021 - 15/4/2021	Cerah		30,6	28,0	7,8	107,0	53,0	40,0	6,4	4,0	
		3. Tengah	3.Ds. Kasarangan - HST	S:02°37'14.8"; E:115°17'43.9"U	15.40	6	4	2021	6/4/2021 - 15/4/2021	Cerah		96,5	30,0	7,5	129,0	65,0	81,0	6,1	5,1	
		4. Hilir	4.Ds. Tabat - HST	S:02°37'30.62"; E:115°13'37.14 "U	17.15	6	4	2021	6/4/2021 - 15/4/2021	Cerah		95,7	30,0	7,7	142,0	71,0	59,0	3,5	15,0	
	Amandit	1. Hilir	1. Ds. Muning Baru - HSS	S:02°40'2"; E:115°8'42"	12.30	31	3	2021	31/3/2021 - 15/4/2021	Cerah		74,8	30,0	7,6	116,0	58,0	87,0	4,2	5,7	
	Tabunio	1. Hulu	1.Ds. Bajuin - Tanah Laut	S:03°46'36.8"; E:114°48'47.7 "U	11.20	16	3	2021	16/3/2021 - 29/3/2021	Cerah		39,0	27,0	6,3	56,4	28,0	5,0	0,6	19,9	
		2. Tengah	2.Ds. Angsau - Tanah Laut	S:03°46'53.2"; E:114°46'33.1 "U	09.10	17	3	2021	17/3/2021 - 29/3/2021	Cerah		32,0	30,0	7,3	119,0	59,0	131,0	4,0	41,7	
		3. Hilir	3.Ds. Panjaratan - Tanah Laut	S:03°46'36.5"; E:114°41'31.0 "U	16.35	16	3	2021	16/3/2021 - 29/3/2021	Cerah		30,0	30,0	7,5	108,0	54,0	136,0	5,9	20,3	
	Balangan	1. Hulu	1.Ds. Tabuan - Balangan	S:02°18'52.50"; E:115°40'36.70 "	17.10	6	4	2021	6/4/2021 - 15/4/2021	Cerah		16,0	30,0	7,5	98,0	50,0	76,0	4,0	43,1	
		2. Tengah	2.Ds. Kapul - Balangan	S:02°15'13.2"; E:115°39'44.6 "	15.35	6	4	2021	6/4/2021 - 15/4/2021	Cerah		45,5	28,0	7,5	135,0	68,0	63,0	5,3	4,2	
3. Hilir		3.Ds. Paringin Kota - Balangan	S:02°20'15,76"; E:115°27'32,63"	11.50	6	4	2021	6/4/2021 - 15/4/2021	Cerah	118,0	27,0	7,2	140,0	70,0	146,0	6,0	24,0			

Lanjutan . REKAPITULASI DATA HASIL PEMANTAUAN KUALITAS AIR SUNGAI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021

Tahap I (Bulan Maret-April)

Prov	Nama Sungai	Kode Titik Sampling	Nama Titik Sampling	PARAMETER UJI															Keterangan	
				COD	NO ₂ -N	NO ₃ -N	NH ₃ -N	Cl Bebas	Total Fosfat-P	Fenol	Minyak Lemak	Detergen	Fecal coli	Total Coliform	CN	H ₂ S	Fe	Mn		Cd
				10	0,06	10	0,1	0,03	0,2	0,002	1	0,2	100	1000	0,02	0,002	0,3	0,1		0,01
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	Satuan	
K A L I M A N T A N S E L A T A N	Martapura	1. MTP 01	1. Tambak Anyar Ilir- Banjar	66	<0,01	1,8	<0,1	0,03	<0,03	<0,001	<1	<0,2	892	4884	0,028	0,015	<0,3	<0,1	0,0033	BM Kelas I
		2. MTP02	2. Sei Rangas - Banjar	52	0,016	2,0	<0,1	0,07	<0,03	<0,001	<1	<0,2	199	3466	0,014	0,020	0,74	<0,1	0,0011	BM Kelas II
		3. MTP03	3. Sei. Lulut - Banjar	52	<0,01	1,6	<0,1	0,07	<0,03	<0,001	<1	<0,2	2747	3922	0,022	0,026	0,47	<0,1	<0,0005	BM Kelas III
		4. MTP04	4. Basirih - Kota Banjarmasin	71	<0,01	1,6	<0,1	0,08	<0,03	<0,001	<1	<0,2	724	1679	<0,005	<0,002	0,85	<0,1	0,0015	BM Kelas IV
	Irigasi	1. Hulu	1. Ds. Sungai Landas - Banjar	<10	<0,01	1,3	<0,1	<0,02	<0,03	0,060	<1	<0,2	2	140	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	0,0009	
		2. Tengah	2. Intake PDAM - Kota Banjarbaru	<10	<0,01	1,3	<0,1	0,02	<0,03	0,061	<1	<0,2	461	4839	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	0,0021	
		3. Hilir	3. Ds. Sei. Tabuk Keramat - Banjar	21,9	0,018	3,5	<0,1	0,03	<0,03	0,051	<1	<0,2	>2419,6	>24196	<0,005	0,015	0,83	<0,1	0,0006	
	Riam Kanan	1. Hilir	1. Ds. Pingaran Ulu- Banjar	61	0,014	1,8	<0,1	0,05	<0,03	<0,001	<1	<0,2	688	4185	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	<0,0005	
	Riam Kiwa	1. Hilir	1. Ds. Astambul Kota - Banjar	57	<0,01	1,5	<0,1	0,05	<0,03	0,001	<1	<0,2	2452	4480	0,023	0,02	<0,3	<0,1	<0,0005	
	Negara	1. Hulu	1. Ds. Jarang Kuantan - HSU	<10	<0,01	1,1	<0,1	0,13	<0,03	0,001	<1	<0,2	546	>24196	<0,005	<0,002	0,51	<0,1	0,0005	
		2. Hilir	2. Ds. Teluk Masjid - HSU	23	<0,01	1,2	0,17	0,17	<0,03	<0,001	<1	<0,2	2359	5172	<0,005	<0,002	0,64	<0,1	0,0075	
		1. Hulu	1. Ds. Hakurung - HSS	<10	<0,01	2	<0,1	<0,02	<0,03	<0,001	<1	<0,2	1989	>24196	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	<0,0005	
		2. Tengah	2. Ds. Tumbukan Banyu - HSS	25	<0,01	1,1	<0,1	0,02	<0,03	0,001	<1	0,9	420	7701	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	0,001	
		3. Hilir	3. Ds. Bajayau - HSS	<10	<0,01	1,4	<0,1	0,03	<0,03	0,001	<1	<0,2	279	420	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	<0,0005	
		1. Hulu	1. Ds. Margasari - Tapin	<10	<0,01	0,9	<0,1	0,09	<0,03	0,001	<1	<0,2	292	9208	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	<0,0005	
		2. Tengah	2. Ds. Sei. Puting - Tapin	20	<0,01	0,5	<0,1	0,23	<0,03	<0,001	<1	<0,2	379	14136	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	<0,0005	
	3. Hilir	3. Ds. Kaladan - Tapin	<10	<0,01	0,6	<0,1	0,14	<0,03	<0,001	<1	<0,2	187	3255	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	0,003		
	Tapin	1. Hilir	1. Ds. Baringin A - Tapin	24	<0,01	1,2	<0,1	0,1	<0,03	0,001	<1	<0,2	246	6488	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	0,008	
	Barabai	1. Hulu	1. Ds. Bulayak - HST	<10	<0,01	1	<0,1	0,02	<0,03	0,001	<1	<0,2	14136	>24196	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	0,001	
		2. Tengah	2. Ds. Pajukungan - HST	14	<0,01	1,2	<0,1	0,06	<0,03	<0,001	<1	<0,2	4611	>24196	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	0,0012	
		3. Tengah	3. Ds. Kasarangan - HST	36	0,011	1,4	0,34	0,09	<0,03	0,001	<1	<0,2	3076	17329	<0,005	<0,002	0,40	<0,1	<0,0005	
		4. Hilir	4. Ds. Tabat - HST	11	0,013	1,3	<0,1	0,10	<0,03	<0,001	<1	<0,2	2481	17329	<0,005	<0,002	0,32	<0,1	<0,0005	
	Amandit	1. Hilir	1. Ds. Muning Baru - HSS	39	<0,01	1,1	<0,1	0,04	<0,03	<0,001	<1	0,9	279	5475	<0,005	<0,002	0,36	<0,1	<0,0005	
	Tabunio	1. Hulu	1. Ds. Bajuin - Tanah Laut	75	0,035	0,035	<0,1	0,07	<0,03	0,003	<1	<0,2	1046	>24196	<0,005	0,020	0,66	0,15	0,0047	
2. Tengah		2. Ds. Angsau - Tanah Laut	40	0,026	0,026	<0,1	<0,02	<0,03	0,002	<1	<0,2	1733	>24196	<0,005	0,035	0,37	<0,1	0,0035		
3. Hilir		3. Ds. Panjaratan - Tanah Laut	78	0,017	0,017	<0,1	0,05	<0,03	0,004	<1	<0,2	770	>24196	<0,005	0,021	0,54	0,12	<0,0005		
Balangan	1. Hulu	1. Ds. Tabuan - Balangan	13	0,01	1,2	<0,1	0,07	<0,03	<0,001	<1	<0,2	1169	19863	<0,005	<0,002	0,32	<0,1	<0,0005		
	2. Tengah	2. Ds. Kapul - Balangan	48	<0,01	1,3	<0,1	0,06	<0,03	0,001	<1	<0,2	2755	>24196	<0,005	<0,002	0,66	<0,1	<0,0005		
	3. Hilir	3. Ds. Paringin Kota - Balangan	14	0,014	1,4	<0,1	0,05	<0,03	<0,001	<1	<0,2	5794	>24196	<0,005	<0,002	0,60	<0,1	<0,0005		

Lanjutan . REKAPITULASI DATA HASIL PEMANTAUAN KUALITAS AIR SUNGAI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021

Tahap I (Bulan Maret-April)

Prov	Nama Sungai	Kode Titik Sampling	Nama Titik Sampling	PARAMETER UJI															Keterangan	
				COD	NO ₂ -N	NO ₃ -N	NH ₃ -N	Cl Bebas	Total Fosfat-P	Fenol	Minyak Lemak	Detergen	Fecal coli	Total Coliform	CN	H ₂ S	Fe	Mn		Cd
KALIMANTAN SELATAN	Tabalong	1. Hulu	1.Ds. Suput - Tabalong	<10	<0,01	1,6	<0,1	0,12	<0,03	<0,001	<1	<0,2	789	10462	<0,005	<0,002	0,49	<0,1	0,0037	BM Kelas I
		2. Tengah	2.Ds. Pamarangan Kiwa - Tabalong	<10	<0,01	0,7	<0,1	0,11	<0,03	0,001	<1	<0,2	1046	10462	<0,005	<0,002	0,62	<0,1	<0,0005	BM Kelas II
		3. Hilir	3.Ds. Halangan - Tabalong	<10	<0,01	0,9	<0,1	0,08	<0,03	0,001	<1	<0,2	285	6131	<0,005	<0,002	0,55	<0,1	<0,0005	BM Kelas III
	Batulicin	1. Hulu	1.Ds. Sela Selilau - Tanah Bumbu	29	<0,01	2	<0,1	0,02	<0,03	0,001	<1	<0,2	769	47073	<0,005	0,016	0,44	<0,1	0,0008	BM Kelas IV
		2. Tengah	2.Ds. Karang Bintang - Tanah Bumbu	32	<0,01	2,5	<0,1	0,02	<0,03	<0,001	<1	<0,2	3483	30663	<0,005	0,01	0,54	<0,1	0,0010	-
		3. Hilir	3.Ds. Maju Makmur - Tanah Bumbu	43	<0,01	0,4	<0,1	0,02	<0,03	<0,001	<1	<0,2	809	37293	<0,005	0,017	0,52	<0,1	0,0031	-
	Cantung	1. Hulu	1.Ds. Banua Lawas - Kotabaru	39	<0,01	2,1	<0,1	<0,02	<0,03	<0,001	<1	<0,2	263	7600	<0,005	0,015	<0,3	<0,1	0,0019	-
		2. Tengah	2.Ds. Sungai Kupang - Kotabaru	20	<0,01	1,7	<0,1	<0,02	<0,03	0,001	<1	<0,2	100	3393	<0,005	0,016	0,51	<0,1	0,0045	-
		3. Hilir	3.Ds. Karang Payau - Kotabaru	23	<0,01	2,2	<0,1	<0,02	<0,03	0,002	<1	<0,2	246	6079	<0,005	0,018	0,35	<0,1	<0,0005	-

Prov	Nama Sungai	Kode Titik Sampling	Nama Titik Sampling	Titik Koordinat	Waktu Sampling				Tanggal Analisis	Cuaca	Musim	PARAMETER UJI								Keterangan
					Debit	Suhu	pH	DHL				TDS	TSS	DO	BOD	Jam	Tgl	Bln	Thn	
KALIMANTAN SELATAN	Tabalong	1. Hulu	1.Ds. Suput - Tabalong	S:02°02'34.6"; E:115°29'09.0"	11.20	9	4	2021	9/4/2021 - 17/4/2021	Cerah	Hujan	28	28	7,6	125	63	111	5,1	4,1	BM Kelas I
		2. Tengah	2.Ds. Pamarangan Kiwa - Tabalong	S:02°11'32.75"; E:115°21'22.05"	14.50	9	4	2021	9/4/2021 - 17/4/2021	Cerah		15	29	7,5	111	55	116	5,9	4,9	BM Kelas II
		3. Hilir	3.Ds. Halangan - Tabalong	S:02°19'44.77"; E:115°18'44.23"	17.10	9	4	2021	9/4/2021 - 17/4/2021	Cerah		20	29	7,6	98	49	44	4,7	3,7	BM Kelas III
	Batulicin	1. Hulu	1.Ds. Sela Selilau - Tanah Bumbu	S:03°21'41.01"; E:115°52'16.92"	11.10	10	3	2021	10/3/2021 - 29/3/2021	Cerah		36	27	7,7	235	119	138	3,7	17,1	BM Kelas IV
		2. Tengah	2.Ds. Karang Bintang - Tanah Bumbu	S:03°23'45.10"; E:115°54'57.30"	13.55	10	3	2021	10/3/2021 - 29/3/2021	Cerah		31,2	26	8,0	190	91	147	3,7	19,0	-
		3. Hilir	3.Ds. Maju Makmur - Tanah Bumbu	S:03°25'47.50"; E:115°57'53.10"	16.40	10	3	2021	10/3/2021 - 29/3/2021	Berawan		24	28	8,2	120	59	49	4,0	18,2	-
	Cantung	1. Hulu	1.Ds. Banua Lawas - Kotabaru	S:03°02'30.6"; E:115°58'18.61"	13.40	10	3	2021	10/3/2021 - 29/3/2021	Berawan		58,8	27	8,0	238	115	103	4,6	18,0	-
		2. Tengah	2.Ds. Sungai Kupang - Kotabaru	S:03°02'38.74"; E:115°58'59.32"	14.50	10	3	2021	10/3/2021 - 29/3/2021	Berawan		27	27	8,2	249	124	47	4,5	11,5	-
		3. Hilir	3.Ds. Karang Payau - Kotabaru	S:03°02'32.84"; E:116°0'9.54"	16.30	10	3	2021	10/3/2021 - 29/3/2021	Berawan		21,6	27	8,1	226	118	38	4,5	13,1	-

REKAPITULASI DATA HASIL PEMANTAUAN KUALITAS AIR SUNGAI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021

Tahap II (Bulan September-Oktober)

Prov	Nama Sungai	Kode Titik Sampling	Nama Titik Sampling	Titik Koordinat	Waktu Sampling				Tanggal Analisis	Cuaca	Musim	PARAMETER UJI								Keterangan
					Jam	Tgl	Bln	Thn				Debit	Suhu	pH	DHL	TDS	TSS	DO	BOD	
												m ³ /s	°C	-	µs/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
K A L I M A N T A N S E L A T A N	Martapura	1.MTP 01	1.Ds. Tambak Anyar Ilir- Banjar	S:03°24'7.72" E:114°52'0.42"	14.40	27	9	2021	27/9/2021 - 04/10/2021	Cerah	Kemarau	15,0	29	6,5	137	68	20	3,7	15,3	-
		2.MTP02	2.Ds. Sei Rangas Tengah - Banjar	S:03°19' 8.0" E :114°46' 47.78"	10.15	27	9	2021	27/9/2021 - 04/10/2021	Cerah		50,4	29	6,4	184	92	139	3,4	2,1	
		3.MTP03	3.Kel. Sei.Lulut - Banjar	S:03°18' 53,0" E :114°37' 52,5"	10.50	28	9	2021	28/9/2021 - 04/10/2021	Cerah		45,0	30	6,7	89	46	9	2,8	1,6	
		4.MTP04	4.Kel. Basirih - Kota Banjarmasin	S:03°20' 47,0" E :114°33' 12"	15.40	28	9	2021	28/9/2021 - 04/10/2021	Cerah		22,0	30	6,4	131	66	62	2,3	1,8	
	Irigasi	1. Hulu	1.Ds. Sungai Landas - Banjar	S:03°27'1.82"; E:114°56'22.38"	14.35	11	10	2021	11/10/2021 - 22/10/2021	Cerah		5,6	29	8,1	141	71	3	4,2	2,7	
		2. Tengah	2.Intake PDAM - Kota Banjarbaru	S:03°25'44.95"; E:114°50'19.60 "	16.10	11	10	2021	11/10/2021 - 22/10/2021	Cerah		4,2	30	8,1	145	72	<2,5	6,4	16,2	
		3. Hilir	3.Ds. Sei. Tabuk Keramat - Banjar	S:03°18'51.30"; E:114°14'53.80 "	13.50	12	10	2021	12/10/2021 - 22/10/2021	Cerah		1,6	30	8,2	214	109	10	3,5	12,6	
	Riam Kanan	1. Hilir	1.Ds. Pingaran Ulu-Banjar	S:03°23'26,20"; E:114°54'28.40"	15.55	28	9	2021	28/9/2021 - 04/10/2021	Cerah		17,3	28	6,7	131	66	29	3,8	3,7	
	Riam Kiwa	1. Hilir	1.Ds. Astambul Kota - Banjar	S:03°22'49,649"; E:114°53'53,117"	11.50	28	9	2021	28/9/2021 - 04/10/2021	Cerah		13,2	27	7,5	134	66	33	4,5	3,4	
	Negara	1. Hulu	1.Ds. Jarang Kuantan - HSU	S:02°26'40.1"; E:115°14'30.2"	15.30	24	9	2021	24/9/2021 - 04/10/2021	Cerah		20,0	29	6,7	126	62	68	5,0	6,8	
		2. Hilir	2.Ds. Teluk Mesjid - HSU	S:02°28'55.61"; E:115°12'27.65"	10.10	24	9	2021	24/9/2021 - 04/10/2021	Cerah		20,0	29	6,8	127	63	58	4,5	6,4	
		1. Hulu	1.Ds. Hakurung - HSS	S:02° 32' 49.90" E:115°08' 28.18"	14.35	30	9	2021	30/9/2021 - 11/10/2021	Cerah		243,0	28	6,6	109	71	53	4,3	8,4	
		2. Tengah	2.Ds. Tumbukan Banyu - HSS	S:02°37'50.1"; E:115°06'17.9"	12.10	30	9	2021	30/9/2021 - 11/10/2021	Cerah		462,0	29	6,6	99	44	45	2,6	10,3	
		3. Hilir	3.Ds. Bajayau - HSS	S:02°40'58.58"; E:115°01'21.14 "	16.05	30	9	2021	30/9/2021 - 11/10/2021	Cerah		302,0	29	6,5	89	58	19	2,4	16,2	
		1. Hulu	1.Ds. Margasari - Tapin	S:02°52'50.50"; E:114°56'7.50 "	11.20	30	9	2021	30/9/2021 - 11/10/2021	Cerah		264,0	29	7,7	123	62	10	4,2	9,0	
		2. Tengah	2.Ds. Sei. Puting - Tapin	S:02°56'16.53"; E:114°53'48.76"	14.30	30	9	2021	30/9/2021 - 11/10/2021	Cerah		154,5	28	8,2	155	77	7	4,0	2,9	
	3. Hilir	3.Ds. Kaladan - Tapin	S:02°58'19.50"; E:114°49'22.5 "	16.35	30	9	2021	30/9/2021 - 11/10/2021	Cerah	1560,0		27	8,8	49	25	65	4,2	3,2		
	Tapin	1. Hilir	1.Ds. Baringin A - Tapin	S:02°52'57.60"; E:114°56'36.29"	10.30	30	9	2021	30/9/2021 - 11/10/2021	Cerah		79,0	29	6,7	119	60	8	4,0	3,0	
	Barabai	1. Hulu	1.Ds. Bulayak - HST	S:02°38'32.2"; E:115°27'13.2 "	11.20	21	9	2021	21/9/2021 - 30/9/2021	Cerah		13,4	27	8,0	120	60	14	7,1	22,4	
		2. Tengah	2.Ds. Pajukungan - HST	S:02°36'3.33"; E:115°21'16.39 "	13.50	21	9	2021	21/9/2021 - 30/9/2021	Cerah		15,7	26	7,8	141	71	78	5,6	32,0	
		3. Tengah	3.Ds. Kasarangan - HST	S:02°37'14.8"; E:115°17'43.9"	15.40	21	9	2021	21/9/2021 - 30/9/2021	Cerah		17,1	28	8,2	138	69	80	6,6	29,7	
		4. Hilir	4.Ds. Tabat - HST	S:02°37'30.62"; E:115°13'37.14 "	17.15	21	9	2021	21/9/2021 - 30/9/2021	Cerah		9,7	28	7,5	141	71	38	4,9	23,7	
	Amandit	1. Hilir	1. Ds. Muning Baru - HSS	S:02°40'2"; E:115°8'42"	10.45	30	9	2021	30/9/2021 - 11/10/2021	Cerah		36,0	26	6,4	112	56	17	2,2	13,8	
	Tabunio	1. Hulu	1.Ds. Bajuin - Tanah Laut	S:03°46'36.8"; E:114°48'47.7 "	11.40	12	9	2021	12/9/2021 - 22/9/2021	Cerah		32,4	30	8,2	167	83	575	5,1	9,9	
		2. Tengah	2.Ds. Angsau - Tanah Laut	S:03°46'53.2"; E:114°46'33.1 "	11.40	13	9	2021	13/9/2021 - 22/9/2021	Cerah		24,0	30	8,8	176	88	666	4,8	18,9	
		3. Hilir	3.Ds. Panjaratan - Tanah Laut	S:03°46'36.5"; E:114°41'31.0 "	16.55	12	9	2021	12/9/2021 - 22/9/2021	Cerah		16,0	29	8,3	243	121	121	5,4	4,4	
	Balangan	1. Hulu	1.Ds. Tabuan - Balangan	S:02°18'52.50"; E:115°40'36.70 "	17.00	21	9	2021	21/9/2021 - 30/9/2021	Cerah		1,4	27	8,0	168,4	84	<2,5	8,0	18,3	
		2. Tengah	2.Ds. Kapul - Balangan	S:02°15'13.2"; E:115°39'44.6 "	15.50	21	9	2021	21/9/2021 - 30/9/2021	Cerah		4,9	27	8,0	220	203	4	6,8	24,4	
		3. Hilir	3.Ds. Paringin Kota - Balangan	S:02°20'15,76"; E:115°27'32,63"	11.40	21	9	2021	21/9/2021 - 30/9/2021	Cerah		22,0	28	8,0	160	80	22	6,3	19,4	

Lanjutan. REKAPITULASI DATA HASIL PEMANTAUAN KUALITAS AIR SUNGAI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021

Tahap II (Bulan September-Oktober)

Prov	Nama Sungai	Kode Titik Sampling	Nama Titik Sampling	PARAMETER UJI													Keterangan		
				COD	NO ₂ -N	NO ₃ -N	NH ₃ -N	Cl Bebas	Total Fosfat-P	Minyak Lemak	Detergen	Fecal coli	Total Coliform	CN	H ₂ S	Fe		Mn	Cd
				10	0,06	10	0,1	0,03	0,2	1	0,2	100	1000	0,02	0,002	0,3	0,1	0,01	BM Kelas I
				25	0,06	10	0,2	0,03	0,2	1	0,2	1000	5000	0,02	0,002	-	-	0,01	BM Kelas II
				40	0,06	20	0,5	0,03	1	1	0,2	2000	10000	0,02	0,002	-	-	0,01	BM Kelas III
				80	-	20	-	-	-	10	-	2000	10000	-	-	-	-	0,01	BM Kelas IV
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	MPN/100m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	Satuan
K A L I M A N T A N S E L A T A N	Martapura	1.MTP 01	1.Ds. Tambak Anyar Ilir- Banjar	34	0,013	<0,4	0,24	0,26	<0,03	<1	<0,2	3123	9606	0,006	0,04	<0,3	<0,1	<0,0005	
		2.MTP02	2.Ds. Sei Rangas Tengah - Banjar	<10	0,018	<0,4	<0,1	0,12	<0,03	<1	<0,2	2577	8704	0,009	0,051	<0,3	<0,1	0,0006	
		3.MTP03	3.Kel. Sei.Lulut - Banjar	<10	0,015	<0,4	0,15	0,07	<0,03	<1	<0,2	1723	6167	0,009	0,050	0,43	<0,1	<0,0005	
		4.MTP04	4.Kel. Basirih - Kota Banjarmasin	<10	0,019	<0,4	0,11	0,1	<0,03	<1	<0,2	1852	6405	0,009	0,051	<0,3	<0,1	<0,0005	
	Irigasi	1. Hulu	1.Ds. Sungai Landas - Banjar	<10	0,010	<0,4	<0,1	0,07	0,03	<1	<0,2	298	6131	0,005	0,015	<0,3	<0,1	<0,0005	
		2. Tengah	2.Intake PDAM - Kota Banjarbaru	23	0,010	<0,4	<0,1	0,04	0,03	<1	<0,2	1807	5938	0,005	0,015	<0,3	<0,1	0,002	
		3. Hilir	3.Ds. Sei. Tabuk Keramat - Banjar	25	0,021	<0,4	<0,1	0,08	0,03	<1	<0,2	3255	24196	0,005	0,015	<0,3	<0,1	0,003	
	Riam Kanan	1. Hilir	1.Ds. Pingaran Ulu-Banjar	<10	0,011	0,4	0,10	0,36	<0,03	<1	<0,2	3873	8297	0,006	0,046	<0,3	0,11	<0,0005	
	Riam Kiwa	1. Hilir	1.Ds. Astambul Kota - Banjar	<10	<0,01	0,4	0,11	0,14	<0,03	<1	<0,2	2789	7556	0,006	0,046	<0,3	<0,1	<0,0005	
	Negara	1. Hulu	1.Ds. Jarang Kuantan - HSU	13	<0,01	<0,4	<0,1	0,18	<0,03	<1	<0,2	3968	8704	0,007	<0,002	<0,3	<0,1	<0,0005	
		2. Hilir	2.Ds. Teluk Masjid - HSU	13	<0,01	<0,4	<0,1	0,18	<0,03	<1	<0,2	5493	>24196	0,007	<0,002	0,50	<0,1	<0,0005	
		1. Hulu	1.Ds. Hakurung - HSS	15	0,016	<0,4	<0,1	<0,02	<0,03	<1	<0,2	2140	19863	<0,005	0,028	0,37	<0,1	0,004	
		2. Tengah	2.Ds. Tumbukan Banyu - HSS	19	0,042	<0,4	<0,1	0,02	<0,03	<1	<0,2	1592	9606	<0,005	0,03	<0,3	<0,1	0,001	
		3. Hilir	3.Ds. Bajayau - HSS	27	<0,01	<0,4	<0,1	<0,02	<0,03	<1	<0,2	1205	5717	<0,005	0,027	<0,3	<0,1	0,003	
		1. Hulu	1.Ds. Margasari - Tapin	17	<0,01	<0,4	<0,1	0,06	<0,03	<1	<0,2	805	4225	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	<0,0005	
	Tapin	2. Tengah	2.Ds. Sei. Puting - Tapin	<10	<0,01	<0,4	<0,1	0,02	<0,03	<1	<0,2	279	4083	<0,005	<0,002	<0,3	0,15	<0,0005	
		3. Hilir	3.Ds. Kaladan - Tapin	10	0,011	<0,4	<0,1	0,03	<0,03	<1	<0,2	937	3649	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	<0,0005	
		1. Hilir	1.Ds. Baringin A - Tapin	<10	0,013	<0,4	<0,1	0,06	<0,03	<1	<0,2	707	4520	<0,005	<0,002	<0,3	0,19	<0,0005	
	Barabai	1. Hulu	1.Ds. Bulayak - HST	40	<0,01	<0,4	<0,1	0,10	<0,03	<1	<0,2	12033	>24196	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	0,003	
		2. Tengah	2.Ds. Pajukungan - HST	57	<0,01	<0,4	<0,1	0,08	<0,03	<1	<0,2	4196	>24196	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	<0,0005	
		3. Tengah	3.Ds. Kasarangan - HST	60	<0,01	<0,4	<0,1	0,08	<0,03	<1	<0,2	3441	9804	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	<0,0005	
		4. Hilir	4.Ds. Tabat - HST	42	<0,01	<0,4	<0,1	0,08	<0,03	<1	<0,2	3436	10462	<0,005	<0,002	0,32	<0,1	<0,0005	
	Amandit	1. Hilir	1. Ds. Muning Baru - HSS	28	0,016	<0,4	<0,1	0,05	<0,03	<1	0,9	1731	9606	<0,005	0,03	0,85	0,26	0,002	
	Tabunio	1. Hulu	1.Ds. Bajuin - Tanah Laut	13	0,011	<0,4	<0,1	0,20	<0,03	<1	<0,2	1336	9606	<0,005	0,01	0,45	<0,1	0,003	
2. Tengah		2.Ds. Angsau - Tanah Laut	25	<0,01	<0,4	<0,1	0,03	<0,03	<1	0,6	2359	>24196	<0,005	0,01	0,57	<0,1	<0,0005		
3. Hilir		3.Ds. Panjaratan - Tanah Laut	25	<0,01	<0,4	<0,1	0,12	<0,03	<1	<0,2	3123	>24196	<0,005	0,01	<0,3	<0,1	0,002		
Balangan	1. Hulu	1.Ds. Tabuan - Balangan	37	<0,01	<0,4	<0,1	0,05	<0,03	<1	<0,2	6015	>24196	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	<0,0005		
	2. Tengah	2.Ds. Kapul - Balangan	47	<0,01	<0,4	<0,1	0,06	<0,03	<1	<0,2	2778	17329	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	<0,0005		
	3. Hilir	3.Ds. Paringin Kota - Balangan	38	<0,01	<0,4	<0,1	0,08	<0,03	<1	<0,2	1852	15531	<0,005	<0,002	<0,3	<0,1	<0,0005		

Lanjutan. REKAPITULASI DATA HASIL PEMANTAUAN KUALITAS AIR SUNGAI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021

Tahap II (Bulan September-Oktober)

Prov	Nama Sungai	Kode Titik Sampling	Nama Titik Sampling	PARAMETER UJI													Keterangan		
				COD	NO ₂ -N	NO ₃ -N	NH ₃ -N	Cl Bebas	Total Fosfat-P	Minyak Lemak	Detergen	Fecal coli	Total Coliform	CN	H ₂ S	Fe		Mn	Cd
K A L I M A N T A N	Tabalong	1. Hulu	1.Ds. Suput - Tabalong	12	<0,01	<0,4	<0,1	0,08	<0,03	<1	<0,2	908	5748	0,005	<0,002	<0,3	<0,1	<0,0005	-
		2. Tengah	2.Ds. Pamarangan Kiwa - Tabalong	20,00	<0,01	<0,4	<0,1	0,12	<0,03	<1	<0,2	1529	6893	0,006	<0,002	0,47	<0,1	0,001	
		3. Hilir	3.Ds. Halangan - Tabalong	18	<0,01	<0,4	<0,1	0,19	<0,03	<1	<0,2	1266	7215	0,006	<0,002	0,58	<0,1	<0,0005	
	Batulicin	1. Hulu	1.Ds. Sela Selilau - Tanah Bumbu	<10	<0,01	<0,4	<0,1	0,02	<0,03	<1	<0,2	1981	17329	0,01	0,063	<0,3	<0,1	<0,0005	
		2. Tengah	2.Ds. Karang Bintang - Tanah Bumbu	<10	<0,01	<0,4	<0,1	<0,02	<0,03	<1	<0,2	798	4731	0,01	0,063	<0,3	<0,1	<0,0005	
		3. Hilir	3.Ds. Maju Makmur - Tanah Bumbu	<10	0,011	<0,4	<0,1	<0,02	<0,03	<1	<0,2	2071	10462	0,01	0,064	<0,3	<0,1	<0,0005	
	Cantung	1. Hulu	1.Ds. Banua Lawas - Kotabaru	<10	0,014	<0,4	<0,1	<0,02	<0,03	<1	<0,2	2613	8297	<0,005	0,033	<0,3	<0,1	<0,0005	
		2. Tengah	2.Ds. Sungai Kupang - Kotabaru	<10	0,014	<0,4	<0,1	<0,02	<0,03	<1	<0,2	1103	5717	<0,005	0,032	<0,3	<0,1	<0,0005	
		3. Hilir	3.Ds. Karang Payau - Kotabaru	<10	<0,01	<0,4	<0,1	0,02	<0,03	<1	<0,2	5717	19863	<0,005	0,033	<0,3	<0,1	0,0020	

Prov	Nama Sungai	Kode Titik Sampling	Nama Titik Sampling	Titik Koordinat	Waktu Sampling				Tanggal Analisis	Cuaca	Musim	PARAMETER UJI							Keterangan	
					Jam	Tgl	Bln	Thn				Debit	Suhu	pH	DHL	TDS	TSS	DO		BOD
K A L I M A N T A N	Tabalong	1. Hulu	1.Ds. Suput - Tabalong	S:02°02'34.6"; E:115°29'09.0"	16.50	24	9	2021	24/9/2021 - 4/10/2021	Cerah	Kemarau	-	Dev 3	6-9	-	1000	40	6	2	BM Kelas I
		2. Tengah	2.Ds. Pamarangan Kiwa - Tabalong	S:02°11'32.75"; E:115°21'22.05"	14.15	24	9	2021	24/9/2021 - 4/10/2021	Cerah		-	Dev 3	6-9	-	1000	50	4	3	BM Kelas II
		3. Hilir	3.Ds. Halangan - Tabalong	S:02°19'44.77"; E:115°18'44.23"	10.20	24	9	2021	24/9/2021 - 4/10/2021	Cerah		-	Dev 3	6-9	-	1000	100	3	6	BM Kelas III
	Batulicin	1. Hulu	1.Ds. Sela Selilau - Tanah Bumbu	S:03°21'41.01"; E:115°52'16.92"	15.20	5	10	2021	5/10/2021 - 12/10/2021	Cerah		m ³ /s	°c		µs/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	Satuan
		2. Tengah	2.Ds. Karang Bintang - Tanah Bumbu	S:03°23'45.10"; E:115°54'57.30"	14.10	6	10	2021	6/10/2021 - 12/10/2021	Cerah		20	29	6,9	145	73	36	6,7	5,7	-
		3. Hilir	3.Ds. Maju Makmur - Tanah Bumbu	S:03°25'47.50"; E:115°57'53.10"	16.40	6	10	2021	6/10/2021 - 12/10/2021	Cerah		12	29	6,9	131	65	47	5,5	9,6	
	Cantung	1. Hulu	1.Ds. Banua Lawas - Kotabaru	S:03°02'30.6"; E:115°58'18.61"	11.20	6	10	2021	6/10/2021 - 12/10/2021	Cerah		20	32	6,9	121	60	40	5,2	9,0	
		2. Tengah	2.Ds. Sungai Kupang - Kotabaru	S:03°02'38.74"; E:115°58'59.32"	14.45	6	10	2021	6/10/2021 - 12/10/2021	Cerah		150	28	7,2	181	91	91	6,0	4,7	
		3. Hilir	3.Ds. Karang Payau - Kotabaru	S:03°02'32.84"; E:116°09'54"	16.30	6	10	2021	6/10/2021 - 12/10/2021	Cerah		69	28	7,1	174	87	122	5,5	4,0	
	Cantung	1. Hulu	1.Ds. Banua Lawas - Kotabaru	S:03°02'30.6"; E:115°58'18.61"	11.20	6	10	2021	6/10/2021 - 12/10/2021	Cerah		40	28	7,1	240	116	88	5,6	3,5	
		2. Tengah	2.Ds. Sungai Kupang - Kotabaru	S:03°02'38.74"; E:115°58'59.32"	14.45	6	10	2021	6/10/2021 - 12/10/2021	Cerah		57,6	28	7,1	251	123	29	5,7	3,8	
		3. Hilir	3.Ds. Karang Payau - Kotabaru	S:03°02'32.84"; E:116°09'54"	16.30	6	10	2021	6/10/2021 - 12/10/2021	Cerah		33,6	28	7,3	255	127	39	4,8	2,6	

Persentase Pemenuhan Bakumutu Kualitas Air Sungai dan indikasi sumber pencemar

No.	Parameter	Persentase (%)		Indikasi Sumber Pencemar
		Tahap I	Tahap II	
1	Fecal coli *	94,74	100	bakteri yang berasal dari dari kotoran manusia dan kotoran hewan mamalia
2	Total coliform	94,74	100	bakteri yang berasal dari dari kotoran manusia dan kotoran hewan mamalia, kotoran hewan ternak lainnya, jasad makhluk hidup seperti burung mati, serta bakteri dari limbah rumah tangga
3	BOD *	100	92,1	Limbah organik dari aktivitas rumah tangga seperti limbah makanan dan minuman, detergen (sabun), aplikasi pupuk pada kegiatan pertanian, limbah peternakan, sisa pakan ikan
4	DO *	89,47	76,32	BOD dan COD tinggi maka DO menjadi rendah
5	Cl Bebas	63,16	71,05	Klor dari proses klorinasi. Air bersih yang digunakan masyarakat melalui proses klorinasi oleh PDAM
6	COD *	68,42	60,53	Limbah organik baik dari aktivitas rumah tangga maupun industri, aplikasi pupuk pada kegiatan pertanian, limbah peternakan
7	H ₂ S	36,84	57,89	sampah, limbah cair domestik
8	TSS *	63,16	42,11	kikisan atau erosi tanah dipengaruhi musim hujan, aktivitas galian C, pertambangan batubara, perkebunan sawit
9	Besi (Fe)	60,53	21,05	Karakteristik alami, Pertambangan galian C dan batubara
10	Mangan (Mn)	5,26	10,53	Pertambangan galian C dan batubara
11	Amoniak		10,53	air seni dan tinja, oksidasi zat organik secara mikrobiologis serta dari air buangan industri dan aktivitas masyarakat, limbah domestik, industri, dan limpasan pupuk pertanian.
12	Detergen		5,26	Kegiatan mencuci menggunakan detergen
13	Fenol	13,16		limbah cair industri tekstil (kayu), bisa juga dari limbah domestik
14	Sianida (CN)	7,89		limbah pertambangan emas
15	pH *	5,26		air hujan, limbah industri pertambangan batubara

Pemantauan Kualitas Udara Ambien merupakan bagian dari pengelolaan kualitas udara secara menyeluruh yang memiliki tujuan menjadikan kualitas udara di lingkungan layak bagi kesehatan manusia. Seiring dengan perkembangan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka polutan pencemar pada udara semakin bertambah. Senyawa SO₂ dan NO₂ adalah beberapa dari polutan udara yang menyebabkan penurunan kualitas udara di lingkungan.

Salah satu metode sederhana dan murah untuk pengukuran kualitas udara ambien adalah metode passive sampler dengan parameter ukur SO₂ dan NO₂. Secara Prinsip, metode passive sampler terdiri dari 2 (dua) proses, yaitu proses difusi udara dan proses reaksi udara dengan bahan pereaksi yang terdapat di dalam passive sampler tersebut. Metode tersebut dikembangkan berdasarkan Hukum Fick, sangat mudah untuk mengukur bahan pencemar udara di luar ruang (outdoor) maupun di dalam ruangan (indoor), dan dapat dikembangkan untuk menganalisis sekaligus beberapa bahan pencemar secara simultan. Disamping itu, beberapa keunggulan dapat diperoleh seperti alat sederhana dan sangat mudah untuk melakukan pengambilan sampel, tidak perlu tenaga listrik untuk menggerakkan pompa penghisap saat pengambilan sampel, harganya murah, dan tidak terpengaruh oleh perubahan cuaca seperti kecepatan/arahan angin, maupun kelembaban udara.

Pada Tahun 2021, pemantauan kualitas udara menggunakan dana APBD dan APBN KLHK. Untuk pemantauan dengan dana APBD, pelaksanaan pemantauan Udara Ambien dilaksanakan dengan metode manual aktif dan metode passive sampler, untuk pemantauan kualitas udara dengan metode manual aktif dilaksanakan pada bulan Juni - Juli tahun 2021 oleh Dinas LH Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan UPT Laboratorium Lingkungan Dinas LH Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Laboratorium penguji. Sedangkan untuk pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler bekerjasama dengan laboratorium PT. Analisis Anugerah Sempurna Bogor dilaksanakan pada tanggal 22 Juli – 5 Agustus 2021. Tujuan pelaksanaan pemantauan kualitas udara adalah untuk mendapatkan data kualitas udara ambien di Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil pemantauan kualitas udara dengan metode manual aktif berdasarkan parameter

yang dipantau tidak ada yang melebihi baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII. Untuk hasil pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler dipergunakan untuk pembandingan serta penambahan data perhitungan indeks kualitas udara. Adapun hasil pemantauan kualitas udara ambien dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**HASIL PENGUKURAN UDARA AMBIEN DI KALIMANTAN SELATAN
JUNI - JULI 2021**

NO	KAB/KOTA	TANGGAL PENGAMBILAN SAMPEL	LOKASI SAMPEL	Titik Koordinat	BAKU MUTU HASIL						
					Nitrogen Dioksida (NO ₂) (200 ug/Nm ³)	Sulfur Dioksida (SO ₂) (150 ug/Nm ³)	Carbon Monoksida (CO) (10.000 ug/Nm ³)	Suhu Udara (°C)	Kelembaban (%RH)	Kecepatan Angin (m/det ²)	Arah Angin
1	Banjarmasin	1 Juli 2021	Area Padat Transportasi (Depan Kantor Pos B.Masin Tengah)	S: 03°19'29,0" E: 114°35'28,0"	51.00	268	2,623	31.5	68.8	1.4	Barat Daya
		30 Juni 2021	Area Perkantoran (Halaman Kantor Dinas Kesehatan Pemko Banjarmasin)	S: 03°20'13,01" E: 114°37'54,38"	<34.6	< 112.1	435	32	69.3	0.70	Timr
		1 Juli 2021	Area Pemukiman Penduduk (Kebun Bunga)	S: 03°19'35,7" E: 114°36'27,0"	<34.6	< 112.1	1,203	28.3	75.3	0.20	Barat Daya
2	Banjarbaru	30 Juni 2021	Area Padat Transportasi (Simpang 3 Landasan Ulin)	S: 03°26'26,8" E: 114°44'36,76"	<34.6	< 112.1	515	31.3	70.8	0.70	Barat
		30 Juni 2021	Area Perkantoran (Balai Kota Banjarbaru)	S: 03°26'19,17" E: 114°49'52,34"	<34.6	< 112.1	458	29.3	78.0	0.40	Selatan
		30 Juni 2021	Area Pemukiman Penduduk (Jl. Pandega,Loktabat Utara)	S: 03°25'54,3" E: 114°49'38,1"	<34.6	< 112.1	492	29	77.5	1.20	Barat
3	Banjar	30 Juni 2021	Area Padat Transportasi (Terminal Pasar Gambut)	S: 03°24'20,4" E: 114°40'08,02"	<34.6	< 112.1	2,829	31.80	72.3	0.80	Barat Daya
		30 Juni 2021	Area Perkantoran (Halaman Belakang Kantor Bupati Banjar)	S: 03°24'21,5" E: 114°50'52,00"	<34.6	< 112.1	767	28.5	81.8	0.40	Utara
		30 Juni 2021	Area Permukiman Penduduk (Jl. Menteri 4 Gg. Rahmat)	S: 03°25'37,00" E: 114°50'51,00"	<34.6	< 112.1	882	25.5	88.8	0.40	Tenggara
4	Tapin	23 Juni 2021	Area Padat Transportasi (Jl. A.Yani Km.94)	S: 03°04'43,9" E: 115°06'00,0"	<34.6	< 112.1	859	28.8	75	0.8	Utara
		22 Juni 2021	Area Perkantoran (Depan Kantor Bupati Tapin)	S: 02°55'52,56" E: 115°09'18,84"	<34.6	< 112.1	378	33	59.5	0.50	Selatan
		22 Juni 2021	Area Permukiman Penduduk (Jl. Lembaga Budi)	S: 02°55'59,17" E: 115°08'49,006"	<34.6	< 112.1	790	32	63	0.30	Utara
5	H.S.Selatan	22 Juni 2021	Area Padat Transportasi (Bundaran Simpang 3 Tugu Ketupat)	S: 02°46'54,26" E: 115°16'19,19"	<34.6	< 112.1	722	34.3	58.3	0.90	Barat Daya
		22 Juni 2021	Area Perkantoran (Jl. M. Djohansyah Depan Kantor Pos)	S: 02°47'08,0" E: 115°16'00,0"	<34.6	< 112.1	321	32.00	63.5	0.40	Timur
		23 Juni 2021	Area Permukiman Penduduk (Perum. Tibung Raya Hamalau)	S: 02°47'55,2" E: 115°15'47,8"	<34.6	< 112.1	412	34	60	0.70	Tenggara
6	H.S.Tengah	15 Juni 2021	Area Padat Transportasi (Simpang 10)	S: 02°35'14,54" E: 115°22'31"	<34.6	< 112.1	790	28.00	81	0.20	Barat Laut
		15 Juni 2021	Area Perkantoran (Depan Kantor Bupati HST Lap.Dwi Warna)	S: 02°35'05,52" E: 115°23'04,66"	<34.6	< 112.1	1,638	29.5	77.2	1.00	Tenggara
		15 Juni 2021	Area Permukiman Penduduk (Komp. Bulau Indah)	S: 02°34'58,89" E: 115°22'34,4"	<34.6	< 112.1	951	28.2	81.8	0.40	Barat
7	H.S.Utara	18 Juni 2021	Area Padat Transportasi (Terminal Banua Lima)	S: 02°25'46,1" E: 115°14'47,8"	<34.6	< 112.1	389	34.5	59.2	0.87	Timur Laut
		18 Juni 2021	Area Perkantoran (Depan DPKPLH HSU)	S: 02°24'48,38" E: 115°14'49,15"	68.00	< 112.1	<114.5	31.2	71.5	0.65	Tenggara
		18 Juni 2021	Area Permukiman Penduduk (Perum. Citra Permata Sari)	S: 02°25'05,2 E: 115°14'46,9	<34.6	< 112.1	1,019	33	65.2	0.65	Barat Laut
8	Balangan	15 Juni 2021	Area Padat Transportasi (Terminal/Taman Kota Paringin)	S: 02°20'10,7" E: 115°27'35,6"	<34.6	< 112.1	2,038	29	76.5	0.30	Utara
		15 Juni 2021	Area Perkantoran (Depan Kantor DLH Kab.Balangan)	S: 02°21'39,44" E: 115°28'15,01"	<34.6	< 112.1	504	28.8	77.3	0.03	Tenggara
		15 Juni 2021	Area Permukiman Penduduk (Perum.Citra Permai)	S: 02°19'55,76" E: 115°27'53,23"	<34.6	< 112.1	607	28.2	74.8	0.03	Timur
9	Tabalong	18 Juni 2021	Area Padat Transportasi (Terminal Mabuun)	S: 02°10'25,38" E: 115°25'03,17"	<34.6	< 112.1	492	26,5	86	0.4	Timur
		18 Juni 2021	Area Perkantoran (Halaman Kantor Bupati Tabalong)	S: 02°09'52,75" E: 115°22'55,7"	<34.6	< 112.1	1,237	27,0	85,0	0,40	Tenggara
		18 Juni 2021	Area Permukiman (Komplek Swadarma Lestari Jl. Nuri)	S: 02°10'46,82" E: 115°24'54,74"	<34.6	< 112.1	332	26	85,2	0,2	Barat Daya
10	Tanah Laut	30 Juni 2021	Area Industri (Depan PT. Indofood Bati-Bati)	S: 03°33'00,9" E: 114°43'51,0"	<34.6	< 112.1	550	29,80	76,3	1,40	Barat Laut
		29 Juni 2021	Area Perkantoran (Halaman Kantor Bupati Tanah Laut)	S: 03°47'57,1" E: 114°46'55,7"	<34.6	< 112.1	252	26	89,8	1,1	Utara
		29 Juni 2021	Area Permukiman (Komp. Permata Jingga Desa Karang Taruna)	S: 03°48'41,2" E: 114°45'03,6"	<34.6	< 112.1	527	28	83,3	0,50	Barat Laut
11	Barito Kuala	2 Juli 2021	Area Padat Transportasi (Terminal Taksi Handil Bakti)	S: 03°16'36,13" E: 114°35'52,19"	76.0	< 112.1	3,287	33,3	65,00	0,9	Barat
		2 Juli 2021	Area Perkantoran (Kantor Bupati Batola)	S: 02°58'41,68" E: 114°45'59,12"	<34.6	< 112.1	1,340	28,8	80,5	0,03	Barat
		2 Juli 2021	Area Permukiman (Handil Bakti, Komp.Kemuning Indah)	S: 03°15'36,13" E: 114°36'32,86"	<34.6	< 112.1	630	31,8	66,8	0,9	Barat Laut
12	Tanah Bumbu	26 Juni 2021	Area Padat Transportasi (Simpang Empat Pelajau)	S: 03°25'27,3" E: 116°00'18,4"	<34.6	< 112.1	985	34,3	56	1,00	Barat Laut
		25 Juni 2021	Area Perkantoran (Halaman kantor Bupati Tanah Bumbu)	S: 03°29'01,43" E: 115°56'50,13"	<34.6	< 112.1	126	30	70,8	0,8	Barat Laut
		26 Juni 2021	Area Permukiman (Perum.Bumi Bersujud Sempurna)	S: 03°24'35,86" E: 115°58'50,46"	<34.6	< 112.1	263	33	58,8	0,7	Barat Laut
13	Kotabaru	26 Juni 2021	Area Padat Transportasi (Simpang Empat Jl.P. Hidayatullah)	S: 03°14'36,13" E: 116°13'36,12"	<34.6	< 112.1	4,661	26	87	0,40	Selatan
		25 Juni 2021	Area Perkantoran (Depan Kantor Bupati Kotabaru)	S: 03°14'10,5" E: 116°13'40,9"	<34.6	< 112.1	1,432	27	86	0,40	Tenggara
		26 Juni 2021	Area Permukiman Penduduk (Perum. PDAM)	S: 03°15'09,7" E: 116°12'38,34"	<34.6	< 112.1	309	30	69,3	0,70	Utara

Tabel Hasil Pemantauan Kualitas Udara dengan Metode Passive Sampler

NO	KABUPATEN/ KOTA	PERUNTUKAN	NAMA LOKASI	TAHAP I		AHAP I (DLH KALSEL)		TAHAP II (KLHK)	
				TAHAP I	Kadar SO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂
				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
1	TANAH LAUT (6301)	Transportasi	Jl. A, Syarroni	5.47	2.57	6.08	4.13	4.7	3.32
		Industri	Jl. A. Yani KM. 33	11.00	11.53	13.88	10.32	9.85	16.27
		Perumahan	Komplek Anggoro Blok IV	4.90	2.57	3.41	2.47	4.65	5.15
		Perkantoran	Depan DPRKPLH Kab. Tanah Laut	2.85	7.80	2.44	10.40	2.175	6.97
		BLANK		<0,41	<2,57	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57
2	KAB. KOTA BARU (6302)	Transportasi	Simpang Irama Jl. P.Hidayat	17.32	8.59	18.01	7.92	17.11	10.65
		Industri	PT Golden Hope	4.01	16.50	5.66	15.17	6.02	15.76
		Perumahan	Perumnas Blok D Semayap	6.67	10.37	4.82	9.03	7.58	9.36
		Perkantoran	Depan Kantor Bupati	10.73	8.02	10.31	11.45	11.14	5.17
		BLANK		<0,41	<2,57	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57
3	KAB. BANJAR (6303)	Transportasi	Jalan A. Yani KM. 38	10.66	9.11	10.80	11.75	12.8	12.74
		Industri	Kawasan Bizzpark	10.80	10.55	11.44	12.50	12.6	16.59
		Perumahan	Bunyamin Residence	11.51	5.96	11.62	5.35	11.16	7.84
		Perkantoran	Depan Kantor DLH Kab. Banjar	11.67	15.69	11.91	17.50	10.65	16.48
		BLANK		<0,41	<2,57	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57
4	KAB. BARITO KUALA (6304)	Transportasi	Jl. Trans Kalimantan Handil Bakti	11.80	6.20	12.33	7.40	15.45	7.78
		Industri	Perusahaan PT TSMJ	7.96	5.58	9.37	8.81	6.36	4.62
		Perumahan	Komp. Taman Citra Raya Kec. Alalak	6.40	0.00	7.68	3.30	5.91	4.27
		Perkantoran	Jl. Jend. Sudirman No. 76 (Depan Kantor Laboratorium Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala)	4.34	5.92	5.11	4.93	3.63	5.21
		BLANK		<0,41	<2,57	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57
5	KAB. TAPIN/ KOTA RANTAU (6305)	Transportasi	Jl. A. Yani km.91 (Usulan Lokasi Baru)	8.84	5.23	7.80	6.19	11.22	4.02
		Industri	Desa Sungai Jingah Kec. Candi Laras Selatan	5.96	2.57	6.64	2.47	5.09	5.135
		Perumahan	Komplek Haur Kuning Permai Jl. Jendral Sudirman	9.01	6.83	8.48	7.70	8.18	7.12
		Perkantoran	Kantor Dinas Sosial Jl.Gub A.Berani Sulaeman Tapin Utara	7.94	4.79	9.99	5.93	10.03	9.13
		BLANK		<0,41	<2,57	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57
6	KAB. HULU SUNGAI SELATAN (6306)	Transportasi	Depan Rumah H. Irpani, Jl. Veteran (Al-Falah), Kel. Kandangan Kota	18.23	3.30	18.91	4.46	11.52667	6.063333
		Industri	Depan Kantor Desa Bayanan Kec. Daha Selatan	3.84	8.59	3.89	9.88	5.7	11.34
		Perumahan	Perumnas Kalaka Indah Ds. Hamalau, Sungai Raya	10.92	6.21	11.62	6.13	11.56	6.405
		Perkantoran	Depan Gedung PKK HSS Jl. Merah Johansyah Kel. Kandangan Kota	10.52	4.42	10.52	6.26	10.1	6.35
		BLANK		<0,41	<2,57	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57
7	HULU SUNGAI TENGAH / BARABAI (6307)	Transportasi	Simpang Sepuluh	11.46	4.96	11.31	5.77	11.14	5.653333
		Industri	Desa Telang	4.70	5.54	7.84	6.57	7.06	5.52
		Perumahan	Komplek Bawan Permai	4.80	3.88	7.76	6.06	6.24	4.994
		Perkantoran	Komplek PU	6.98	15.90	8.05	11.86	9.47	11.51
		BLANK		<0,41	<2,57	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57

NO	KABUPATEN/ KOTA	PERUNTUKAN	NAMA LOKASI	TAHAP I		TAHAP I (DLH KALSEL		TAHAP II (KLHK)	
				TAHAP I	Kadar SO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂
				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
8	HULU SUNGAI UTARA (6308)	Transportasi	Simpang Empat Banua Lima	14.30	9.05	17.57	11.67	13.16	7.11
		Industri	Industri Crumb Rubber, Jl. Jermani Husein Ds. Lok Bangkai	9.01	9.71	9.92	10.36	7.48	5.91
		Perumahan	Perumahan Dinas Pemda	6.89	0.00	7.91	2.47	9.87	3.25
		Perkantoran	Komplek Perkantoran Pemda	14.06	2.95	12.79	2.47	12.71	8.79
		BLANK		<0,41	<2,57	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57
9	TABALONG (6309)	Transportasi	Jl. Ir. PHM Noor Kelurahan Pembataan (Usulan Lokasi Baru)	7.43	10.75	9.14	12.61	8.155	8.395
		Industri	PT. Alam Tri Abadi, Desa Kasiau Kec. Murung Pudak	15.00	11.70	9.05	19.82	14.64	11.855
		Perumahan	Komp Swadarma Lestari, Jl. Gelantik	6.98	4.10	4.87	7.94	7.4	2.966
		Perkantoran	Area Perkantoran Sekretariat Daerah Kab. Tabalong, Taman Giat Jantung, Jl. P. Antasari Kel. Tanjung (Usulan Lokasi Baru)	8.22	5.54	8.97	6.02	6.98	10.22
		BLANK		<0,41	<2,57	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57
10	TANAH BUMBU (6310)	Transportasi	Jl. Raya Batulicin, Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu	5.45	12.03	5.14	12.85	4.175	12.35
		Industri	Komp. Industri Jhonlin Agro Mandiri Desa Sungai Kecil. Kec. Simpang Empat	4.15	5.04	4.33	6.97	5.74	6.26
		Perumahan	Perumahan Bumi Berujud, Desa Barokah Kec. Simpang Empat	5.32	6.34	5.85	8.24	2.815	4.805
		Perkantoran	Kantor Bupati Kab. Tanah Bumbu	5.18	4.94	4.40	3.71	2.77	3.99
		BLANK		<0,41	<2,57	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57
11	BALANGAN (6311)	Transportasi	Terminal Paringin	9.88	3.30	10.31	5.13	12.48	3.65
		Industri	Industri Paringin Over Pass	11.51	8.91	10.96	9.93	18.92	5.36
		Perumahan	Perumahan SKB	7.81	9.88	7.84	10.18	7.4	5.24
		Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup Balangan	4.19	3.30	4.99	2.57	5.18	4.98
		BLANK		<0,41	<2,57	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57
12	KOTA BANJARMASIN (6371)	Transportasi	Depan UT, Jl. Sultan Adam	5.85	11.00	6.06	13.32	8.84	12.65
		Industri	Pelindo III, Jl. Barito Hilir	23.38	7.20	27.13	11.75	22.77	8.5
		Perumahan	Komplek Mahligai, S. Adam	8.01	10.84	10.42	13.14	7.77	11.05
		Perkantoran	Depan Kantor Dinas Bina Marga, Jalan Hasan Basri (Stasiun AQMS)	20.43	7.24	18.00	8.18	19.725	7.28
		BLANK		<0,41	<2,57	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57
13	BANJARBARU (6372)	Transportasi	Panti Asuhan Budi Mulia Jl. A. Yani km 27.5 Landasan Ulin	11.80	7.45	11.40	7.68	9.99	8.34
		Industri	Lingkungan Industri Kecil Liang Anggang Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Liang Anggana	8.93	2.57	10.51	4.58	8.62	<2,57
		Perumahan	Kawasan Perumahan Kehutanan Jl. Binawa	8.62	11.64	10.69	12.65	7.7	16.6
		Perkantoran	Kantor Walikota Jl. Panglima Batur No. 1 Banjarbaru	11.02	11.85	11.21	10.64	8.81	10.05
		BLANK		<0,41	<2,57	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57

a. Upaya yang telah dilakukan

Secara umum kegiatan pemantauan kualitas lingkungan dapat berjalan dengan baik. Target persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter indeks kualitas air dapat tercapai sebesar 8.89% yang dilaksanakan pemantauan di 12 Sungai dan 1 saluran irigasi di 12 Kab/Kota, Persentase parameter kualitas udara dengan kategori baik dan sangat baik yaitu 100%. dengan pemantauan kualitas udara ambien di 13 Kab/Kota serta Persentase laporan mengenai pemantauan lingkungan yang disusun dan diinformasikan 100%.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Kejadian banjir yang melanda di hampir seluruh Kab/kota di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021 menyebabkan penundaan jadwal pelaksanaan pemantauan. Pemantauan tahap I baru dapat dilaksanakan pada akhir bulan Maret agar sampel air sungai yang diuji dapat menggambarkan kualitas air sungai pada saat kondisi umum. Sampel yang diambil pada saat kejadian banjir tentu akan menggambarkan kualitas air secara kondisional.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dalam hal perbaikan kinerja, untuk kegiatan pemantauan kualitas air diperlukan penambahan frekuensi untuk memenuhi petunjuk teknis pemantauan kualitas air dalam keterwakilan musim, pemantauan kualitas udara ambien dengan metode manual aktif diperlukan penambahan durasi, frekuensi, dan parameter pemantauan agar diperoleh hasil yang lebih optimal sehingga hasil data yang diperoleh mendekati gambaran kualitas udara yang sebenarnya. Sedangkan dengan metode passive sampler diperlukan penambahan frekuensi dengan dana APBD Provinsi dan Kab/Kota sehingga dapat menambah data untuk perhitungan IKU.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Bidang PPKLH antara lain adalah:

1. Tetap melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dalam kegiatan teknis Pemantauan Kualitas Air, Udara dan penyusunan dokumen IKPLHD.

2. Tetap melakukan koordinasi dengan 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Perlu ditingkatkan pengelolaan lingkungan melalui upaya pemulihan terhadap lingkungan. Untuk pemantauan kualitas air sungai dan udara diperlukan penambahan titik pantau dan frekuensi pemantauan sehingga hasil data yang diperoleh lebih mendekati gambaran kualitas air sungai dan udara yang sebenarnya.

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Kinerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH menggunakan dana APBD dan APBN. Untuk dana APBD melalui:

1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Kegiatan:

- 1) Pemantauan kualitas lingkungan
- 2) Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper).

2. Program perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan konservasi cadangan SDA dan LH, Kegiatan:

- 1) Pengelolaan Lahan Gambut dan Akses Terbuka
- 2) Pengembangan data dan informasi

Selain itu didukung pula dengan dana APBN melalui dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK dengan Kegiatan Koordinasi kegiatan perencanaan dan evaluasi. Tugas Pembantuan dari Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia, bentuk pemberian tugas yaitu menyelenggarakan Program dan Kegiatan Nasional dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

3.1.4.1. SEKSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 52. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	Persentase Penurunan nilai Indeks Pencemar Sungai	76.29% (IP 10 Sungai menurun)	76.29 % (IP 10 Sungai menurun)	100%
2	Meningkatnya Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu	100%	100%	100%
Rata - Rata Capaian					100%

Indikator pertama yaitu persentase penurunan nilai Indeks Pencemar sungai yang ditargetkan 76,29% yaitu IP 10 Sungai menurun dan terealisasi IP 9 sungai menurun, sehingga capaian kinerja sebesar 90,75%.

Indikator kedua yaitu Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu ditargetkan 100% dengan 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel. 53 Status Mutu Air per Titik Pantau dengan Metode Indeks Pencemaran

No	Nama Sungai	Kab/Kota	Lokasi sampel	Status Mutu Tahap I	Status Mutu Tahap II	Skor IP Rata-rata
1	Martapura	Kab. Banjar	1. Desa Tambak Anyar Ilir	Cemar Ringan (4,62)	Cemar Ringan (4,15)	Cemar Ringan (4,39)
			2. Desa Sungai Rangas	Cemar Ringan (4,05)	Cemar Ringan (2,95)	Cemar Ringan (3,50)
			3. Desa Sungai Lulut	Cemar Ringan (4,18)	Cemar Ringan (2,09)	Cemar Ringan (3,14)
		Kota Banjarmasin	4. Desa Basirih	Cemar Ringan (4,58)	Cemar Ringan (3,67)	Cemar Ringan (4,13)
2	Irigasi	Kab. Banjar	1. Desa Sungai Landas	Cemar Ringan (4,54)	Cemar Ringan (2,06)	Cemar Ringan (3,30)
		Kota Banjarbaru	2. Intake PDAM	Cemar Ringan (4,57)	Cemar Ringan (3,39)	Cemar Ringan (3,98)
		Kab. Banjar	3. Desa Sungai Tabuk Keramat	Cemar Ringan (4,36)	Cemar Ringan (3,26)	Cemar Ringan (3,81)
3	Riam Kanan	Kab. Banjar	1. Desa Pingaran Ulu	Cemar Ringan (4,41)	Cemar Ringan (4,59)	Cemar Ringan (4,50)

4	RiamKiwa	Kab. Banjar	1. Desa Astambul Kota	Cemar Ringan (4,56)	Cemar Ringan (3,15)	Cemar Ringan (3,86)
5	Negara	Kab. H.S.Utara	1.Desesa Jarang Kuantan	Cemar Ringan (3,19)	Cemar Ringan (3,56)	Cemar Ringan (3,38)
			2.DesesaTelukMe sjid	Cemar Ringan (3,58)	Cemar Ringan (3,59)	Cemar Ringan (3,59)
		Kab. H. S.Selatan	1. Desa Hakurung	Cemar Ringan (3,18)	Cemar Ringan (2,92)	Cemar Ringan (3,05)
			2. Desa Tumbukan Banyu	Cemar Ringan (2,98)	Cemar Ringan (4,27)	Cemar Ringan (3,63)
			3. Desa Bajayau-Daha	Memenuhi (0,76)	Cemar Ringan (3,36)	Cemar Ringan (2,06)
		Kab. Tapin	1. Desa Margasari	Cemar Ringan (2,43)	Cemar Ringan (2,45)	Cemar Ringan (2,44)
			2. Desa Sei. Puting	Cemar Ringan (3,89)	Cemar Ringan (0,78)	Cemar Ringan (2,34)
			3. Desa Keladan	Cemar Ringan (3,10)	Cemar Ringan (1,20)	Cemar Ringan (2,15)
		6	Tapin	Kab. Tapin	1. Desa Baringin A	Cemar Ringan (3,19)
7	Barabai	Kab. H.S.Tengah	1.Desesa Bulayak	Cemar Ringan (4,82)	Cemar Ringan (4,67)	Cemar Ringan (4,75)
			2.Desesa Pajukungan	Cemar Ringan (3,20)	Cemar Ringan (4,48)	Cemar Ringan (3,84)
			3.Desesa Kasarangan	Cemar Ringan (3,29)	Cemar Ringan (4,36)	Cemar Ringan (3,83)
			4.Desesa Tabat	Cemar Ringan (2,70)	Cemar Ringan (4,00)	Cemar Ringan (3,35)
8	Amandit	Kab. H.S. Selatan	1. Desa Muning Baru	Cemar Ringan (3,65)	Cemar Ringan (3,18)	Cemar Ringan (3,42)
9	Tabanio	Kab. Tanah Laut	1.Intake PDAMDesaBajuin	Cemar Ringan (4,84)	Cemar Ringan (4,57)	Cemar Ringan (4,71)
			2.Desesa Angsau	Cemar Ringan (3,72)	Cemar Ringan (4,83)	Cemar Ringan (4,28)
			3.Desesa Panjaratan	Cemar Ringan (4,87)	Cemar Ringan (3,79)	Cemar Ringan (4,33)
10	Balangan	Kab.Balangan	1.Desesa Tabuan	Cemar Ringan (2,88)	Cemar Ringan (3,60)	Cemar Ringan (3,24)
			2.Desesa Kapul	Cemar Ringan (4,00)	Cemar Ringan (4,02)	Cemar Ringan (4,01)
			3.Desesa Paringin Kota	Cemar Ringan (3,48)	Cemar Ringan (3,67)	Cemar Ringan (3,58)
11	Tabalong	Kab. Tabalong	1.Desesa Suput	Cemar Ringan (2,89)	Cemar Ringan (2,28)	Cemar Ringan (2,59)
			2.Desesa PamaranganKiwa	Cemar Ringan (2,76)	Cemar Ringan (2,58)	Cemar Ringan (2,67)
			3.Desesa Halangan	Cemar Ringan (2,25)	Cemar Ringan (3,62)	Cemar Ringan (2,94)

12	Batulicin	Kab. Tanah Bumbu	1. Desa Sela Selilau	CemarRingan (4,21)	CemarRingan (1,83)	CemarRingan (3,02)
			2. Desa Karang Bintang	CemarRingan (3,64)	CemarRingan (2,13)	CemarRingan (2,89)
			3. Desa Maju Makmur	CemarRingan (3,85)	CemarRingan (1,93)	CemarRingan (2,89)
13	Cantung	Kab .Kotabaru	1. Desa BanuaLawas	CemarRingan (3,51)	CemarRingan (3,69)	CemarRingan (3,60)
			2. Desa Sungai Kupang	CemarRingan (2,80)	Memenuhi (0,997)	CemarRingan (1,90)
			3. Desa KarangPayau	CemarRingan (3,00)	CemarRingan (3,72)	CemarRingan (3,36)

Tabel 54. Perbandingan Status Mutu Air Sungai Tahun 2020-2021

No	Nama Sungai	Kabupaten/Kota	IP Tahun 2020	Status Mutu Tahun 2020	IP Tahun 2021	Status Mutu Tahun 2021	Perbandingan IP	Perbandingan Status Mutu
1	Martapura	Kab.Banjar-Kota Banjarmasin	3,82	CemarRingan	3,79	CemarRingan	Menurun 0,03	Tetap
2	Irigasi	Kab.Banjar-Kota Banjarbaru	3,57	CemarRingan	3,70	CemarRingan	Meningkat 0,13	Tetap
3	RiamKanan	Kab.Banjar	3,53	CemarRingan	4,50	CemarRingan	Meningkat 0,97	Tetap
4	RiamKiwa	Kab.Banjar	4,32	CemarRingan	3,86	CemarRingan	Menurun 0,47	Tetap
5	Negara	-Kab. Hulu Sungai Utara -Kab.Hulu Sungai Selatan -Kab.Tapin	4,40	CemarRingan	2,83	CemarRingan	Menurun1,57	Tetap
6	Tapin	Kab.Tapin	4,27	CemarRingan	2,51	CemarRingan	Menurun 1,77	Tetap
7	Barabai	Kab.Hulu Sungai Tengah	4,24	CemarRingan	3,94	CemarRingan	Menurun0,3	Tetap
8	Amandit	Kab.Hulu Sungai Selatan	3,71	CemarRingan	3,42	CemarRingan	Menurun 0,3	Tetap
9	Tabanio	Kab.TanahLaut	4,24	CemarRingan	4,44	CemarRingan	Meningkat 0,2	Tetap
10	Balangan	Kab.Balangan	4,39	CemarRingan	3,61	CemarRingan	Menurun 0,78	Tetap
11	Tabalong	Kab.Tabalong	3,44	CemarRingan	2,73	CemarRingan	Menurun 0,71	Tetap
12	Batulicin	Kab.TanahBumbu	4,94	CemarRingan	2,93	CemarRingan	Menurun2,01	Tetap
13	Cantung	Kab.Kotabaru	4,38	CemarRingan	2,95	CemarRingan	Menurun1,43	Tetap

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 55. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya Kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	1 Persentase Penurunan nilai Indeks Pencemar Sungai	- 76.92 % (IP 10 Sungai Menurun)	76.29% (IP 10 Sungai menurun)	76.29% (IP 9 Sungai menurun)	100%	76.29%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	2 Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu	100% 16.67 (1 Kab/Kota)	100%	100% Memenuhi baku mutu	100%	100%	100%

Indikator pertama pada tahun 2019 yaitu Jumlah sungai Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan yang dipantau kualitasnya terealisasi 13 sungai dengan 76 sampel dan pada tahun 2020 terealisasi 13 sungai dengan 82 sampel sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2021 Indikator pertama yaitu Persentase penurunan nilai indeks pencemar sungai ditargetkan 76.29% dengan capaian 69.23% dan IP 9 Sungai Menurun, sehingga capaian kinerja sebesar 90.74%.

Indikator kedua pada tahun 2019 yaitu Jumlah Kab/Kota yang dipantau terealisasi 13 Kab/Kota dengan 78 sampel dan pada tahun 2020 terealisasi 13 Kab/Kota dengan 39 sampel sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2021 Indikator kedua yaitu Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu ditargetkan 100% dengan 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada Tahun 2021, Seksi pemantauan lingkungan hidup, telah melaksanakan semua tahap pemantauan sesuai yang direncanakan baik itu untuk pemantauan kualitas air dan kualitas udara.

Pelaksanaan pemantauan kualitas air yang menggunakan dana APBD dilakukan oleh DLH Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama

dengan UPT Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Kalsel sebagai Laboratorium penguji. Pemantauan dilakukan di seluruh kab/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 14 (empat belas) titik pantau menggunakan Dana APBN KLHK serta sebanyak 38 (tiga puluh delapan) titik pantau menggunakan APBD. Lokasi pemantauan tersebut berada pada:

1. Sungai Martapura berhulu di Riam Kiwa Kecamatan Simpang Empat Pengaron Kabupaten Banjar sedangkan bagian hilir Sungai Martapura berada di Wilayah Kota Banjarmasin dan merupakan pertemuan dengan Sungai Barito.
2. Air permukaan di wilayah Kabupaten Banjar berupa sungai dan waduk. Tiga sungai utama di Kabupaten Banjar yaitu Sungai Riam Kiwa, Sungai Riam Kanan dan Sungai Martapura, termasuk anak-anak sungainya. Fungsi utama sungai tersebut antara lain adalah sebagai saluran drainase makro, irigasi, sarana MCK dan wisata air serta prasarana transportasi.
3. Titik sampel hilir Sungai Riam Kiwa Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.
4. Saluran Irigasi melintasi Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Sumber air saluran irigasi berasal dari Waduk Riam Kanan di Kabupaten Banjar. Saluran Irigasi yang melewati Kota Banjarbaru dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan sebagai air baku PDAM Intan Banjar.
5. Sungai Negara melintas 4 (empat) wilayah yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan bagian hulu sungai, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan bagian tengah dan wilayah Kabupaten Tapin yang merupakan bagian hilir serta Kabupaten Barito Kuala yang merupakan muara sungai menuju Sungai Barito.
6. Dari arah utara melingkar ke arah barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dialiri oleh Sungai Amandit bermuara ke Sungai Negara (anak sungai Barito) yang berfungsi sebagai sarana prasarana perhubungan dalam kabupaten dan ke kabupaten lainnya. Hal ini ditunjang dengan beberapa sungai besar yang melintasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dijadikan sarana transportasi bagi masyarakat baik antar kabupaten maupun antar

Provinsi. Selain itu air sungai digunakan sebagai sumber air untuk keperluan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

7. Wilayah Kabupaten Tapin meliputi lansekap Daerah Aliran Sungai Tapin. Sungai Tapin mempunyai empat cabang yaitu Sungai Muning, Sungai Tatakan, Sungai Halat, dan Sungai Gadung.
8. Air Sungai Barabai yang mengalir dari Pegunungan Meratus di wilayah Kecamatan Hantakan melalui Kecamatan Batu Benawa dan melalui pusat Kota Barabai lalu bermuara daerah rawa Pahalatan (Kecamatan Labuan Amas Utara) – Danau Bangkau. Sistem alirnya dari timur ke barat, kegunaan rawa sama dengan DAS Batang Alai yaitu merupakan sumber kebutuhan air untuk penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. DAS tersebut melintasi Kelurahan Barabai Darat, Barabai Selatan, Barabai Barat, Bukat dan Desa Pajukungan. Karena melalui Kota Barabai, maka aliran sungai ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat perkotaan Barabai, khususnya saat musim penghujan dimana aliran ini sering meluap dan penggenangi permukiman di Kota Barabai. Daerah-daerah ini rawan dilanda banjir saat musim penghujan.
9. Sebagian besar air permukaan di Kabupaten Balangan adalah berupa air sungai dengan sungai utama adalah Sungai Halong, Sungai Balangan dan Sungai Pitap. Sungai Balangan hulu termasuk dalam kategori sungai yang berumur dewasa (*maturity*) dengan ciri mempunyai banyak belokan/kelokan yang perubahan kelokannya dibatasi oleh tebing lembahnya, sedangkan Sungai Balangan hilir termasuk dalam kategori sungai tua dengan ciri sudah membentuk kelokan yang perubahannya sudah lebih sempit dari pada tebing lembahnya. Sungai Utama yang terdapat di Kabupaten Balangan adalah Sungai Balangan yang terpanjang (56,5 km), Sungai Pitap (24,75 km) dan Sungai Halong (18,75 km). Sungai terlebar dan terdalam adalah Sungai Balangan dan yang memiliki debit tertinggi adalah Sungai Pitap.
10. Sungai Tabalong atau Batang Tabalong bermuara di Sungai Negara. Sungai ini berujung di dua anak sungai, yakni Sungai Tabalong Kiri dan Sungai Tabalong Kanan.
11. Kabupaten Tanah Laut terdapat beberapa sungai yaitu Sungai Tabonio, Sungai Swarangan, Sungai Asam-Asam, Sungai Kintap, Sungai Sabuhur, dan Sungai Maluka.

12. Sungai Batulicin. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi, cuci, kakus, air minum serta irigasi persawahan.

13. Sungai Cantung merupakan salah satu sungai di Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan inventarisasi sungai yang ada di Kabupaten Kotabaru, Sungai Cantung memiliki panjang 65 km. Sungai Cantung tepatnya berada di Kecamatan Kelumpang Hulu.

Pemantauan kualitas air sungai dilaksanakan sebanyak 2 (Dua) kali. Pelaksanaan pemantauan kualitas air Sungai Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 yaitu tahap I pada bulan Maret hingga April dan tahap II pada September hingga Oktober. Jumlah parameter yang dipantau untuk seluruh titik pemantauan yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) pada tahap I namun pada tahap II parameter yang dipantau sebanyak 23 (dua puluh tiga) parameter karena kendala pengujian salah satu parameter di laboratorium penguji. Jumlah titik pantau seluruhnya yang menggunakan dana APBD Provinsi berjumlah 38 (tiga puluh delapan) dengan rincian adalah 4 (empat) titik di Sungai Martapura, 1 (satu) titik di Sungai Riam Kanan, 1 (satu) titik di Sungai Riam Kiwa, 3 (tiga) titik di Saluran Irigasi, 8 (delapan) titik di Sungai Negara, 1 (satu) titik di Sungai Amandit, 1 (satu) titik di Sungai Tapin, 4 (empat) titik di Sungai Barabai, 3 (tiga) titik di Sungai Balangan, dan 3 (tiga) titik di Sungai Tabalong, 3 (tiga) titik di Sungai Tabanio, 3 (tiga) titik di Sungai Batulicin, dan 3 (tiga) titik di Sungai Cantung.

Pelaksanaan pemantauan yang menggunakan dana APBN KLHK dilakukan oleh KLHK yang bekerjasama dengan pihak ketiga dan didampingi oleh Seksi Pemantauan DLH Provinsi Kalimantan Selatan. Pemantauan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di 14 (empat belas) titik pantau yaitu: Sungai Barito di Intake PDAM, Dermaga Masjid Agung, Bantuil, Dermaga Simpang Arja, Dermaga Belawang, Dermaga Murung Keramat, Anjir Muara, Bawah Jembatan Barito, Ujung Panti, Pelabuhan Trisakti, Kuin Kecil, Pulau Kaget. Untuk muara Sungai Martapura di Kelurahan Mantuil dan muara Sungai Negara di Desa Lepsan.

Pada Tahun 2021, pemantauan kualitas udara menggunakan dana APBD dan APBN KLHK. Untuk pemantauan dengan dana APBD, Pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan metode manual aktif selama 1 jam dengan lokasi 13 kab/kota pada bulan Juni – Juli 2021 oleh Dinas LH Provinsi Kalimantan Selatan yang bekerjasama dengan

UPT Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Laboratorium penguji serta pemantauan dengan metode passive sampler yang berkerjasama dengan laboratorium PT. Analisis Anugrah Sempurna Bogor dilaksanakan di 13 Kab/kota pada tanggal 22 Juli – 5 Agustus 2021, Sedangkan kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan dana APBN KLHK juga menggunakan metode passive sampler dilaksanakan di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) tahap kegiatan, Pemantauan Kualitas Udara Tahap I (satu) dilaksanakan pada tanggal 3 – 17 Juni 2021 dan untuk Pemantauan Kualitas Udara Tahap II (dua) dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021 – 1 September 2021.

Dalam melaksanakan kinerja seksi pemantauan kualitas lingkungan, terdapat upaya yang telah dilakukan, hambatan dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

a. Upaya yang telah dilakukan

Secara umum kegiatan pemantauan kualitas lingkungan dapat berjalan dengan baik. Persen Persentase penurunan nilai indeks pencemar sungai ditargetkan 76.29% dengan capaian 69.23% dan IP 9 Sungai Menurun, sehingga capaian kinerja sebesar 90.74% dan Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu ditargetkan 100% dengan 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Kejadian banjir yang melanda di hampir seluruh Kab/kota di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021 menyebabkan penundaan jadwal pelaksanaan pemantauan. Pemantauan tahap I baru dapat dilaksanakan pada akhir bulan Maret agar sampel air sungai yang diuji dapat menggambarkan kualitas air sungai pada saat kondisi umum. Sampel yang diambil pada saat kejadian banjir tentu akan menggambarkan kualitas air secara kondisional.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dalam hal perbaikan kinerja, untuk kegiatan pemantauan kualitas air diperlukan penambahan frekuensi untuk memenuhi petunjuk teknis pemantauan kualitas air dalam keterwakilan musim yaitu 5 kali, pemantauan kualitas udara ambien dengan metode

manual aktif diperlukan penambahan durasi, frekuensi, dan parameter pemantauan agar diperoleh hasil yang lebih optimal sehingga hasil data yang diperoleh mendekati gambaran kualitas udara yang sebenarnya. Sedangkan pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler diperlukan penambahan frekuensi dengan dana APBD Provinsi dan Kab/Kota sehingga dapat menambah data untuk perhitungan IKU.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup antara lain adalah:

1. Tetap melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dalam kegiatan teknis Pemantauan Kualitas Air dan Udara.
2. Tetap melakukan koordinasi dengan 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Melakukan evaluasi titik pantau baik untuk kualitas air sungai maupun kualitas udara.
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil uji laboratorium untuk memastikan validasi data dengan melakukan uji sampel ke laboratorium berbeda.
5. Melakukan kajian Daya Tampung dan Alokasi Beban Pencemar di Sungai Negara agar dapat menjadi acuan dalam kebijakan penurunan beban pencemar yang masuk ke Sungai Negara.
6. Membentuk Tim Satgas Martapura Bungas yang salah satu kegiatannya adalah aksi bersih-bersih sungai yang bertujuan untuk menekan pencemaran terutama dari sampah domestik.

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan dana APBD dan APBN KLHK. Untuk dana APBD melalui Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kegiatan pemantauan kualitas lingkungan. APBN KLHK untuk pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai di 14 (empat belas) titik pantau dan pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler di 13 Kabupaten/Kota.

3.1.4.2. SEKSI PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 56. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup

No	Kinerja Utama	Indikator	Target & Capaian 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya luasan yang terpulihkan dari kerusakan lingkungan hidup.	1 Luas lahan gambut rusak yang direstorasi	2000 ha	2000 ha	100%
		2 Luas Lahan Akses Terbuka yang diinventarisir	5000 ha	5059,8	101%
Rata-Rata Capaian					100%

Indikator pertama yaitu Luas lahan gambut rusak yang direstorasi ditargetkan 2.000 ha dan terealisasi seluas 2.000 ha, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Indikator kedua yaitu Luas Lahan Akses Terbuka yang diinventarisir ditargetkan 5.000 Ha dan terealisasi 5059,8 Ha sehingga capaian kinerja sebesar 101%.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 57.

Tabel 57. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya luasan yang terpulihkan dari kerusakan lingkungan hidup.	1 Luas lahan gambut rusak yang direstorasi	10.000 ha	2000 ha	2000 ha	100%	38.415 Ha	100%
		2 Luas Lahan Akses Terbuka yang diinventarisir	19732 ha	5000 ha	5059,8 ha	101%	8 Lokasi	101%

Indikator pertama yaitu luas lahan gambut rusak yang diinventarisir ditargetkan pada Tahun 2018 terealisasi seluas 10.000 ha, pada Tahun 2019 terealisasi seluas 10.000 ha dan pada tahun 2020 direstorasi seluas 2.000 ha serta pada tahun 2021 direstorasi seluas 2.000 ha dengan capaian kinerja sebesar 100% melalui kegiatan pembangunan sekat kanal 5 (Lima) Unit di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan, Pembangunan Sumur Bor Permanen dan Menara Air di Kelurahan Syamsudin Noor Kota Banjarbaru dan Revitalisasi Ekonomi pada 11 Desa yang tersebar di Kabupaten Tabalong, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan.

Indikator kedua yaitu Luas Lahan akses terbuka yang diinventarisir ditargetkan pada Tahun 2018 terealisasi 3 lokasi yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin, Tahun 2019 terealisasi 2 lokasi yaitu Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu dan Tahun 2020 terealisasi 1 lokasi yaitu Kotabaru serta pada Tahun 2021 terealisasi pada DAS Barito, Pumpung Kota Banjarbaru, Danau Biru dan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dengan luas 5059,8 ha dengan capaian kinerja sebesar 100%.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Kegiatan pada Tahun 2021 yang dilaksanakan pada hakikatnya merupakan kegiatan lanjutan yang sudah ada pada Tahun 2020 walapun terjadi perubahan nomenklatur kegiatan yang harus mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Tahun 2021 bertujuan untuk pada Penguatan Data dan Informasi sebagai dasar pondasi untuk melakukan rencana-rencana aksi ke depannya salah satunya dengan target Pembangunan Ekoriparian sebagai wujud nyata pemulihan lingkungan di tingkat tapak.

Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan merupakan kegiatan yang mendukung peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu Koordinasi dan Singkronisasi Penghentian Sumber Pencemar dan Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi.

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Penghentian Sumber Pencemar

Kegiatan ini pada awalnya bertujuan melakukan untuk pemulihan di tingkat tapak melalui Pembangunan Ekoriparian. Dalam penerapannya Ekoriparian merupakan kombinasi kegiatan restorasi sempadan sungai dengan kegiatan penurunan beban pencemaran khususnya dari limbah domestik dan sampah, dan selanjutnya menjadikan tempat tersebut sebagai pusat edukasi lingkungan dan ekowisata sungai disamping itu juga diharapkan sebagai upaya pengendalian banjir.

Pada APBD Murni TA. 2021 target pembangunan fisik ekoriparian direncanakan dapat dilaksanakan pada Tahun 2021 pada lokasi terpilih namun ditinjau dari tata kelola waktu tidak memungkinkan. Untuk itu maka pada Tahun 2021 diputuskan untuk difokuskan pada penyusunan Feasibility Studi Ekoriparian yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar dan Masterplan/DED Ekoriparian yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan sehingga nantinya pelaksanaan fisik pembangunan ekoriparian mempunyai pondasi perencanaan yang kuat.

Pada perkembangan selanjutnya maka Sub Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung Program Sungai Martapura Bungas yang dilaunching pada Tanggal 5 Juni 2021 dan Kick Off pada Tanggal 18 September 2021 sehingga pada APBD Perubahan TA. 2021 termuat pekerjaan yang mendukung Program Sungai Martapura Bungas salah satunya adalah Penyusunan Roadmap Sungai Martapura Bungas.

2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

Kegiatan ini adalah penggabungan dari kegiatan pengelolaan lahan akses terbuka dan pengelolaan ekosistem gambut yang dilakukan pada Tahun 2018, 2019 dan 2020. Pada intinya kegiatan ini untuk mendukung peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) disamping itu juga untuk mendukung Program Sungai Martapura Bungas yang bertujuan meningkatkan kualitas air sungai (IKA) dan mereduksi banjir.

Tujuan dari kegiatan pengelolaan lahan gambut adalah meningkatkan koordinasi dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk secara bersama melakukan upaya-upaya menjaga gambut agar lestari.

Sedangkan tujuan dari kegiatan pengelolaan lahan akses terbuka adalah terindetifikasinya jumlah lahan akses terbuka serta diperolehnya kualitas data dan informasi yang sama antar pemangku kepentingan. Sasaran kegiatan adalah tersedianya data dan informasi jumlah lahan akses terbuka di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun ini difokuskan pada DAS Barito. Pada akhir Tahun 2021 sudah dilakukan aksi nyata penanaman pohon di Lahan Akses Terbuka yang berada di sepanjang Sungai Martapura yang termasuk pada DAS Barito dalam rangka mendukung Program Sungai Martapura Bungas.

Kegiatan pengelolaan lahan gambut sangat terkait dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang sangat mengemuka pada Tahun 2015. Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2015 mengalami kebakaran di lahan gambut di 18.665 Ha atau 13 % dari total luas 148.94 Ha.(Sumber : Rancangan RPPEGD Tahun 2021).

Untuk itu pengelolaan lahan gambut diarahkan untuk menjadi kegiatan pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Pencegahan menjadi prioritas dalam penanggulangan kebakaran. Sebagai pondasinya masyarakat harus diberi pengetahuan yang cukup untuk mengelola gambut secara bijak.

Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan cukup menjadi perhatian, tak terkecuali di sekitaran Obyek Vital Nasional yaitu Bandara Syamsuddin Noor yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya pada musim kemarau. Kondisi demikian menjadi perhatian khusus bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui Operasional Pembasahan Lahan di sekitaran Bandara Syamsudin Noor yaitu di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kota Banjarbaru. Pada Tahun 2021 sudah terbangun Sumur Bor Permanen dan Menara Air di Kelurahan Syamsudin Noor untuk memperkuat pengendalian Karhutla di Obyek Vital Nasional. Selain pada Obyek Vital Nasional, operasional pembasahan lahan juga di laksanakan di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu di Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan dan Balangan.

Terkait pemulihan lahan akses terbuka, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 melakukan identifikasi dan inventarisasi LAT fokus pada wilayah DAS Barito dan wilayah lainnya untuk mempersiapkan data dukung upaya reduksi banjir melalui upaya vegetatif.

Dari hasil identifikasi dan inventarisasi Lahan Akses Terbuka pada Tahun 2021 teridentifikasi seluas total 5059,8 Ha yang terdiri dari LAT di DAS Barito 4447 Ha, Telaga Bauntung 431 Ha, Danau Biru 37,8 Ha dan Pumpung 144 Ha.

Dari hasil identifikasi yang sudah dilakukan sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Teknis Revegetasi di Lahan Akses Terbuka yang dianggarkan pada APBD- Perubahan TA. 2021 seluas 100 Ha berlokasi di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar dengan tujuan sebagai dasar pelaksanaan penanaman di Lahan Akses Terbuka pada Tahun 2022.

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Seksi Pemulihan pada Tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja melakukan 1 (satu) kegiatan utama yaitu :

1. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Penghentian Sumber Pencemar yang pada intinya mendukung peningkatan IKA dan mendukung Program Sungai Martapura Bungas sedangkan Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi pada intinya untuk mendukung pengelolaan ekosistem gambut peningkatan IKU dan IKEG sedangkan pengelolaan lahan akses terbuka untuk mendukung peningkatan IKTL, disamping itu juga untuk mendukung Program Sungai Martapura Bungas.

Selain itu didukung pula dengan dana Tugas Pembantuan dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia, bentuk pemberian tugas yaitu menyelenggarakan Program dan Kegiatan Nasional dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

3.1.4.3. SEKSI PENILAIAN KINERJA LINGKUNGAN

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 58. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Penilaian Lingkungan

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	Peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan	Presentase Perusahaan dengan Peringkat Kinerja Biru dan/atau Hijau	87 % dari 26 perusahaan	18 Perusahaan telah ditetapkan peringkatnya dan 15 Perusahaan telah diverifikasi	100%
2	Meningkatnya akses informasi mengenai kualitas lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Rata-rata Capaian					100%

Indikator pertama yaitu Presentase Perusahaan dengan Peringkat Kinerja Biru dan/atau Hijau ditargetkan 87% dari 18 perusahaan dan terealisasi 100 % dari 18 perusahaan, dengan rincian 2 Perusahaan mendapat peringkat hijau, 16 Perusahaan mendapat peringkat biru untuk Periode penilaian tahun 2021 telah dilakukan penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPERDA) sebanyak 15 Perusahaan yang meliputi Sektor/subsektor : Tambang Batubara, Terminal Khusus Batubara, Pabrik Kelapa Sawit, Energi PLTU, Energi Distribusi, Pakan Ternak, Minyak Goreng dan Jasa Rumah Sakit.

Selain melakukan penilaian di Properda, juga mendapat tugas tambahan berupa penialain kinerja perusahaan secara Nasional (Propernas) sebanyak 71 perusahaan. Mekanisme penilaian Propernas sampai dengan penentuan peringkat biru, melalui tim teknis yang dibentuk oleh KLHK dengan Langkah kegiatan yang meliputi validasi dan evaluasi data, penyusunan buku raport sementara, pengiriman dokumen ke perusahaan, penerimaan sanggahan, dan penyusunan buku raport akhir. Sedangkan untuk proses penetapan peringkat Hijau dan Emas mekanisme penilaiannya melalui dewan Propernas dan Esselon II di Kementerian KLHK. Berdasarkan penilaian Propernas sebanyak 71 perusahaan dengan jumlah ketaatan 90,14 %. Berdasarkan jumlah perusahaan dengan penilaian Propreda dan Propernas sebanyak 89 perusahaan jumlah ketaatan sebesar 93,25 %.

Sistem Peringkat Kinerja PROPER mencakup pemeringkatan perusahaan dalam 5 (lima) peringkat warna yaitu (emas, hijau, biru, merah dan hitam) yang mencerminkan kinerja pengelolaan lingkungan yang meliputi aspek : Pemenuhan ketentuan dalam Dokumen/Izin Lingkungan; Pengendalian Pencemaran Air (PPA);Pengendalian Pencemaran Udara (PPU);Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PLB3) dan Pengendalian Kerusakan Lahan (PKL) – khusus untuk usaha dan/atau kegiatan pertambangan. Perusahaan yang berperingkat merah dan hitam merupakan perusahaan yang **belum taat**, perusahaan berperingkat biru adalah perusahaan - perusahaan yang **taat**, sedangkan perusahaan berperingkat hijau atau emas adalah perusahaan yang pengelolaan lingkungan **lebih dari yang dipersyaratkan** (yang meliputi Aspek : Sistem Manajemen Lingkungan; CSR, Konservasi Air; Effisiensi Energi dan Pengurangan Emisi; Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,Pemanfaatan Limbah Non B3; LCA dan Kebencanaan serta SROI.

Indikator kedua yaitu Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLH) ditargetkan 1 Dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100 %. Dokumen IKPLH merupakan gambaran status lingkungan hidup suatu daerah sekaligus menggambarkan kinerja Gubernur Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 59. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Penilaian Lingkungan

No.	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Menilai kinerja perusahaan dalam pengelolaan kualitas lingkungan	Persentase Perusahaan dengan Peringkat Kinerja Biru dan/atau Hijau	100 % dari 18 perusahaan	87 % dari 18 perusahaan	18 Perusahaan telah ditetapkan peringkat nya dan 15 Perusahaan telah diverifikasi	100%	90 % 26 perusahaan	100%
2	Menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalsel yang Disusun	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%

Indikator pertama yaitu Persentase Perusahaan dengan Peringkat Kinerja Biru dan/atau Hijau Pada tahun 2019 teralisasi ketaatan perusahaan dalam PLH 96,1 % dan pada tahun 2020 realisasi tingkat ketaatan perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 100 % dari 18 perusahaan, sedang penilaian kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2021 telah diverifikasi oleh Tim Teknis Proper sebanyak 15 Perusahaan.

Indikator kedua yaitu Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (IKPLH) ditargetkan 1 Dokumen IKPLH dan terealisasi dengan capaian kinerja 100 %. Penyusunan Dokumen IKPLH dilombakan ditingkat Nasional dengan nama penghargaan Nirwasitantra. pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kal Sel mendapat Juara Harapan 1 dari 34 Provinsi di Indonesia. Sedang untuk tahun 2021 Pemerintah Prov. Kalimantan Selatan kembali masuk jadi kandidat penerima penghargaan Nirwasitantra . Dokumen IKPLH Prov. Kalimantan Selatan telah di presentasikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan melalui video, pengumuman penerima penghargaan akan diumumkan pada bulan Juni tahun 2022.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dinilai melalui PROPERDA dan PROPERNAS pada penilaian dilakukan verifikasi terhadap data dan fakta di lapangan serta penilaian melalui Aplikasi SIMPEL. Perusahaan yang mengikuti PROPERDA Daerah Tahun 2020 sebanyak 18 perusahaan. Terdapat peningkatan peringkat ketaatan perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar 3,6 % pada penilaian Properda Tahun 2020 dibanding tahun 2019. Untuk penilaian properda yang telah diverifikasi tahun 2021 penetapan peringkatnya nanti pada tahun 2022 dengan Dewan Pertimbangan Proper Daerah bersama oleh Tim Teknis Proper Peringkat kinerja.

Pada tabel dibawah ini disajikan hasil peringkat PROPERDA dan PROPERNAS tahun 2020-2021.

Tabel 60. Perusahaan PROPERDA Tahun 2020-2021

NO	NAMA PERUSAHAAN	KAB/KOTA	SUB SEKTOR	PERINGKAT
1	PT. Makmur Sejahtera Wisesa	Tabalong	Energi	HIJAU
2	PT. Arutmin Indonesia – NPLCT	Kotabaru	Telsus Batubara	HIJAU
3	PT. SMART Tbk Unit Tarjun	Kotabaru	Minyak Goreng	BIRU
4	PT. Tapin Coal Terminal	Tapin	Telsus Batubara	BIRU
5	PT. Hasnur Jaya Utama	Tapin	Telsus Batubara	BIRU
6	PT. Talenta Bumi	Barito Kuala	Telsus Batubara	BIRU
7	PT. Hasnur Citra Terpadu	Tapin	Sawit	BIRU
8	PT. Mitratama Perkasa	Tanah Laut	Telsus Batubara	BIRU
9	PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Kotabaru	Kotabaru	Energi Distribusi	BIRU
10	PT. Indonesia Bulk Terminal	Kotabaru	Telsus Batubara	BIRU
11	PT. Bina Indo Raya	Tanbu	Telsus Batubara	BIRU
12	PT. Surya Sakti Darma Kencana	Tanah Laut	Tambang Batubara	BIRU
13	PT. Mandiri Citra Bersama	Tanah Laut	Telsus Batubara	BIRU
14	PT. JAPFA Comfeed Indonesia, Tbk	Tanah Laut	Pakan Ternak	BIRU
15	PT. Semesta Centramas	Balangan	Tambang Batubara	BIRU
16	PT. Astra Agro Lestari	Tabalong	Sawit	BIRU
17	RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh	Banjarmasin	Rumah Sakit	BIRU
18	RSUD Ulin Banjarmasin	Banjarmasin	Rumah Sakit	BIRU

Tabel 61. Peringkat kinerja Perusahaan PROPERNAS Periode Tahun 2020-2021

NO	NAMA PERUSAHAAN	KAB/KOTA	SEKTOR	SUB SEKTOR	Peringkat
1.	PT. ADARO Indonesia	Tabalong	PEM	Tambang Batubara	Emas
2.	PT. Pertamina EP Asset 5 Tanjung Field	Tabalong	PEM	Migas	Hijau
3.	PT. Arutmin Indonesia Tambang Kintap	Tanah Laut	PEM	Tambang Batubara	Hijau
4.	PT. Borneo Indobara	Tanah Bumbu	PEM	Tambang Batubara	Hijau
5.	PT. Arutmin Indonesia Tambang Asam-Asam	Tanah Laut	PEM	Tambang Batubara	Hjau
6.	PT. Pertamina (Persero) TBBM Mareketing Operation Regional VI Integrated Terminal Banjarmasin	Banjarmasin	PEM	Migas Distribusi	Hijau
7.	Pearl Oil Ltd	Kotabaru	PEM	Migas Ekplorasi Produksi	Hijau

8.	PT. Pertamina Mareketing Operation Regional VI Depot Pengisian Pesawat Udara Syamsudin Noor	Banjarbaru	PEM	Migas Distribusi	Hijau
9.	PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin	Tanah Bumbu	PEM	Tambang Batubara	Hijau
10.	PT. Arutmin Indonesia Tambang Senakin	Kotabaru	PEM	Tambang Batubara	Hijau
11.	PT. Jorong Barutama Grestone	Tanah Laut	PEM	Tambang Batubara	Hijau
12.	PT. Indocement Tunggul Prakasa - Tarjun Plant	Kotabaru	MPJ	Semen	Hijau
13.	PT.PLN (Persero) unit pelaksana pengendalian pembangkit barito unit layanan PLTD Barabai	HST	PEM	Energi PLTD	Biru
14.	PT.PLN (Persero) unit pelaksana pengendalian pembangkit barito unit layanan PLTD Panangkalaan	HSU	PEM	Energi PLTD	Biru
15.	PT. Antang Gunung Meratus	Tapin & HSS	PEM	Tambang Batubara	Biru
16.	PT. Sumber Kurnia Buana	Tapin & Banjar	PEM	Tambang Batubara	Biru
17.	PD. Baramarta	Banjar	PEM	Tambang Batubara	Biru
18.	PT. Kadya Caraka Mulia	Banjar	PEM	Tambang Batubara	Biru
19.	PT.PLN (Persero) unit pelaksana pengendalian pembangkit barito unit laksana PLTDG Trisakti	Banjarmasin	PEM	Energi PLTU	Biru
20.	PT. Arutmin Indonesia Tambang Satui	Tanah Laut	PEM	Tambang Batubara	Biru
21.	PT. Wahana Baratama Mining	Tanah Bumbu	PEM	Tambang Batubara	Biru
22.	PT. Tunas Inti Abadi	Tanah Bumbu	PEM	Tambang Batubara	Biru
23.	PT. Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO)	Kotabaru	PEM	Bijih Besi	Biru
24.	PT. Baramega Citra Mulia Persada	Kotabaru	PEM	Tambang Batubara	Biru
25.	PT. PLN (Persero) Wilayah Kalsel dan Kalteng Area Kotabaru PLTD Kotabaru	Kotabaru	PEM	Energi PLTD	Biru
26.	PT. Sinar Kencana Inti Perkasa - PKS Sungai kupang	Kotabaru	AGRO	Sawit	Biru
27.	PT. Smart Tbk-PKS Batu Ampar	Kotabaru	AGRO	Sawit	Biru
28.	PT. Smart Tbk-PKS Bukit Kapur	Kotabaru	AGRO	Sawit	Biru
29.	PT. Bersama Sejahtera Sakti-PKS Gunung Aru	Kotabaru	AGRO	Sawit	Biru
30.	PT. Langeng Muara Makmur PKS Bebunga	Kotabaru	AGRO	Sawit	Biru
31.	PT. Paripurna Swakarsa PKS Pondok Labu	Kotabaru	AGRO	Sawit	Biru
32.	PT. Alam Raya Kencana Mas	Kotabaru	AGRO	Sawit	Biru
33.	PT. Sime Darby Oils Pulau Laut Refinery	Kotabaru	AGRO	Sawit	Biru
34.	PT.Laguna Mandiri PKS Betung Factory	Kotabaru	AGRO	Sawit	Biru
35.	PT. Ladangrumpun Suburabadi - Angsana Plant	Tanah Bumbu	AGRO	Sawit	Biru
36.	PT. Sajang Heulang Mustika Factory	Tanah Bumbu	AGRO	Sawit	Biru
37.	PT. Buana Karya Bhakti	Tanah Bumbu	AGRO	Sawit	Biru
38.	PT. Gawi Makmur Kalimantan PKS Satui	Tanah Bumbu	AGRO	Sawit	Biru
39.	PT. Smart Tbk-PKS Tanah Laut	Tanah Laut	AGRO	Sawit	Biru

40.	PT. Bridgestone Kalimantan Plantation	Tanah Laut	AGRO	Karet	Biru
41.	PT. Gawi Makmur Kalimantan PKS Jorong	Tanah Laut	AGRO	Sawit	Biru
42.	PT.Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Kebun Pelaihari	Tanah Laut	AGRO	Sawit	Biru
43.	PT. Kintap Jaya Watindo	Tanah Laut	AGRO	Sawit	Biru
44.	PT. Pola Kahuripan Inti Sawit	Tanah Laut	AGRO	Sawit	Biru
45.	PT. Basirih Industrial Corporation	Banjarmasin	AGRO	Playwood	Biru
46.	PT. Laguna Mandiri PKS Rantau	Kotabaru	Agro	Sawit	Biru
47.	PT. Banua Lima Sajurus	Banjarmasin	AGRO	Karet	Biru
48.	PT. Insan Bonafide	Banjarmasin	AGRO	Karet	Biru
49.	PTPN. XIII (Persero) Kebun Danau Salak	Banjar	AGRO	Karet	Biru
50.	PT. Darma Kalimantan Jaya	HST	AGRO	Karet	Biru
51.	PT. Karias Tabing Kencana	HSU	AGRO	Karet	Biru
52.	PT. Bumi Jaya	Tabalong	AGRO	Karet	Biru
53.	PT. Indofood Sukses Makmur Noodle Division Banjarmasin	Tanah Laut	Manufacture	Makanan dan Minuman	Biru
54.	PT. Kalimantan Fishery	Banjarmasin	Manufacture	Pengolahan Ikan	Biru
55.	PT. Bhumi Rantau Energi	Tapin	PEM	Tambang Batubara	Biru
56.	PT. Rimbata Kalimantan	Banjar	PEM	Pertambangan dan Penggalangan	Biru
57.	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Barito Unit PLTA IR PM Noor	Banjar	PEM	Energi PLTD	Biru
58.	PT. Talenta Bumi	Barito Kuala	PEM	Stockfile Batubara	Biru
59.	PT. AKR Corporindo Tank Terminal Stagen	Kotabaru	PEM	Migas Distribusi	Biru
60.	PT. AKR Corporindo Tank Terminal Banjarmasin	Banjarmasin	PEM	Migas Distribusi	Biru
61.	PT. Arutmin Indonesia – North Pulau Laut Coal Terminal	Kotabaru	PEM	Pelabuhan Khusus Batubara	Biru
62.	PT. Tanjung Power Indonesia	Tabalong	PEM	PLTU	Biru
63.	PT. Kalimantan Energi Lestari	Kotabaru	PEM	Tambang Batubara	Biru
64.	PT. Wilson Lautan Karet	Banjarmasin	AGRO	Karet	Biru
65.	TBBM PT. Indonesia Bulk Terminal Pulau Laut	Kotabaru	PEM	Migas Distribusi	Biru
66.	PT. Conch South Kalimantan Cement	Tabalong	MPJ	Semen	Merah
67.	PT. Energi Batubara Lestari	Tapin	PEM	Tambang Batubar	Merah
68.	PT. Fumakilla Indonesia – Banjarbaru	Banjarbaru	MPJ	Kimia	Merah
69.	PT. Pancuran Kaapit Sendang	Banjarbaru	MPJ	Makanan dan Minuman	Merah
70.	PT. Maritim Barito Perkasa	Banjarmasin	MPJ	Angkutan Laut	Merah
71.	PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Banjarmasin	Banjarmasin	MPJ	Pelabuhan	Merah

a. Upaya – upaya yang telah dilakukan

Secara Umum Kegiatan penilaian kinerja Perusahaan dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan ini dengan melibatkan tim evaluator Provinsi dan Tim Kabupaten/ Kota, Dewan Proper Provinsi serta Tim Supervisi dari KLHK . Sedang untuk Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan Dinas/ Instansi terkait lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

- Penilaian kinerja Perusahaan Proper melalui aplikasi SIMPEL membutuhkan waktu dan tahapan yang panjang serta diperlukan tenaga berkualifikasi yang punya ketrampilan sebagai evaluator untuk menangani dan mengelola kegiatan ini agar tepat waktu.
- Sebagian besar perusahaan peserta Proper belum memahami kriteria yang dijadikan dasar penilaian dan penggunaan Aplikasi SIMPEL
- Ketersediaan dan Pengolahan data yang disampaikan oleh Dinas dan instansi belum memenuhi standar nilai yang ditetapkan oleh penilaian Nirwasita Tantra.

c. Rencana Tindak Lanjut

- Refreshment terhadap petugas evaluator
- Melaksanakan sosialisasi Permen LHK Nomor 01 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Melakukan sosialisasi sistem Aplikasi SIMPEL ke Perusahaan terkait kriteria penilaian proper dan sistem SIMPEL nya
- Menyerahkan penanganan untuk perusahaan yang mendapat peringkat merah ke bidang Pinaatan dan Peningkatan Kapasitas LH untuk mendapat pembinaan selanjutnya.
- Perbaikan Tata Kelola Data (Tabel Data , Respon dan Inovasi Pengelola Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Dinas dan Instansi terkait) dalam penyusunan Dokumen dengan melalui koordinasi yang instensif dengan Tim pengumpul dan Pengolah Database dari Dinas /Instansi terkait.

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Kegiatan Penilaian kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi aspek : pemenuhan ketaatan ketentuan dalam Dokumen/ Izin Lingkungan; Pengendalian Pencemaran Air (PPA); Pengendalian Pencemaran Udara (PPU); Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PLB3) dan Pengendalian Kerusakan Lahan (PKL) – khusus untuk usaha dan/atau kegiatan pertambangan. Kegiatan Proper ini dalam mendukung peningkatan IKA, IKU, IKAL ,Pengendalian dan Pengelolaan LB3 serta Pengendalian Kerusakan Lahan.

Penyusunan Dokumen IKPLH merupakan hasil rekapitulasi Database IKPLHD, Response /Inovasi yang dilakukan oleh Dinas LH dan Dinas /Instansi terkait untuk menjawab isu-isu strategis terpilih yang merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup daerah provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut sekaligus menggambarkan kinerja Gubernur dalam dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tergambar dalam Dokumen IKPLH tersebut.

3.1.5. BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 62. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

No	Kinerja Utama	Indikator	Target & Capaian 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya ketaatan dunia usaha dalam tata kelola lingkungan hidup	Persentase dunia usaha yang taat terhadap pengelolaan lingkungan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya pengakuan MHA terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100%

Indikator kinerja yakni presentase ketaatan dunia usaha dalam tata kelola lingkungan ditargetkan 100% dan terealisasi 75,9%, dengan capaian kinerja sebesar 75,9%. Kinerja ini diperoleh dari hasil pengawasan langsung terhadap 473 perusahaan yang dilaksanakan oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebanyak 359 adalah taat dan 144 tidak taat. Adapun pengawasan langsung oleh Provinsi sebanyak 25 Perusahaan dan taat 23 Perusahaan atau 92%. Indikator pengawasan lain yaitu peringkat kinerja Perusahaan dengan peserta 86 peserta dengan peringkat merah 6 Perusahaan atau tingkat ketaatan 93%. Tahun 2021 Dinas Lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan menerima 17 pengaduan yang kesemuanya telah di tindaklanjuti berupa 11 kasus dilimpahkan kepadapihak yang berwenang dan 6 kasus diselesaikan dengan 1 kasus Sanksi Administrasi.

Adapun Indikator kinerja presentase masyarakat hukum adat dan kearifan lokal yang teridentifikasi dan diakui ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 63. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala BidangPenaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya ketaatan dunia usaha dalam tata kelola lingkungan hidup	Persentase dunia usaha yang taat terhadap pengelolaan lingkungan	100%	100%	75,9%	75,9%	80%	100%
2	Meningkatnya pengakuan MHA terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja Persentase dunia usaha yang taat terhadap pengelolaan lingkungan pada tahun 2021 terealisasi 75,9%. Realisasi terhadap akhir renstra yaitu sebesar 94,9%. Sedangkan Kinerja Kedua Presentasi MHA yang diakui terkait dengan PPLH pada tahun 2021 terealisasi 100% yang merupakan 100% dari targert akhir renstra.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup tersebut secara rata-rata sebesar 87,95%. Tingkat ketaatan ini ditunjang dengan upaya pembinaan, pengawasan, penegakan hukum dan penanganan pengaduan kasus serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dilaksanakan secara terpadu dan intensif terhadap dunia usaha dalam tata kelola lingkungan.

Dalam melaksanakan kinerja di bidang Penaatan dan peningkatan Kapasitas LH, terdapat upaya yang telah dilakukan, hambatan dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

a. Upaya yang telah dilakukan

- Secara umum kegiatan penanganan kasus LH dan penegakan hukum lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik. Apabila adanya pengaduan kasus lingkungan hidup, Tim akan langsung memproses pengaduan kasus dan melakukan verifikasi dan/atau tindak lanjut ke lokasi dugaan kasus lingkungan hidup juga akan

berkoordinasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- Secara umum kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2021 terlaksana dengan baik.
- Secara umum kegiatan Identifikasi & Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan Identifikasi & Inventarisasi MHA dan kearifan lokal telah dilaksanakan pada 12 Kab/ Kota dengan Jumlah 6 Balai Adat dan 6 Kearifan Lokal. Selanjutnya penyusunan laporan Identifikasi & Inventarisasi yang telah dilaksanakan dan teridentifikasi oleh dinas. Target penyusunan laporan identifikasi & inventarisasi dapat mencapai 100%.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Tingkat ketaatan secara umum baru mencapai 87,95%. Hambatan utama berasal dari tingkat ketaatan pelaku usaha yang baru mencapai 75,9% karena Sumber Daya Manusia pengelola lingkungan pada masing-masing Perusahaan yang belum mengetahui terhadap ketentuan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Kendala lain adalah keterbatasan jumlah personil Dinas Lingkungan hidup dalam bidang pengawasan yang masih terbatas. Belum memiliki Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang berwenang terhadap penentuan taat dan tidak taat suatu kegiatan usaha/Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

c. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor:22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Meningkatkan sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.
- Mengusulkan kursus executif PPNS lingkungan hidup bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup.

- Pengaduan kasus lingkungan hidup yang kurang didukung bukti-bukti, dimintakan agar mereka lebih melengkapi data sehingga dapat dilanjutkan untuk melakukan klarifikasi/verifikasi.
- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang kompeten sebagai pengawas, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara intensif dan berkelanjutan serta perlunya meningkatkan koordinasi dengan tim pengawasan DLH Kabupaten/Kota.
- Koordinasi kepada SKPD terkait untuk mengumpulkan data dan informasi aktivitas MHA dan Kearifan Lokal, serta mendorong Kabupaten/Kota untuk menyediakan alokasi anggaran dan kegiatan terkait MHA dan Kearifan Lokal.

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program penunjang kinerja adalah

1. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup dengan kegiatan (1) penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Provinsi dan (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup diluar Pengadilan atau melalui pengadilan.
3. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH kegiatan Pengakuan MHA dan kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.

3.1.5.1. SEKSI PENGADUAN KASUS LH DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 64. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pengaduan Kasus LH dan Penegakan Hukum

No	Kinerja Utama	Indikator	Target & Capaian 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya penyelesaian terhadap kasus lingkungan hidup.	1 Persentase penyelesaian kasus hukum (sanksi) LH	100%	100%	100%
		2 Persentase penyelesaian kasus LH yang dilimpahkan pada pihak berwenang	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100%

Indikator pertama yaitu Presentase penyelesaian kasus hukum (sanksi) LH yang ditindaklanjuti/diverifikasi ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja 100%.

Indikator kedua yaitu Presentase penyelesaian kasus LH yang di limpahkan pada pihak yang berwenang ditargetkan 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 65. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Pengaduan Kasus LH dan Penegakan Hukum

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya penyelesaian terhadap kasus lingkungan hidup.	1 Persentase penyelesaian kasus LH yang dilimpahkan pada pihak yang berwenang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Persentase tindak lanjut (penanganan) kasus LH	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian pada indikator persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup yang dilimpahkan pada pihak berwenang di tahun 2021 terealisasi sebesar 100% (11 dilimpahkan dari 11 kasus pengaduan).

Capaian pada indikator persentase tindak lanjut (penanganan kasus LH) tahun 2021 sebesar 100% (6 diselesaikan dari 6 kasus pengaduan).

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pengaduan/penyelesaian kasus yang diverifikasi sebanyak 17 kasus pengaduan. Sebanyak 11 kasus dilimpahkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kab/Kota dan Pusat. Sebanyak 6 kasus diselesaikan oleh Dinas LH. Prov. Kalsel. Sebelas (11) kasus yang dilimpahkan terdiri dari :

Tabel 66. Daftar Perusahaan Pengaduan yang dilimpahkan

NO	NAMA PERUSAHAAN	DUGAAN MASALAH YANG DIADUKAN
1	PT. Sinar Nusantara Industries (lanjutan 2020)	Debu dan kebisingan
2	PT. Makmur Sentosa Wisesa	Debu dan Kebisingan
3	PT. Tanjung Power Indonesia	Debu dan Kebisingan
4	PT. PLTU Site Asam – Asam (pendampingan KLHK)	Pendampingan pengawasan penataan pelaksanaan Sanksi Administrasi
5	PT. Basirih Industrial (pendampingan pengambilan sampel dari KLHK)	Pengambilan sampel abu dan debu boiler
6	PT. Astra Agro Lestrai Tabalong	Adanya pencemaran air
7	Pertenakan bebek Tapin	Bau dari perternakan bebek
8	Penggilingan padi Kab. Banjar	limbah yang di hasilkan mengganggu dan mengakibatkan pencemaran udara berupa Debu dedak yang berterbangan kemana mana
9	PT. Borneo Intan Prima Mandiri	Kerusakan rumah warga akibat aktivitas penambangan
10	PT. Conch South Kalimantan	Adanya pencemaran udara (debu)
11	PT. Bara Pramulia Abadi	Adanya pencemaran udara (debu)

Tabel 67. Daftar Perusahaan diselesaikan oleh Dinas LH. Prov. Kalsel

- Enam (6) kasus diselesaikan oleh Dinas LH. Prov. Kalsel

NO	NAMA PERUSAHAAN	DUGAAN MASALAH YANG DIADUKAN
1	KUD Karya Murni	Pencemaran Sungai
2	PT. Antang Gunung Meratus	Pencemaran sungai
3	PT. Banjar Intan Mandiri	Pengaduan Masyarakat terhadap aktifitas pengangkutan batubara
4	PT. Arutmin Indonesia Site Kintap	Adanya dumpling limbah ke media lingkungan hidup mencemari air Desa Sumber jaya, limbah mengenai kebun karet
5	PT. Tanjung Alam Jaya	Limbah batubara yang datang dari stokfile
6	PT. Dwi Guna Laksana	Tindak lanjut hasil pengawasan

Dalam melaksanakan kinerja Seksi Pengaduan Kasus LH dan Penegakan Hukum, terdapat upaya yang telah dilakukan, hambatan dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

a. Upaya yang telah dilakukan :

Secara umum kegiatan penanganan kasus dan penegakan hukum lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup, Tim akan langsung verifikasi dan/atau tindak lanjut ke lokasi dugaan kasus lingkungan hidup juga akan berkoordinasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan pihak yang diadukan.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Secara umum tidak ada hambatan dalam pencapaian kinerja, namun pengaduan kasus lingkungan hidup oleh masyarakat terkadang tidak didukung oleh bukti yang kuat, sehingga harus dilakukan verifikasi ulang. Jumlah PPLH juga terbatas baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota yang berdampak pada lambatnya penanganan kasus.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dalam hal perbaikan kinerja, untuk melakukan penanganan kasus dan penegakan hukum lingkungan hidup di perlukan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Nomor 101 Tahun 2014
2. Pengadaan tenaga Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
3. Mengusulkan kursus executif PPNS lingkungan hidup bagi aparatur Kabupaten/Kota
4. Pengaduan kasus lingkungan hidup yang kurang didukung bukti bukti, dimintakan agar mereka lebih melengkapi datadata sehingga dapat dilanjutkan melakukan klarifikasi/verifikasi
5. Penanganan kasus lingkungan hidup yang sudah lama terjadi, dilakukan penyidikan secara intensif dengan menggali sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program penunjang kinerja adalah Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan penegakan hukum lingkungan dan penanganan kasus lingkungan hidup.

3.1.5.2. SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LH

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 68. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan LH

No	Kinerja Utama	Indikator	Target & Capaian 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik izin lingkungan dan izin PPLH	Persentase Perusahaan yang diawasi mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup	100%	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian					100%

Indikator persentase perusahaan yang diawasi mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ialah sebesar 100% (25 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) sedangkan realisasi yang

tercapai pada tahun 2021 ialah sebesar 100% (25 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan).

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 69. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan LH

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya dunia usaha yang menerapkan dokumen lingkungan	Persentase dunia usaha yang menerapkan dokumen lingkungan	22 Perusahaan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase dunia usaha yang memenuhi kriteria lebih dari yang disyaratkan		14%	95%	95%	20%	95%

Jumlah Perusahaan yang bergerak di sektor Pertambangan, Perkebunan dan Industri di Kalimantan Selatan yang diawasi kebijakan Lingkungan Hidup pada tahun 2016 tercapai 40 perusahaan; 2017 tercapai 32 perusahaan; 2018 tercapai 30 perusahaan; 2019 tercapai 32 perusahaan ; 2020 tercapai 22 perusahaan.

Indikator kinerja Persentase dunia usaha yang taat terhadap pengelolaan lingkungan pada tahun 2021 terealisasi 75,9%. Realisasi terhadap akhir renstra yaitu sebesar 94,9%.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- Jumlah/ kuantitas kegiatan usaha dan kegiatan yang diawasi terhadap capaian target akhir renstra tercapai sebesar 75,9% dari jumlah pengawasan (473 perusahaan) yang izinnnya diterbitkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota.
- Analisis peningkatan kinerja berdasarkan tahun capaian target tiap tahun sejak awal tahun renstra, terjadi kecenderungan peningkatan pada tahun 2020 sebesar 8,8% s/d 2021 akhir renstra sebesar 10%.
- Peningkatan kinerja terhadap jumlah kegiatan usaha yang diawasi dan dilakukan pembinaan untuk mencapai nilai ketaatan terhadap ketentuan/ peraturan dan/atau izin yang telah ditetapkan

Kecenderungan penurunan kinerja terhadap perubahan jumlah/ kualitas kegiatan usaha yang yang di awasi dan dilakukanan

pembinaan Analisis yang terjadi terhadap berkurangnya jumlah perusahaan yang diawasi dan dibina berdasarkan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup untuk tujuan penetapan kewenangan terhadap kegiatan usaha/ perusahaan yang tidak taat.

Pada tahun 2021, Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dilakukan terhadap 25 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. 25 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut ialah sebagai berikut :

1. PT. Jorong Barutama Greston (Tanah Laut)
2. PT. Surya Sakti Darma Kencana (Tanah Laut)
3. PT. Palmina Utama (Kab Banjar)
4. PT. Sumber Kurnia Buana Kab Tapin
5. PT. Antang Gunung Meratus Kab Tapin.
6. PT. Simerdarby Oil Pulau Laut (Refinerry Palm Oil) Kab Kotabaru
7. PT. Monrad Intan Barakat
8. Pabrik Tahu Kab Banjar
9. PT. Tanjung Alam Jaya Kab Banjar
10. PT. Bhumi Rantau Energi Kab Tapin
11. PT. Prolindo Clpta Nusantara
12. PT. Hasnur Citra Terpadu Kab Tapin
13. PT. Arutmin Asam-Asam Kab Tanah Laut
14. PT. Subur Agro Makmur Kabupaten HSS
15. PT. Alfa Riung Jaya Kabupaten Tanah Laut
16. KUD Karya Murni Kabupaten HSS
17. PT. Sebamban Terminal Utama Kabupaten Tanah Bumbu
18. PT. Borneo Indobara kab Tanah Bumbu
19. PT. Kalimantan Energi Lestari Kab Kotabaru
20. PT. Semesta Centramas/ Balangan Coal Kab Balangan
21. PT. Angsana Jaya Energi Kab Tanah Bumbu
22. PT. sebuku tanjung coal kab kotabaru
23. PT. Indocement tunggal prakasa tbk kab kotabaru
24. PT. Pelsart kab kotabaru
25. PT. Sebuku batubai coal kab kotabaru

Berdasarkan hasil pengawasan langsung terdapat 25 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, terdapat 23 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 2 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan lainnya masih tidak taat terhadap pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kinerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, terdapat upaya yang telah dilakukan, hambatan dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

a. Upaya yang telah dilakukan

- Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2021 terlaksana dengan baik.
- Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2021 sudah terlaksana dengan optimal. indikator persentase kinerja pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup ialah sebesar 100% (25 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) sedangkan realisasi capaian kinerja pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup ialah sebesar 100% (25 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan).

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

- Secara umum tidak ada hambatan dalam pencapaian kinerja karena kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dapat melebihi target yang ditentukan.
- Kendala adalah keterbatasan jumlah personil Dinas Lingkungan hidup dalam bidang pengawasan yang masih terbatas. Belum memiliki Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang berwenang terhadap penentuan taat dan tidak taat suatu kegiatan usaha/Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

c. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan lingkungan hidup lain yang masih berlaku saat ini.
- Mengusulkan kursus/ pelatihan teknis terkait PPLHD bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup.

- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang kompeten sebagai pengawas, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara intensif dan berkelanjutan serta perlunya meningkatkan koordinasi dengan tim pengawasan DLH Kabupaten/Kota.
- Koordinasi kepada SKPD terkait untuk mengumpulkan data dan informasi Kegiatan pembinaan dan pengawasan LH.

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

- Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi
- Dalam menunjang tercapainya kinerja kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup secara terus menerus, maka perlunya dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pembinaan dan pengawasan. Selain itu, perlunya dilakukan koordinasi dengan tim pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara intensif dan berkelanjutan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

3.1.5.3. SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERATURAN HUKUM LH

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 71. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Peraturan Hukum LH

No	Kinerja Utama	Indikator	Target & Capaian 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan pengetahuan tradisional dan masyarakat hukum adat	1 Jumlah MHA dan kearifan lokal terkait PPLH	6 Balai Adat	6 Balai Adat	100%
2	Melaksanakan peningkatan Kapasitas SDM terhadap PPLH	2 Persentase peserta sosialisasi/bimtek/seminar yang memahami tentang PPLH	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100%

Perbandingan realisasi dengan target yang dicapai oleh Kasi Peningkatan Kapasitas dan Peraturan Lingkungan Hidup pada tahun 2021 adalah :

- a. Jumlah peningkatan pengetahuan tradisional dan masyarakat hukum adat dilakukan pada 6 Balai Adat pada Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal yang ada di Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan. Jumlah Balai Adat yang ditetapkan sebagai target sebanyak 6 Balai Adat dan terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan (100 %).
- b. Sosialisasi tentang MHA dan Kearifan Lokal terealisasi sesuai target (100%), yang mana sosialisasi dilaksanakan pada 6 Balai Adat dan pada saat bersamaan dihadiri juga oleh ASN Dinas LH Kabupaten.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 72. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Peraturan Hukum LH

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2020	Target & Capaian 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatkan pengetahuan tradisional dan masyarakat hukum adat	1 Jumlah MHA dan kearifan lokal terkait PPLH	10 Balai Adat	6 Balai Adat	6 Balai Adat	100%	6 Kelompok	100%
2	Melaksanakan peningkatan Kapasitas SDM terhadap PPLH	2 Persentase peserta sosialisasi/bimtek/seminar yang memahami tentang PPLH	100%	100%	100%	100%	-	100%

- a. Pada Tahun 2021 ditargetkan 6 Balai Adat yang teridentifikasi, realisasinya tercapai 6 Balai Adat sesuai dengan target yang ditetapkan.
- b. Kegiatan sosialisasi pada tahun 2021 dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tema “Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengakuan dan Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat”. Target sosialisasi sebanyak 1 (satu) kegiatan dan terealisasi 100%. Sosialisasi secara *insitu* dilakukan terhadap 6 (enam) Balai Adat, yaitu sebagai berikut:

No.	MHA teridentifikasi tahun 2021	Lokasi (Desa, Kecamatan, Kab)
1	Kab Kotabaru Nama MHA: a. Suku Dayak Meratus (Balian)	a. Desa Hampang Kec. Hampang
2	Kab Tanah Bumbu Nama MHA: a. Suku Dayak Meratus (Alut/Karya Sepakat)	a. Desa Gunung Raya Kec. Mantewe
3	Kab Tapin Nama MHA: a. Suku Dayak Meratus (Harakit)	a. Desa Harakit Kec. Piani
4	Kab Balangan Nama MHA: a. Suku Dayak Pitap	a. Desa Langkap, Desa Mayanau, Desa Iyam, Desa Ajung, Desa Kambiyain, Kec. Tebing Tinggi
5	Kab Tabalong Nama MHA: a. Suku Dayak Maanyan (Waruken)	a. Desa Waruken Kec. Tanta
6	Kab. Tanah Laut Nama MHA : a. Suku Dayak Biaju	a. Desa Riam Andungan Kec. Kintap

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Hasil dari Koordinasi Identifikasi & Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 sebanyak 12 Balai Adat dan Kearifan Lokal telah teridentifikasi sebagai berikut :

Tabel 73. Data Inventarisasi MHA

No.	MHA teridentifikasi tahun 2021	Lokasi (Desa, Kecamatan, Kab)
1	Kab Kotabaru Nama MHA: a. Suku Dayak Meratus (Balian)	a. Desa Hampang Kec. Hampang
2	Kab Tanah Bumbu Nama MHA: a. Suku Dayak Meratus (Alut/Karya Sepakat)	a. Desa Gunung Raya Kec. Mantewe
3	Kab Tapin Nama MHA: a. Suku Dayak Meratus (Harakit)	a. Desa Harakit Kec. Piani
4	Kab HSS Nama MHA: a. Suku Dayak Meratus (Malaris)	a. Desa Loklahung Kec. Loksado b. Desa Malinau Kec. Loksado

	b. Suku Dayak Meratus (Bidukun) c. Suku Dayak Meratus (Padang) d. Suku Dayak Meratus (Jalai)	c. Desa Malinau Kec. Loksado d. Desa Loklahung, Desa Malinau Kec. Loksado
5	Kab HST Nama MHA: a. Suku Hindu Dayak (Kiyu)	a. Desa Hinas Kiri Kec. Batang Alai Timur
6	Kab Balangan Nama MHA: a. Suku Dayak Pitap	a. Desa Langkap, Desa Mayanau, Desa Iyam, Desa Ajung, Desa Kambiyain, Kec. Tebing Tinggi
7	Kab Tabalong Nama MHA: a. Suku Dayak Maanyan (Waruken)	a. Desa Waruken Kec. Tanta
8	Kab Banjar Nama MHA: a. Suku Dayak Kaharingan	a. Desa Paramasan Kec. Paramasan
9.	Kab. Tanah Laut Nama MHA : a. Suku Dayak Biaju	a. Desa Riam Andungan Kec. Kintap

Dalam melaksanakan kinerja Seksi PKPLH, terdapat upaya yang telah dilakukan, hambatan dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

a. Upaya yang telah dilakukan

- Secara umum kegiatan Identifikasi & Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan Identifikasi & Inventarisasi MHA dan kearifan lokal telah dilaksanakan pada 12 Kab/ Kota dengan realisasi 12 Balai Adat dan Kearifan Lokal.
- Pencapaian realisasi pada seksi Peningkatan Kapasitas dan Peraturan Lingkungan Hidup, diakibatkan karena kerja sama yang sangat baik antara kepala bidang, kasi dan staf, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Koordinasi yang intensif dengan Kabupaten terkait memberi andil yang tidak kalah penting dalam pencapaian realisasi kegiatan.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Secara umum tidak ada hambatan dalam pencapaian kinerja karena sudah dilaksanakan sesuai perencanaan dan target yang ditetapkan. Alokasi anggaran pada program/kegiatan terkait MHA di beberapa Kabupaten belum memadai. Hal ini menyebabkan pelaksanaan identifikasi MHA dan Kearifan Lokal yang dilaksanakan oleh Kabupaten menjadi sedikit terhambat, sehingga data dan informasi terkait MHA yang dihimpun oleh DLH Provinsi sedikit terkendala.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dalam hal perbaikan kinerja, untuk melakukan inventarisasi MHA dan Kearifan Lokal diperlukan koordinasi dan penggalan data yang lebih mendalam mengenai masyarakat hukum adat dan kearifan lokal. Untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan tindak lanjut sosialisasi kepada kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan dan memperluas cakupan sosialisasi terhadap MHA untuk meningkatkan pemahaman atas hak masyarakat hukum adat dan upayanya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu perlu dilakukan koordinasi intensif kepada SKPD terkait dalam hal data dan informasi aktivitas MHA dan Kearifan Lokal, serta mendorong Kabupaten/Kota untuk menyediakan alokasi anggaran program/ kegiatan terkait MHA dan Kearifan Lokal.

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program penunjang kinerja adalah belum adanya fasilitas di seksi Peningkatan Kapasitas SDM dan Peraturan Lingkungan Hidup baik berupa Komputer sebagai alat operasional administrasi kantor, yang selama ini kami menggunakan fasilitas pribadi, kurangnya pengetahuan staf tentang apa itu MHA dan Kearifan Lokal, hal ini dikarenakan masih rendahnya kompetensi yang dimiliki staf, serta latar belakang yang berbeda, maka diperlukan Pelatihan Peningkatan Wawasan Pengetahuan.

Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja, yaitu:

- Meningkatkan koordinasi antar dinas terkait MHA dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten/ Kota sehingga kegiatan dapat berjalan searah.
- Perlunya pembinaan lebih lanjut dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat adat di pedalaman.
- Melaksanakan BINTEK terhadap petugas baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota sehingga mereka betul-betul dapat mengerti dan paham tentang masyarakat adat di daerah masing-masing.
- Berupaya mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk mencapai target lebih maksimal karena lokasi MHA yang letaknya dipedalaman sehingga perlu dukungan anggaran yang cukup.

3.1.6. UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN

3.1.6.1 KEPALA UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 74. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatkan kepuasan Pelanggan Terhadap Hasil Pengujian	1 Tingkat kepuasan pelanggan	A (sangat baik)	A (sangat baik)	A (Sangat Baik) 89,17 %
2	Meningkatkan PAD dari Laboratorium Lingkungan	2 Persentase Peningkatan Target PAD dari Laboratorium Lingkungan	20 % Rp.500 juta	Rp.1.138.058 Juta	227,61 %

Indikator pertama yaitu Tingkat Kepuasan Pelanggan yang ditargetkan A (sangat baik : interval 88,31 - 100) dan terealisasi A (Sangat Baik = 89,17%)

Indikator kedua yaitu Persentase Peningkatan Target PAD pada penerimaan jasa pengujian dari Laboratorium Lingkungan yang ditargetkan 20% dari target tahun sebelumnya yaitu Rp. 500.000.000,00 terealisasi di tahun 2021 sebesar Rp.1.138.058.000,00 capaian sebesar 227,61 %, yang terdiri dari penerimaan eksternal yaitu penerimaan berupa uang jasa pengujian berasal dari pelanggan dan disetorkan ke KAS Negara sebesar Rp.906.086.000,00 dan penerimaan internal yaitu berupa catatan penerimaan yang jasa pengujian yang digratiskan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dan UPT. TPAS Regional Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 231.972.000,000.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 75. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2019	Capaian Thn 2020	Target 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Terhadap hasil Pengujian	1 Tingkat Kepuasan Pelanggan	84,70 %	89,90 %	A Sangat Baik (88,31 -100%)	A Sangat Baik (89,17)	A Sangat Baik	B Baik (76,61-88,3%)	A Sangat Baik
2	Meningkatkan PAD dari Laboratorium Lingkungan	2 Persentase Peningkatan Target PAD dari Laboratorium Lingkungan	Rp. 357.435.000	Rp. 450.008.000	Rp. 500.000.000	Rp. 1.138.058.000	227,61 %	Rp. 1.236.000.000	182,25 %

Indikator pertama yaitu Tingkat Kepuasan Pelanggan terealisasi pada tahun 2021 dengan nilai indeks 3,43, nilai dasar sebesar 85,71 % dengan Mutu Pelayanan A sehingga capaian Sangat Baik.

Indikator kedua yaitu Persentasi Peningkatan Target PAD dari Laboratorium Lingkungan pada tahun 2021 terealisasi Rp. 1.138.058.000,00,- dari target Rp. 500.000.000,- sehingga capaian sebesar 227,61 %. Sumber penerimaan berasal dari eksternal yaitu jasa pengujian berasal dari pelanggan dan disetorkan ke KAS Negara sebesar Rp.906.086.000,00 dan penerimaan internal yaitu penerimaan jasa pengujian yang digratiskan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dan UPT. TPAS Regional Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 231.972.000,000. Target akhir renstra pada peningkatan target PAD sebesar Rp.1.236.000.000,-' realisasi adalah sebesar Rp. 2.252.594.000,- atau 182,25 % (hasil dari PAD tahun 2017 sebesar Rp. 103.603.000,-; tahun 2018 sebesar Rp. 203.490.000,-; tahun 2019 sebesar Rp. 357.435.000,-; tahun 2020 sebesar Rp.450.000.008.000,-; tahun 2021 sebesar Rp. 1.138.058.000,-)

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

UPT. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan terregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka UPT. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan telah berketetapan untuk melaksanakan pengelolaan Laboratorium Lingkungan berdasarkan ISO/IEC 17025:2017 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2020 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan

UPT Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan sangat membutuhkan penambahan PNS. Karena selama ini pejabat Bendahara masih berasal dari PNS Dinas Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian juga pengelola barang dan admin berbagai aplikasi perencanaan dan pelaporan masih dirangkap oleh analis laboratorium.

Laboratorium telah meminta tambahan PNS ke BKD Provinsi Kalimantan Selatan, sampai dengan tahun 2021 terdapat penambahan 2 (dua) orang PNS teknis.

Sarana dan prasarana yang dimiliki UPT. Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan masih kurang terutama berupa gedung kantor, peralatan laboratorium dan peralatan kantor. Saat ini laboratorium masih menggunakan gedung kantor milik Dinas Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan luasan ruang yang terbatas untuk pengembangan laboratorium lebih lanjut.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0703/KUM/2021 tanggal 1 Nopember 2021 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) memperoleh fleksibilitas pengelolaan keuangan meliputi:

- pengelolaan pendapatan dan biaya
- pengelolaan kas
- pengelolaan utang
- pengelolaan piutang
- pengelolaan investasi
- pengadaan barang dan/atau jasa
- pengelolaan barang
- pelaporan dan pertanggungjawaban
- penyusunan akutansi
- pengelolaan surplus dan devisa
- kerjasama dengan pihak lain
- mempekerjakan tenaga non Pegawai negeri Sipil (PNS)
- pengelolaan dana secara langsung
- perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan

a. Upaya – upaya yang telah dilakukan

- Mempertahankan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelayanan prima.
- Peningkatan kualitas laboratorium melalui manajemen laboratorium sesuai dengan ISO/IEC 17025:2017 dan SNI serta perundangan-undangan yang berlaku.
- Peningkatan promosi melalui media sosial serta sosialisasi kepada institusi berkepentingan dengan laboratorium lingkungan.
- Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan-pelatihan
- Mengusulkan pembangunan gedung laboratorium lingkungan yang terpisah dari bangunan kantor Dinas LH. Prov. Kalsel.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Secara umum tidak ada hambatan dalam pencapaian kinerja pada UPT Laboratorium Lingkungan. Namun untuk peningkatan pencapaian kinerja yang lebih baik diperlukan dukungan sarana yang lebih memadai.

c. Rencana Tindak Lanjut

Mengusulkan kembali pengadaan gedung Laboratorium Lingkungan yang terpisah dari kantor Dinas LH Prov. Kalsel untuk dapat meningkatkan jumlah pengujian dan pelanggan sehingga dapat meningkatkan PAD.

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Kinerja tersebut dapat dicapai melalui program sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - f. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan

- h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur
 - b. Pengadaan Pakaian Kerja dan Hari-hari Tertentu
- 4. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan :
 - a. Standarisasi dan Sertifikasi Laboratorium Lingkungan
 - b. Penyelenggaraan Pengujian dan Pengambilan Sampel Lab Lingkungan
 - c. Pengadaan Alat-alat Lab Lingkungan

3.1.6.2 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 76. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Laboratorium Lingkungan

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%
2	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana yang disusun	4 dokumen	5 dokumen	125%
		Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	2 Laporan	11 Laporan	367%
3	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	20 orang	57 orang	285%
4	Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan UPT laboratorium lingkungan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun	6 laporan	24 laporan	400%
Rata-rata Capaian					102%

Indikator pertama yaitu Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan ditargetkan 100 % dan realisasi 100 % dengan capaian kinerja 100 %.

Indikator kedua yaitu Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana yang disusun ditargetkan 4 dokumen, realisasi 5 dokumen sehingga capaian 125 %.

Indikator ketiga yaitu Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat target sebanyak 2 laporan, realisasi sebanyak 11 laporan dengan capaian kinerja 367%.

Indikator keempat yaitu Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib ditargetkan sebanyak 20 orang Pegawai Negeri Sipil, realisasi sebanyak 57 orang PNS, capaian kinerja 285 %.

Indikator kelima yaitu Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun, target sebanyak 6 laporan, realisasi sebanyak 24 laporan, capaian kinerja 400%.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 77. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Laboratorium Lingkungan

No	Kinerja Utama	Indikator	Realisasi		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra
			2019	2020	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	100%	24 Dokumen	21%
		Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	11 Laporan	100%	12 Laporan	92%
3	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	5 orang	6 orang	20 orang	57 orang	100%	30 Orang	190%
4	Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan UPT laboratorium lingkungan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun	4 laporan	6 laporan	6 laporan	24 laporan	100%	24 Laporan	100%

Indikator pertama yaitu persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan pada tahun 2021 teralisasi 100 % dengan capaian kinerja 100 %.

Indikator kedua yaitu Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana yang disusun pada tahun 2021 terealisasi 5 dokumen sehingga capaian 125 %.

Indikator ketiga yaitu Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat tahun 2021 terealisasi sebanyak 11 laporan dengan capaian kinerja 367 %.

Indikator keempat yaitu Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib tahun 2021 teralisasi sebanyak 57 orang PNS, capaian kinerja 285 %.

Indikator kelima yaitu Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun tahun 2021 terealisasi sebanyak 24 laporan, capaian kinerja 100 %.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Sebagian besar realisasi kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam hal program dan kegiatan, anggaran, administrasi perkantoran, kepegawaian, penyediaan sarana dan prasarana serta administrasi keuangan telah berjalan dengan baik.

Selain itu, Sub Bagian Tata Usaha juga melakukan kegiatan administrasi berupa administrasi pelayanan pelanggan meliputi penerimaan sampel pelanggan, administrasi keuangan untuk penerimaan serta pengetikan dan pelaporan hasil uji, yang turut menunjang kinerja laboratorium secara keseluruhan.

a. Upaya – upaya yang telah dilakukan

- Optimalisasi penggunaan sumber daya (SDM, bahan, peralatan) untuk memastikan pelaksanaan administrasi perkantoran dan pelayanan pelanggan dapat berjalan sesuai dengan prosedur.
- Memastikan pelaksanaan administrasi perkantoran dan pelayanan pelanggan memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dan termutakhir.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

- Secara umum tidak ada hambatan dalam pencapaian kinerja pada Sub Bagian Tata Usaha UPT. Laboratorium Lingkungan DLH Prov. Kalsel.

c. Rencana Tindak Lanjut

- Dengan adanya perubahan status UPT. Laboratorium Lingkungan DLH Prov. Kalsel sebagai BLUD, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap pelaksanaan administrasi perkantoran dan pelayanan pelanggan agar memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Mengajukan usulan penambahan PNS terutama untuk menempati posisi Bendahara dan Pengurus Barang yang wajib ditempati oleh PNS.

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja adalah :

1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Makanan dan Minuman
6. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
10. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.1.6.3 KEPALA SEKSI PENGUJIAN

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 78. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pengujian UPT. Laboratorium Lingkungan

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	Menyelenggarakan pengujian dan pengambilan sampel laboratorium lingkungan	Jumlah sampel pelanggan yang dapat diambil/diuji	1000 sampel	1966 sampel	196,6 %
2	Meningkatkan jumlah parameter pengujian	Jumlah parameter yang dapat diuji	58 parameter	64 parameter	110,3 %
3	Merencanakan dan mengadakan peralatan laboratorium lingkungan	Jumlah pengadaan peralatan laboratorium lingkungan	4 unit	4 unit	100 %
Rata-rata Capaian					135,63 %

Indikator pertama yaitu jumlah sampel pelanggan yang dapat diambil/diuji ditargetkan 1000 sampel dan terealisasi sebanyak 1966 sampel, sehingga capaian kinerja sebesar 196,6 %.

Indikator kedua yaitu jumlah parameter yang dapat diuji ditargetkan sebanyak 58 parameter dan terealisasi 64 parameter sehingga capaian kinerja sebesar 110,3 %.

Indikator ketiga yaitu jumlah pengadaan peralatan laboratorium lingkungan ditargetkan 4 unit dan terealisasi sebanyak 4 unit, sehingga capaian kinerja 100%.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 79. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Kepala Seksi Pengujian UPT Laboratorium Lingkungan

No	Kinerja Utama	Indikator	Realisasi		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2020 terhadap target akhir renstra
			2019	2020	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Menyelenggarakan pengujian dan pengambilan sampel laboratorium lingkungan	Jumlah sampel pelanggan yang dapat diambil/diuji	930 sampel	1092 sampel	1000 sampel	1966 sampel	196,6 %	2215 sampel	88,76 %
2	Meningkatkan jumlah parameter pengujian	Jumlah parameter yang dapat diuji	36 parameter	55 parameter	58 parameter	64 parameter	110,3 %	30 parameter	213,33 %
3	Merencanakan dan mengadakan peralatan laboratorium lingkungan	Jumlah pengadaan peralatan laboratorium lingkungan	15 unit	9 unit	4 unit	4 unit	100 %	58 unit	15,52 %

Indikator pertama yaitu jumlah sampel pelanggan yang dapat diambil/diuji pada tahun 2019 terealisasi sebanyak 930 sampel, pada tahun 2020 terealisasi sebanyak 1.092 sampel dan pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 1.966 sampel, terdiri dari 1.668 sampel air eksternal, 109 sampel air internal, 150 sampel udara eksternal dan 39 sampel udara internal.

Indikator kedua yaitu jumlah parameter yang dapat diuji pada tahun 2019 terealisasi sebanyak 36 parameter, pada tahun 2020 terealisasi sebanyak 55 parameter dan pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 64 parameter, terdiri dari 43 parameter air, 19 parameter udara dan 2 parameter mikrobiologi.

Indikator ketiga yaitu jumlah pengadaan peralatan laboratorium lingkungan pada tahun 2019 terealisasi sebanyak 15 unit, pada tahun

2020 terealisasi sebanyak 9 unit dan pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 4 unit berupa 4 alat laboratorium air.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Jumlah sampel pelanggan yang dapat diambil/diuji terealisasi melebihi target dan mengalami peningkatan sangat signifikan dibanding jumlah realisasi pada tahun 2020. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah sampel pelanggan adalah :

1. Keberhasilan UPT Laboratorium Lingkungan DLH Prov. Kalsel dalam mempertahankan komitmen waktu pengujian sampel yang relatif singkat dan komunikasi yang baik dengan pelanggan menyebabkan bertahannya pelanggan eksisting dan bertambahnya pelanggan baru.
2. Peningkatan jumlah sampel air limbah domestik yang cukup tinggi karena pada tahun 2021 Perda Tarif terbaru sudah berlaku sehingga pelayanan pengujian parameter Total Coliform yang merupakan salah satu parameter kunci pada baku mutu air limbah domestik dapat dilakukan.
3. Ketegasan DLH Provinsi/Kota/Kabupaten dalam penerapan ketentuan pengambilan sampel parameter udara selama 24 jam untuk parameter tertentu sesuai dengan peraturan menyebabkan peningkatan jumlah sampel udara ambien yang cukup tinggi, karena terbatasnya laboratorium yang mampu melakukan pelayanan pengambilan sampel selama 24 jam.
4. Konsistensi dalam menjaga hubungan baik dengan laboratorium penguji parameter lingkungan se-Kalimantan Selatan dan DLH Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan membuat UPT. Laboratorium Lingkungan DLH Prov. Kalsel menjadi rekomendasi utama apabila ada pelanggan yang tidak dapat dilayani karena overload sampel atau keterbatasan kemampuan pengujian.

a. Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Optimalisasi penggunaan sumber daya (SDM, bahan, peralatan) untuk memastikan pelayanan pengujian dan pengambilan sampel dapat berjalan sesuai dengan prosedur, terlepas dari berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

- Menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media.
- Memastikan pelaksanaan pengujian dan pengambilan sampel selalu sesuai dengan metode standar dan peraturan perundang-undangan terbaru sehingga hasil pengujian dapat dipastikan valid dan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kinerja UPT. Laboratorium Lingkungan DLH Prov. Kalsel

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

- Secara umum tidak ada hambatan dalam pencapaian kinerja pada UPT Laboratorium Lingkungan. Namun untuk peningkatan pencapaian kinerja yang lebih baik diperlukan ketersediaan bahan-bahan pengujian (reagen).

c. Rencana Tindak Lanjut

- Menyusun rencana pengadaan bahan-bahan pengujian, kalibrasi dan perawatan peralatan sesuai dengan skala prioritas, mengingat keterbatasan anggaran.
- Menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan terutama karena adanya perubahan status UPT. Laboratorium Lingkungan DLH Prov. Kalsel sebagai BLUD mengakibatkan adanya peningkatan tarif di tahun 2022 dan adanya peraturan terbaru dari Komite Akreditasi Nasional yang berdampak pada sistem pelayanan dan penerbitan Laporan Hasil Uji.
- Menambah ruang lingkup akreditasi pada saat surveilan di tahun 2022.

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Kinerja Seksi Pengujian UPT Laboratorium Lingkungan DLH Prov. Kalsel menggunakan dana APBD melalui sub kegiatan :

1. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi :

- Pengadaan bahan kimia dan bahan lainnya untuk pengujian laboratorium
- Penyediaan personel laboratorium berupa analis kimia dan pengelola sampel pengujian
- Pengelolaan limbah B3 laboratorium
- Perjalanan dinas untuk survei lokasi, supervisi dan pengambilan sampel laboratorium

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, berupa pengadaan alat-alat laboratorium
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, berupa pemeliharaan dan kalibrasi peralatan laboratorium
4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, berupa pengadaan pakaian untuk pengambilan sampel

Untuk meningkatkan kinerja Seksi Pengujian UPT Laboratorium Lingkungan DLH Prov. Kalsel di tahun 2022, strategi yang perlu dilakukan antara lain :

1. Mempertahankan pelanggan eksisting dengan melakukan pelayanan prima terhadap pelanggan, memastikan waktu pengujian sesuai target dan memastikan kualitas pengujian tetap terjaga.
2. Menambah jumlah pelanggan dengan melakukan promosi/sosialisasi.
3. Menambah jumlah parameter yang dapat diuji sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Perlu dilakukan kaji ulang lebih lanjut mengenai rencana penambahan parameter pengujian sesuai dengan anggaran dan sumber daya yang tersedia.
4. Menambah ruang lingkup dan jumlah parameter yang terakreditasi untuk meningkatkan nilai jual laboratorium.
5. Menambah peralatan laboratorium untuk mendukung pelaksanaan pengujian dan pengambilan sampel.

3.1.6.4 KEPALA SEKSI PENGENDALIAN MUTU

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 80. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pengendalian Mutu UPT Laboratorium Lingkungan

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatkan Kompetensi Laboratorium	1 Jumlah parameter terakreditasi	25 parameter	25 parameter	100 %
		2 Jumlah parameter terregistrasi	25 parameter	25 parameter	100 %

2	Melaksanakan pemantauan dan pengendalian standar mutu pelayanan	Pengendalian mutu laboratorium	100 %	100 %	100%
Rata-rata Capaian					100 %

Pada tahun 2021 telah masuk pada akreditasi tahap ke 2 hasil penetapan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mulai belaku pada tanggal 27 Desember 2020 sd. tanggal 26 Desember 2025, sebagai laboratorium terregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berlaku sd. 26 Desember 2025.

Indikator Jumlah parameter terakreditasi laboratorium lingkungan ditargetkan 25 parameter, realisasi 25 parameter, sehingga capaian kinerja 100%. Jumlah parameter terregistrasi ditargetkan 25 parameter, realisasi 25 parameter, sehingga capaian kinerja 100%. Indikator pengendalian mutu laboratorium ditargetkan 100 % yang terdiri dari pengendalian panduan mutu; pengendalian prosedur operasional; pengendalian instruksi kerja khusus; pengendalian instruksi kerja alat; pengendalian dan pengawasan pelaksanaan serta pengisian formulir rekaman, realisasi 100 %, sehingga capaian kinerja 100 %.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 81. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Kepala Seksi Pengendalian Mutu UPT Laboratorium Lingkungan

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2020	Target 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan Kompetensi Laboratorium	1 Jumlah parameter terakreditasi	16 parameter	25 parameter	25 parameter	100 %	41 parameter	100%
		2 Jumlah parameter terregistrasi	16 parameter	25 parameter	25 Parameter	100 %	41 parameter	100 %
2	Melaksanakan pemantauan dan pengendalian standar mutu pelayanan	Pengendalian mutu laboratorium	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%

Indikator pada tahun 2021 jumlah parameter terakreditasi ditargetkan 25 parameter dan realisasi 25 parameter sehingga capaian

kinerja sebesar 100 %, indikator jumlah parameter terregistrasi ditargetkan 25 parameter dan realisasi 25 parameter.

Indikator pada tahun 2021 pengendalian mutu laboratorium ditargetkan 100% dan realisasi 100 % sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Peningkatan kinerja sesuai dengan perencanaan dalam hal mempertahankan akreditasi laboratorium lingkungan sebagai laboratorium pengujian lingkungan yang memberikan hasil pengujian lebih berkualitas, terpercaya dan akurat dengan cara selalu mengikuti uji profesiensi yang diadakan oleh laboratorium yang berkompeten, meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari sumber daya.

a. Upaya – upaya yang telah dilakukan

- Pelaksanaan Kaji Ulang Dokumen
melakukan kaji ulang dokumen untuk merevisi dokumen (Panduan Mutu, Prosedur operasional, Instruksi Kerja Khusus, Instruksi Kerja Alat, Formulir Rekaman) sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kondisi terkini laboratorium dan saran/temuan asesor.
- Pelaksanaan Audit Internal
mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara standar yang digunakan dengan pelaksanaannya, tetapi juga merupakan upaya perbaikan yang menyeluruh dan berkesinambungan dalam sistem manajemen mutu laboratorium.
- Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen
suatu bentuk penerapan prinsip untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi laboratorium secara berkelanjutan. kaji ulang manajemen dilakukan melalui proses kajian secara keseluruhan untuk memastikan keberlanjutan, kecukupan, kesesuaian dan efektivitas laboratorium dalam menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium berdasarkan persyaratan dalam ISO/IEC 17025 : 2017.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Secara umum tidak ada hambatan dalam pencapaian kinerja pada Seksi Pengendalian Mutu UPT Laboratorium Lingkungan. Namun untuk peningkatan pencapaian kinerja yang lebih baik diperlukan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Melaksanakan peningkatan atau perbaikan dari hasil evaluasi manajemen mutu laboratorium lingkungan berdasarkan ISO/IEC 17025:2017 dan SNI serta perundangan-undangan yang berlaku.

D. Analisis Program/Kegiatan Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program penunjang kinerja adalah Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Laboratorium Lingkungan dan Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur.

Kinerja Seksi Pengendalian Mutu UPT Laboratorium Lingkungan DLH Prov. Kalsel menggunakan dana APBD melalui sub kegiatan :

1. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
Pelatihan petugas laboratorium lingkungan berupa in house training yaitu :
 - Pelatihan Manajemen Resiko
 - Pelatihan Sampling Air dan Udara
2. Manajemen Mutu Laboratorium
 - Asesmen ulang akreditasi laboratorium
 - Medical check up petugas laboratorium
 - Pemantauan laboratorium lingkungan
 - Uji profesiensi/uji banding
 - Audit InternalKaji Ulang Manajemen

3.1.7. UPTD TPA SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA

3.1.7.1 KEPALA UPTD TPA SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 82. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Pengelolaan operasional pemrosesan akhir sampah secara terpadu dan terintegrasi lintas kabupaten/kota (5 kabupaten/Kota	Jumlah Tonase pemrosesan sampah di TPA Sampah Regional Banjarbakula dari 5 (lima) kab/kota	10.000 Ton/tahun	13.687 Ton/tahun	137%
Rata-rata Capaian					137%

Kinerja utama Kepala TPA Sampah Regional Banjarbakula yaitu pengelolaan operasional pemrosesan akhir sampah secara terpadu dan terintegrasi lintas kabupaten/kota dengan Indikator jumlah tonase pemrosesan sampah di TPA Sampah Regional Banjarbakula dari 5 (lima) Kab/Kota awalnya ditargetkan 36.000 ton/tahun, dikarenakan terjadinya bencana alam (Banjir) di wilayah Kalimantan Selatan mengakibatkan jalan lintas provinsi rusak dan sampah masuk ke TPA disyaratkan harus “residu”, sehingga adanya pengurangan jumlah sampah yang diterima dari 5 (lima) Kab/Kota yang menyebabkan target diubah menjadi 10.000 ton/tahun. Setelah perubahan target, realisasi kinerja pada tahun 2021 yang dicapai berdasarkan perhitungan di atas sebesar 13.687 ton/tahun dengan persentase capaian kinerja sebesar 137%. Sehingga, realisasi kinerja pada tahun 2021 yang dihasilkan melebihi dengan target yang ditentukan.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 83. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait Kepala UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2019	Capaian Thn 2020	Target 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pengelolaan operasional pemrosesan akhir sampah secara terpadu dan terintegrasi lintas kabupaten/kota (5 kabupaten/Kota	Jumlah Tonase pemrosesan sampah di TPA Sampah Regional Banjarbakula dari 5 (lima) kab/kota	-	48,05%	10.000 Ton/tahun	13.687 Ton/tahun	137%	100%	137%

Indikator jumlah tonase pemrosesan sampah di TPA Sampah Regional Banjarbakula pada tahun 2021 mengalami peningkatan persentase realisasi kinerja daripada tahun 2020 yaitu dari 48% menjadi 137%. Capaian realisasi kinerja pada tahun 2020 tidak mencapai target yang ditentukan. Berdasarkan hasil rapat kesepakatan bersama dengan 5 Kab/Kota terkait ketentuan sampah yang diterima berupa sampah yang telah melalui proses pemilahan sehingga sangat berpengaruh terhadap jumlah tonase sampah yang dikirim ke TPA Sampah Regional Banjarbakula, hal lain yang mempengaruhi kurangnya tonase pengiriman sampah ke TPA Sampah Regional Banjarbakula dikarenakan masing-masing Kab/Kota tersebut belum semuanya tersedia fasilitas pemilihan sampah atau Tempat Pembuangan Sementara (TPS), karena sangat terbatasnya TPS3R dibandingkan dengan sampah yang ada. Sedangkan pada tahun 2021 capaian realisasi kinerja ditargetkan sampah yang masuk ke TPA sebesar 10.000 ton/tahun dan realisasi kinerja yang dicapai berdasarkan perhitungan di atas sebesar 13.687 ton/tahun dengan persentase capaian kinerja sebesar 137%.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya – upaya yang telah dilakukan

Adapun upaya yang dilakukan TPA Sampah Regional Banjarbakula terhadap pelayanan serta untuk meningkatkan capaian target di antaranya:

- Melaksanakan kesepakatan perjanjian kerja sama lingkup Banjarbakula terkait pengelola persampahan yaitu jumlah tonase sampah.
- Sesuai dengan Permen PU Nomor: 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya.

d. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Adapun beberapa hambatan untuk capaian kinerja untuk pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional Banjarbakula antara lain terjadinya bencana alam (Banjir) di wilayah Kalimantan Selatan mengakibatkan jalan litas provinsi rusak dan sampah masuk ke TPA harus Residu. Adanya beberapa aturan yang masih bertentangan dengan pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional Banjarbakula, sehingga hal tersebut mempengaruhi capaian target.

e. Rencana Tindak Lanjut

TPA Sampah Regional Banjarbakula berupaya terus meningkatkan terhadap pelayanan pengelolaan sampah dengan menambah jam kerja dan waktu operasional untuk menangani 5 Kab/Kota yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala dan Kab. Tanah Laut. Hal lain juga akan dilakukan dengan penambahan fasilitas penunjang yaitu Pusat Daur Ulang (PDU) untuk menunjang pengelolaan persampahan di TPA Regional Banjarbakula.

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Kinerja tersebut dapat dicapai melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pelayanan Administrasi dan Kelengkapan Sarana Prasarana TPA Sampah Regional Banjarbakula
- Pengadaan Kendaraan/ Alat Berat Operasional TPA Sampah Regional Banjarbakula
- Peningkatan Kapasitas dan SDM TPA Sampah Regional Banjarbakula

- Pengadaan Alat-alat penunjang kegiatan TPA Sampah Regional Banjarbakula
- Meningkatkan serta menyempurnakan sarana penunjang di TPA Sampah Regional Banjarbakula

3.1.7.2. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 84. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan	1 Presentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	94%	94 %
2.	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	1 Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana yang disusun	13 Dokumen	13 Dokumen	100 %
		2 Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	2 Laporan	2 Laporan	100 %
		3 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	10 Unit	10 Unit	100%
		4 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	34 Unit	34 Unit	100%
3.	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	1 Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	55 orang	46 orang	84 %
		1 Jumlah laporan keuangan dan aset yang dibuat	2 Laporan	2 Laporan	100%
4.	Melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1 Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bersertifikat kompetensi	5 orang	4 Orang	80%
Rata-rata Capaian					94,75 %

Indikator pertama yaitu persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai dengan ketentuan ditargetkan 100% hanya terealisasi 94% dengan capaian kinerja 94%, dikarenakan belum sepenuhnya beroperasi TPA Sampah Regional Banjarbakula dalam pengelolaan persampahan sehingga dokumen tersebut tidak bisa dilaksanakan karena berkaitan dengan pengiriman pengelolaan sampah di 5 (lima) Kab/Kota yang termasuk dalam Banjarbakula.

Indikator kedua yaitu jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana yang disusun ditargetkan 13 dokumen dan terealisasi 13 dokumen dengan capaian kinerja 100%.

Indikator ketiga yaitu jumlah dokumen pelayanan surat-menyurat ditargetkan 2 laporan dan terealisasi 2 laporan dengan capaian kinerja 100%.

Indikator keempat yaitu jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara ditargetkan 10 Unit dan terealisasi 10 Unit dengan capaian kinerja 100%.

Indikator kelima yaitu jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara ditargetkan 34 Unit dan terealisasi 34 Unit dengan capaian kinerja 100%.

Indikator keenam yaitu jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib ditargetkan 55 orang, hanya tercapai realisasi sebanyak 46 orang saja. Sehingga realisasi yang tercapai hanya 84%, hal tersebut dikarenakan kurang lengkapnya data pendukung serta aturan yang diberlakukan menyebabkan tidak terpenuhinya usulan sesuai ketentuan/aturan.

Indikator ketujuh Jumlah laporan keuangan dan aset yang dibuat ditargetkan 2 laporan dokumen dan terealisasi 13 dokumen dengan capaian kinerja 100%.

Indikator kedelapan yaitu jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bersertifikat kompetensi ditargetkan 5 orang dan terealisasi sebanyak 4 orang dengan capaian kinerja 80%, hal tersebut dikarenakan masih diberlakukannya larangan untuk mengumpulkan orang banyak (berkerumun) kondisi covid-19. Sehingga kegiatan hanya bisa dilakukan melalui zoom meeting, sedangkan kegiatan di TPA Sampah Regional Banjarbakula banyak kegiatan yang mengharuskan terjun kelapangan untuk mengkondisikan kegiatan pekerjaan. Hal ini menyebabkan tidak memungkinkan untuk mengikut sertakan pelatihan bersertifikat.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 85. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula

No	Kinerja Utama	Indikator	Realisasi		Target	Tahun 2021		Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra
			2019	2020		Realisasi	% Realisasi		
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan	Presentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang	-	100 %	100 %	94%	94 %	100%	94 %

			disusun sesuai ketentuan							
2.	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	1	Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana yang disusun	-	100 %	13 Dokumen	13 Dokumen	100 %	100%	100 %
		2	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	-	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100%	100 %
		3	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		100%	10 Unit	10 Unit	100%	100%	100%
		4	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara		100%	34 Unit	34 Unit	100%	100%	100%
3.	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian		Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaian dilayani secara tertib	-	100 %	55 orang	46 orang	84 %	100%	84 %
			Jumlah laporan keuangan dan aset yang dibuat		-	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	100%
4.	Melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bersertifikat kompetensi	-	37,5 %	5 orang	4 Orang	80%	100%	80%

UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula merupakan unit teknis yang didirikan pada tahun 2017 berdasarkan pergub no 0156 tahun 2017. Sehingga dalam merealisasikan pelayanan pengelolaan persampahan belum maksimal dikarenakan sarana pendukung aturan dan sarana prasarana belum memadai, sehingga beberapa kegiatan belum tercapai dalam merealisasikan kegiatan capaian kinerja. Dari jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan capaian hanya 94%. Sedangkan jumlah pegawai yang administrasi kepegawaian yang dilayani secara tertib dari target 100% hanya

tercapai 84% dengan jumlah pegawai 55 orang yang terlayani hanya 46 orang. Dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu semua kegiatan hampir terealisasi. Sedangkan pada tahun 2021 ada 3 indikator yang belum tercapai 100%, hal ini dikarenakan masih diberlakukannya aturan-aturan terkait covid-19, berubah-ubah menjadi sistem aplikasi yang diberlakukan oleh pusat serta larangan perjalanan keluar daerah. Hal tersebut tentu sangat mengganggu kelancaran capaian kinerja pada tahun 2021

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja pada sub bagian tata usaha pada UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula dapat terealisasi ditunjang dengan upaya peningkatan SDM dan, administrasi perkantoran, sarana penunjang lainnya yang memadai dan cukup juga turut serta untuk menunjang kegiatan hingga dapat terealisasi dengan baik dan cepat sehingga kegiatan pelayanan pengelolaan sampah pada TPA Sampah Regional Banjarbakula dapat terwujud sesuai dengan indikator kerjanya yang disusun secara maksimal.

a. Upaya – upaya yang telah dilakukan

Dalam mendukung terwujudnya kinerja dalam indikator kegiatan kinerja dapat terlaksana dengan melakukan upaya-upaya seperti menambah ilmu dan pengalaman kepada Tenaga Teknis baik melalui media sosial maupun literatur/ buku/ majalah yang berkaitan langsung dengan kegiatan tugas. Menambah peralatan penunjang serta sarana dan prasarana yang lebih memadai sehingga dapat mempersingkat waktu dalam pekerjaan dalam tugas, sehingga kinerja dapat tercapai dengan baik, terencana dan terukur sesuai dengan kompetensi yang dinilai.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Dikarenakan pada tahun 2021 Covid-19 masih dirasakan dan pemerintah masih mengeluarkan surat edaran larangan-larangan, sehingga hambatan kinerja tetap terjadi, khususnya kegiatan kinerja yang bersifat kumpul-kumpul. Hambatan ini dengan masih dirasa kurangnya sarana dan prasarana pendukung sehingga kinerja belum maksimal.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sesuai dengan tinjauan UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula merupakan unit teknis yang memberikan pelayanan pengelolaan persampahan kepada 5 (lima) Kab/Kota, maka

kedepannya akan meningkatkan kinerja sesuai indikator yang ditetapkan dengan penambahan sarana dan prasarana serta peningkatan capaian untuk terlaksananya indikator kinerja yang telah ditentukan.

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja adalah:

1. Administrasi dan sarana prasarana UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula
2. Sarana dan Prasarana Operasional Pemrosesan Sampah di UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula
3. Administrasi kepegawaian di UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula.

3.1.7.3. KEPALA SEKSI OPERASIONAL UPT TPA SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 86. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Operasional UPT TPA Sampah Regional Banjarbakula

No	KinerjaUtama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya kegiatan operasional	Persentase pelaksanaan kegiatan operasional TPA Regional Banjarbakula	100%	96,7 %	96,7 %
2.	Pengelolaan operasional pemrosesan akhir sampah secara terpadu dan terintegrasi lintas kabupaten/kota (5 kabupaten/Kota	Jumlah Tonase pemrosesan sampah di TPA Sampah Regional Banjarbakula dari 5 (lima) kab/kota	10.000 Ton/ tahun	13.687 Ton/ tahun	137%
Rata-rata Capaian					66,94%

Indikator utama yaitu persentase pelaksanaan kegiatan operasional TPA Sampah Regional Banjarbakula terkait dengan pelaksanaan operasional tersebut ditarget 100%, akan tetapi terjadi kendala terkait pemenuhan sampah residu, sehingga hanya terealisasi sebesar 96,7%. Hal ini dikarenakan tidak dapat terpenuhinya oleh pihak 5 (lima) Kab/Kota yang mengakibatkan pemasukan sampah ke TPA pun berkurang dan terbatas. Jumlah Tonase pemrosesan sampah di TPA Sampah Regional Banjarbakula dari 5 (lima) kab/kota pada tahun 2021 13.687 ton/tahun dengan capaian 137%.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 87. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Kepala Seksi Operasional UPT TPA Sampah Regional Banjarbakula

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2019	Capaian Thn 2020	Target 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2020 terhadap target akhir renstra
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Terlaksananya kegiatan operasional	Persentase pelaksanaan kegiatan operasional TPA Regional Banjarbakula	-	84,15%	100%	96,7 %	96,7 %	100 %	96,7 %
2.	Pengelolaan operasional pemrosesan akhir sampah secara terpadu dan terintegrasi lintas kabupaten/kota (5 kabupaten/Kota	Jumlah Tonase pemrosesan sampah di TPA Sampah Regional Banjarbakula dari 5 (lima) kab/kota	-	48,05%	10.000 Ton/ tahun	13.687 Ton/ tahun	137%	100%	137%

Adapun pada indikator persentase pelaksanaan kegiatan operasional TPA Regional Banjarbakula pada tahun 2021 realisasi yang tercapai 96,7% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 84,15%. Sedangkan pada indikator Jumlah Tonase pemrosesan sampah di TPA Sampah Regional pada tahun 2021 tercapai sebesar 137%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 48,05%.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya – upaya yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan pada kegiatan operasional TPA Sampah Regional Banjarbakula sudah sesuai dengan perencanaan.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Adapun hambatan dalam capaian realisasi capaian kegiatan operasional antara lain:

- a. masih minimnya armada 5 Kab/Kota yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut untuk mengangkut sampah ke TPA Sampah Regional Banjarbakula.
- b. Jalan lintas Provinsi rusak parah sehingga sampah dari Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut tidak bisa mengirim sampah ke TPA Sampah Regional Banjarbakula.

c. Rencana Tindak Lanjut

TPA Sampah Regional Banjarbakula berupaya terus meningkatkan terhadap pelayanan pengelolaan sampah dengan menambah jam kerja dan waktu operasional untuk menangani 5 Kab/Kota yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala dan Tanah Laut.

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Kinerja tersebut dapat dicapai melalui Program Pengelolaan TPA Banjarbakula yaitu Operasional Pemeliharaan dan Perawatan di TPA Sampah.

3.1.7.4. KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN UPT TPA SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tabel 88. Perbandingan Realisasi dengan Target Kepala Seksi Pemeliharaan UPT TPA Sampah Regional Banjarbakula

No	KinerjaUtama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Prasarana TPAS Regional	100%	98,7%	98,7%
Rata-rata Capaian					98,7%

Target pemeliharaan sarana dan prasarana sangat bergantung dan berpengaruh terhadap lajunya aktifitas pengelolaan persampahan. Penurunan laju pengelolaan persampahan berimbas kepada penurunan target realisasi pemeliharaan.

Kebijakan pembuangan sampah “residu” ke TPA Sampah Regional Banjarbakula, menyebabkan menurunnya akibat pengolahan sampah menuju laju pemeliharaan sarana dan prasarana maupun pemeliharaan dan mobilitas alat berat juga terjadi penurunan.

Adanya penurunan realisasi terhadap target yang diharapkan adalah sebesar 1,3% dimana target 100% capaian, dan realisasinya sebesar 98,7%.

B. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tabel 89. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Kepala Seksi Pemeliharaan UPT TPA Sampah Regional Banjarbakula

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn 2019	Capaian Thn 2020	Target 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2020 terhadap target akhir renstra
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Sarana Prasarana TPAS Regional	-	100%	100%	98,7%	98,7%	100%	98,7%

Perbandingan realisasi capaian target tahun 2020 sebesar 100% dapat direalisasikan juga sebesar 100% pada Tahun 2021. Sedangkan realisasi capaian target tahun 2021 sebesar 100%, terjadi penurunan sebesar 1,3% dengan realisasi capaian 98,7%.

C. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya – upaya yang telah dilakukan

- Melakukan inventarisasi dan identifikasi masalah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi seksi pemeliharaan
- Melakukan koordinasi dengan seksi operasional untuk menjaga kontinuitas/ keberlangsungan operasional pengolahan sampah dengan menjaga terpeliharanya sarana dan prasarana program operasional.
- Melalui berbagai tindakan preventif dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana maupun mobilitas alat berat untuk menghadapi stagnan operasional pengelolaan persampahan

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

- Keberlangsungan pemeliharaan sarana dan prasarana sangat bergantung kepada tinggi rendahnya aktifitas sampah yang masuk dan dikelola
- Tinggi rendahnya aktifitas pengelolaan sampah juga syarat memperhatikan laju pemeliharaan mobilitas alat berat sebagai penyangga pengelolaan sampah

c. Rencana Tindak Lanjut

- Menginfokan segala bentuk pemeliharaan dengan tetap berpegang pada tinggi rendahnya pengelolaan sampah yang masuk dan dikelola
- Melakukan upaya percepatan penerapan maintenance manajemen information system sebagai bentuk kontrol pemeliharaan

D. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Kinerja tersebut dapat dicapai melalui berbagai macam program dan kegiatan yang dapat diterapkan:

1. Membuat program kerja pemeliharaan yang telah terjadwal efektif dan berkesinambungan kepada output maupun pengelolaan sampah yang baik.
2. Membuat sistem pemeliharaan yang dapat memnuhi kerja operasional pengelolaan sampah dengan berbasis kepada sistem teknologi informasi sebagai tindakan preventif pemeliharaan bisa lebih efektif.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Total pagu APBD Dinas LH Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2021 sebesar Rp. 21,861,908,348,- Realisasi belanja sebesar Rp. 19,831,660,743,- (90,71%). Sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 2,030,247,605,- (9,29%). Total pagu UPT Laboratorium lingkungan sebesar Rp. 1,940,431,950,- dengan realisasi sebesar Rp. 1,821,348,868 -, (93,86%). terdapat sisa dana sebesar Rp. 119,083,082,- (6,14%). Sisa anggaran berasal dari efisiensi kegiatan yang dilaksanakan Adapun untuk UPT TPAS Regional Banjarbakula T.A 2021 total pagu sebesar Rp. 6,981,284,600,- dengan Realisasi belanja sebesar Rp 5,908,373,041-, (84,63%). Sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 1,072,911,559,- (15,37%). Sisa anggaran berasal dari efisiensi kegiatan yang dilaksanakan. Adapun total pagu keseluruhan untuk Dinas LH Prov Kalsel beserta UPT Laboratorium Lingkungan dan TPAS Regional Banjarbakula sebesar Rp. 30,783,624,898,- dengan realisasi sebesar Rp. 27,561,382,652,- (94.17%).

Efisiensi anggaran dilakukan dengan beberapa hal:

- a. Dinas LH Prov. Kalsel didukung dengan dana APBN sebagai pelaksana tugas pembantuan restorasi gambut melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan sub kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut Tahun Anggaran 2020 dengan total anggaran Berdasarkan DIPA NOMOR : SP DIPA-029.13.4.155108/2021, sebesar Rp. 6,746,003,000,-, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang sejenis dengan kegiatan dibiayai tugas APBD seperti Perjalanan dinas, biaya rapat dan honor sehingga terjadi efisiensi anggaran di APBD.
- b. Refocusing sub kegiatan dan pengurangan anggaran (22%) Memprioritaskan kegiatan yang memberi dampak langsung terhadap upaya perbaikan lingkungan.
- c. Meningkatkan Kemitraan dengan Gerakan Kemitraan Lingkungan (Martapura Bungas).
- d. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, edukasi, dan kampanye ke masyarakat.
- e. Semua kegiatan koordinasi dilakukan secara daring. Perjalanan dinas hanya digunakan untuk peninjauan/verifikasi lapangan dan pemantauan lingkungan (pengambilan sampel).

Laporan Realisasi Kinerja dan APBD 2021

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	%Keuangan	Output/Outcome	Realisasi Fisik		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.734.930.448	12,958,935,693	87.95			99.74	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	319.402.600	312,927,000	97.98			100	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	284.898.800	278,623,700	97.8	Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP	28.8 Point	100	%
				Persentase dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan	97%	0	%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.503.800	34,303,300	99.42	Nilai komponen Pelaporan pada SAKIP	11.64 Point	100	%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.241.554.778	8,655,206,362	84.51			100	%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.893.554.978	8,318,238,362	84.08	Jumlah pemenuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	100	%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	288.000.000	277,381,200	96.31	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	100	%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	59.999.800	59,586,800	99.31	Jumlah laporan kinerja keuangan dan aset yang disusun	5 Laporan	100	%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	187.052.000	123,508,500	66.03			79.49	%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.600.000	33,600,000	100	Jumlah penyediaan pakaian kerja	112 Stell	100	%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	%Keuangan	Output/Outcome	Realisasi Fisik		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	153.452.000	89,908,500	58.59	Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis/bimtek yang mendapatkan sertifikat kompetensi	6 Orang	75	%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.170.516.600	1,158,047,600	98.94			100	%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.996.700	24,872,900	99.5	Jumlah penyediaan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	100	%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.879.500	51,829,500	99.9	Jumlah Pemenuhan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	100	%
				Jumlah pemenuhan Laporan Dokumentasi Surat Menyurat	12 Bulan	0	%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	235.998.000	235,994,400	100	Jumlah pemenuhan Pengisian Bahan Bakar Minyak	12 Bulan	100	%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.548.400	20,548,400	100	Jumlah pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	100	%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	113.700.000	110,688,500	97.35	Jumlah pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	100	%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	723.394.000	714,113,900	98.72	Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke dalam daerah	12 Bulan	100	%
				Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	0	%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	606.290.000	523,315,000	86.31			100	%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	344.160.000	261,260,000	75.91	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	100	%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	%Keuangan	Output/Outcome	Realisasi Fisik		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.130.000	262,055,000	99.97	Jumlah jenis Peralatan gedung kantor yang dilakukan pengadaan	4 Jenis	100	%
				Jumlah jenis Perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pengadaan	2 Jenis	0	%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.002.037.470	980,510,531	97.85			100	%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	410.999.470	392,610,131	95.53	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	100	%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	591.038.000	587,900,400	99.47	Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman bagi pegawai maupun tamu SKPD	12 Bulan	100	%
				Jumlah pemenuhan pelayanan kebersihan dan keamanan Kantor	12 Bulan	0	%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.208.077.000	1,205,420,700	99.78			100	%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346.070.000	343,854,700	99.36	Jumlah pemenuhan kendaraan dinas/operasional roda 2,3,4 dan minibus yang terurus administrasinya	12 Bulan	100	%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	812.707.000	812,614,000	99.99	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	100	%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.300.000	48,952,000	99.29	Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	100	%
				Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	0	%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	%Keuangan	Output/Outcome	Realisasi Fisik		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	537.707.600	520,081,050	96.72			100	%
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	297.300.900	280,393,050	94.31			100	%
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	297.300.900	280,393,050	94.31	Jumlah dokumen PPLH yang diselesaikan	1 Dokumen	100	%
				Jumlah pemetaan sumber pencemar	2 Sektor	0	%
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	240.406.700	239,688,000	99.7			100	%
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	240.406.700	239,688,000	99.7	Persentase dokumen lingkungan yang diproses sesuai ketentuan	100%	100	%
				Persentase PPLH dan KLHS Kab/Kota yang di validasi/verifikasi	100%	0	%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.961.367.300	2,909,068,300	98.23			100	%
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.694.447.700	1,663,287,400	98.16			100	%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.299.823.800	1,281,793,500	98.61	Jumlah kab/kota yang dipantau kualitas udaranya (78 sampel)	13 Kab/Kota	100	%
				Jumlah sungai yang dipantau kualitasnya (95 sampel)	13 Kab/Kota	0	%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	%Keuangan	Output/Outcome	Realisasi Fisik		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	394.623.900	381,493,900	96.67	Persentase emisi GRK yang dihitung	100%	100	%
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.266.919.600	1,245,780,900	98.33			100	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	686.522.500	671,018,000	97.74	Jumlah Lokasi yang dilakukan pemulihan	1 Sungai	100	%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	580.397.100	574,762,900	99.03	Luas Lahan Akses Terbuka yang diinventarisir	5059 Ha	100	%
				Luas lahan gambut rusak yang direstorasi	2000 Ha	0	%
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1.009.888.600	894,981,400	88.62			100	%
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.009.888.600	894,981,400	88.62			100	%
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	164.495.300	164,107,500	99.76	Persentase pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3	100%	100	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	845.393.300	730,873,900	86.45	Persentase Ketaatan Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat dan Pengolah Limbah B3	0.841	100	%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	%Keuangan	Output/Outcome	Realisasi Fisik		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	224.074.100	223,578,300	99.78			100	%
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	224.074.100	223,578,300	99.78			100	%
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	224.074.100	223,578,300	99.78	Persentase Perusahaan yang diawasi mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup	100%	100	%
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	192.564.400	191,657,600	99.53			100	%
Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	192.564.400	191,657,600	99.53			100	%
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	192.564.400	191,657,600	99.53	Jumlah MHA dan kearifan lokal terkait PPLH	6 Balai Adat	100	%
				Persentase peserta sosialisasi/bimtek/ seminar yang memahami tentang PPLH	100%	0	%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	%Keuangan	Output/Outcome	Realisasi Fisik		
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.547.489.900	1,514,941,300	97.9			100	%
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	1.547.489.900	1,514,941,300	97.9			100	%
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.547.489.900	1,514,941,300	97.9	Jumlah Institusi/dunia usaha/komunitas yang terlibat dalam pelestarian fungsi LH	95 Mitra	100	%
				Jumlah Kampung Iklim yang mendapatkan apresiasi dari KLHK	75 Lokasi	0	%
				Peningkatan Jumlah Sekolah Adiwiyata	37 Sekolah	0	%
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	343.448.800	324,349,700	94.44			100	%
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	343.448.800	324,349,700	94.44			100	%
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	343.448.800	324,349,700	94.44	Jumlah dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun	1 Dokumen	100	%
				Persentase perusahaan dengan peringkat kinerja biru dan/atau hijau	1	0	%
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	208.188.900	197,623,000	94.92			100	%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	%Keuangan	Output/Outcome	Realisasi Fisik		
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	208.188.900	197,623,000	94.92			100	%
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	124.332.000	118,577,100	95.37	Persentase tindak lanjut (penanganan) kasus LH	1	100	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	83.856.900	79,045,900	94.26	Persentase penyelesaian kasus LH yang dilimpahkan pada pihak berwenang	100%	100	%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	102.248.300	96,444,400	94.32			100	%
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	102.248.300	96,444,400	94.32			100	%
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	102.248.300	96,444,400	94.32	Persentase Penanganan sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga	0.63	100	%
				Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	14%	0	%
Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	0	-	0	Jumlah Persil Lahan yang dibebaskan	0 Persil	0	%
	21,861,908,348	19,831,660,743	90.71%			99.82%	%

No.	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Kinerja			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keuangan		Persentase Realisasi Keuangan	
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi		
1	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70.26%	71.35%	101.55%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		14,734,930,448	12,958,935,693	87.95%
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		319,402,600	312,927,000	97.97%
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP	284,898,800	278,623,700	97.80%
							Persentase dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai komponen Pelaporan pada SAKIP	34,503,800	34,303,300	99.42%
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10,241,554,778	8,655,206,362	84.51%
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pemenuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,893,554,978	8,318,238,362	84.08%
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa administrasi keuangan	288,000,000	277,381,200	96.31%
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan kinerja keuangan dan aset yang disusun	59,999,800	59,586,800	99.31%
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		187,052,000	123,508,500	66.03%
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian kerja	33,600,000	33,600,000	100.00%

					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis/bimtek yang mendapatkan sertifikat kompetensi	153,452,000	89,908,500	58.59%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,165,516,600	1,158,047,600	99.36%
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	24,996,700	24,872,900	99.50%
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemenuhan penyediaan alat tulis kantor	51,879,500	51,829,500	99.90%
						Jumlah pemenuhan Laporan Dokumentasi Surat Menyurat			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan Pengisian Bahan Bakar Minyak	235,998,000	235,994,400	100.00%
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,548,400	20,548,400	132.16%
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	113,700,000	110,688,500	97.35%
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke dalam daerah	723,394,000	714,113,900	98.72%
						Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke luar daerah			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		606,290,000	523,315,000	86.31%

					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	344,160,000	261,260,000	75.91%
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan gedung kantor yang dilakukan pengadaan	262,130,000	262,055,000	99.97%
						Jumlah jenis Perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pengadaan			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,002,037,470	980,510,531	97.85%
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	410,999,470	392,610,131	95.53%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman bagi pegawai maupun tamu SKPD	591,038,000	587,900,400	99.47%
						Jumlah pemenuhan pelayanan kebersihan dan keamanan Kantor			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,208,077,000	1,205,420,700	99.78%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemenuhan kendaraan dinas/operasional roda 2,3,4 dan minibus yang terurus administrasinya	346,070,000	343,854,700	99.36%
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	812,707,000	812,614,000	99.99%

					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	49,300,000	48,952,000	99.29%
						Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			
					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		537,707,600	520,081,050	96.72%
					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		297,300,900	280,393,050	94.31%
					Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen PPLH yang diselesaikan	297,300,900	280,393,050	94.31%
						Jumlah pemetaan sumber pencemar			
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		240,406,700	239,688,000	99.70%
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Persentase dokumen lingkungan yang diproses sesuai ketentuan	240,406,700	239,688,000	99.70%
						Persentase PPLH dan KLHS Kab/Kota yang di validasi/verifikasi			

					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		2,961,367,300	2,909,068,300	98.23%
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1,694,447,700	1,663,287,400	98.16%
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kab/kota yang dipantau kualitas udaranya (78 sampel)	1,299,823,800	1,281,793,500	98.61%
						Jumlah sungai yang dipantau kualitasnya (95 sampel)			
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase emisi GRK yang dihitung	394,623,900	381,493,900	96.67%
					Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1,266,919,600	1,245,780,900	98.33%
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Lokasi yang dilakukan pemulihan	686,522,500	671,018,000	97.74%
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Luas Lahan Akses Terbuka yang diinventarisir	580,397,100	574,762,900	99.03%
						Luas lahan gambut rusak yang direstorasi			

					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		1,009,888,600	894,981,400	88.62%
					Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1,009,888,600	894,981,400	88.62%
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3	164,495,300	164,107,500	99.76%
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase Ketaatan Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat dan Pengolah Limbah B3	845,393,300	730,873,900	86.45%
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		224,074,000	223,578,300	99.78%

					Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		224,074,000	223,578,300	99.78%
					Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang diawasi mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup	224,074,000	223,578,300	99.78%
					PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		192,564,400	191,657,600	99.53%
					Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		192,564,400	191,657,600	99.53%

					Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan kearifan lokal terkait PPLH	192,564,400	191,657,600	99.53%
						Persentase peserta sosialisasi/bimtek/ seminar yang memahami tentang PPLH			
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		1,547,489,900	1,514,941,300	97.90%
					Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		1,547,489,900	1,514,941,300	97.90%
					Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Institusi/dunia usaha/komunitas yang terlibatdalam pelestarian fungsi LH	1,547,489,900	1,514,941,300	97.90%
						Jumlah Kampung Iklim yang mendapatkan apresiasidari KLHK			
						Peningkatan Jumlah Sekolah Adiwiyata			

					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		343,448,800	324,349,700	94.44%
					Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		343,448,800	324,349,700	94.44%
					Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun	343,448,800	324,349,700	94.44%
						Persentase perusahaan dengan peringkat kinerja biru dan/atau hijau			
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		208,188,900	197,623,000	94.92%
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		208,188,900	197,623,000	94.92%
					Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase tindak lanjut (penanganan) kasus LH	124,332,000	118,577,100	95.37%
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Persentase penyelesaian kasus LH yang dilimpahkan pada pihak berwenang	83,856,900	79,045,900	94.26%

					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		102,248,300	96,444,400	94.32%
					Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		102,248,300	96,444,400	94.32%
					Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Persentase Penanganan sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga	102,248,300	96,444,400	94.32%
						Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga			
					Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Persil Lahan yang dibebaskan	-	-	
TOTAL							21,861,908,248	19,831,660,743	90.71%

Efisiensi Anggaran Tahun 2020

Efisiensi anggaran terjadi hampir di semua kegiatan karena adanya penghematan saat melakukan kegiatan. Sebagai contoh perjalanan dinas. Pada saat pembelian tiket pesawat harganya di bawah harga maksimal, begitu pula biaya hotel yang digunakan di bawah pagu maksimal yang ditetapkan. Begitu juga efisiensi pada penggunaan beban air, listrik, logistik kantor, dan pengadaan peralatan gedung kantor. Hal ini disebabkan adanya penghematan pemakaian air dan listrik. Selain itu terhadap pengadaan yang harganya bisa diminimalkan.

Tahun 2021, beberapa kegiatan banyak yang didukung oleh dana APBN melalui Tugas Pembantuan Restorasi Gambut untuk mendukung tutupan lahan gambut.

Tabel . Perbandingan Jenis Belanja APBD Antara Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 pada Lingkup Dinas LH Prov. Kalsel

JENIS BELANJA	2019	2020	2021
ANGGARAN			
Belanja Pegawai	8.684.511.000	7.851.487.000	10.251.024.978
Belanja barang dan jasa	26.705.436.000	18.623.817.500	17.675.369.270
Belanja modal	6.319.154.000	5.546.072.500	903,000,000
REALISASI			
Belanja pegawai	8.213.814.297	7.541.575.308	8.638.024.062
Belanja barang dan jasa	22.196.765.545	17.268.458.518	16.443.936.390
Belanja modal	338.310.840	3.738.535.491	819,197,200
SISA ANGGARAN			
Belanja pegawai	470.696.703	309.911.692	1.613.000.916
Belanja barang dan jasa	4.508.670.455	1.355.358.982	1.231.432.880
Belanja modal	5.980.843.160	1.807.537.009	83,802,800

Tabel . Perbandingan Belanja per Program pada APBD Tahun 2020 dan Tahun 2021 pada Dinas LH Prov. Kalsel
Tahun 2020

Program	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.312.844.200	2.202.928.259	109.915.941
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.888.365.000	1.789.831.650	98.533.350
Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	285.291.650	281.719.250	3.572.400
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.652.205.400	2.614.540.700	37.664.700
Program Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan dan Konservasi Cadangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	796.782.850	785.878.100	10.904.750
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.919.649.600	1.737.416.561	182.233.039

Tahun 2021

PROGRAM	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14,734,930,448	12,958,935,693	1,775,994,755
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	537,707,600	520,081,050	17,626,550
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2,961,367,300	2,909,068,300	52,299,000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1,009,888,600	894,981,400	114,907,200
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	224,074,000	223,578,300	495,700
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	192,564,400	191,657,600	906,800
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1,547,489,900	1,514,941,300	32,548,600
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	343,448,800	324,349,700	19,099,100
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	208,188,900	197,623,000	10,565,900
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	102,248,300	96,444,400	5,803,900

Tabel . Perbandingan Belanja per Kegiatan pada APBD Tahun 2020 dan Tahun 2021

Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
Penyediaan Jasa surat menyurat			
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	352.000.000	256.153.809	95.846.191
Penyediaan jasa administrasi Keuangan	79.080.000	72.298.800	6.781.200
Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan kantor	398.821.200	398.768.400	52.800
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan Dan Penggandaan	45.000.000	44.826.400	173.600
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			
Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	65.000.000	64.983.900	16.100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	111.543.000	104.740.600	6.802.400
Penyediaan bahan logistik kantor	235.400.000	235.218.700	181.300
Penyediaan makanan dan minuman	215.000.000	214.976.400	23.600
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	811.000.000	810.961.250	38.750
Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah			
Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	0.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
-			
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	587.405.000	587.329.650	75.350
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	306.000.000	287.922.000	18.078.000

Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	49.907.000	93.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	944.960.000	864.673.000	80.287.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			
Peningkatan Kapasitas SDM Dan Peraturan Lingkungan Hidup	166.160.400	165.760.300	400.100
Penyusunan Dan Pelaporan Keuangan Dan Aset SKPD	5.750.000,	5.716.500	33.500
Revisi Renstra SOPD			
Penyusunan Masterplan Persampahan			
Pembebasan Lahan dan Pengelolaan TPA Regional			
Implementasi kebijakan pengelolaan persampahan UU No. 18/2008			
Peningkatan Dan Pembinaan Kota Sehat/Adipura Dan pengelolaan Persampahan	1.672.795.600	1.497.907.861	174.887.739
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di Bidang lingkungan	246.854.000	239.508.700	7.345.300
Pemantauan Kualitas Lingkungan	651.279.200	651.075.700	203.500
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	153.400.000	153.270.000	130.000
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	221.190.000	217.467.100	3.722.900
Pengelolaan Prokasih/Superkasih	0	0	0
Pengkajian, Evaluasi Dan Pembinaan Teknis Amdal	180.000.000	180.000.000	0
Pembinaan Dan Pengawasan Teknis Amdal			
-			
Pengawasan Pengelolaan B3 Dan Limbah B3	643.765.400	613.180.850	30.584.550
Penanganan Kasus dan Penegakan Hukum LH	178.900.000	176.454.500	2.445.500

Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
Inventarisasi dan Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)			
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	457.510.400	457.332.250	178.150
Sosialisasi/ kampanye/ pembinaan perlindungan lapisan ozon			
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)			
Penyusunan Dan Pelaporan Kinerja SKPD	279.541.650	276.002.750	3.538.900
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan kegiatan			
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam	134.761.000	132.682.700	2.078.300
Pengembangan data dan informasi lingkungan hidup daerah	75.000.000	68.549.000	6.451.000
Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan /DAK			
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar dalam Pemanfaatan Ruang/Kawasan			
Implementasi Kebijakan RPPLH	255.021.850	255.019.300	2.550
Implementasi Kebijakan KLHS	67.860.400	67.854.300	6.100
Pantai dan Laut Lestari			
Pemeliharaan Keanekaragaman Hayati			
Pengelolaan Ekosistem Gambut			
Pengelolaan Lahan Gambut Dan Akses Terbuka	264.139.600	261.772.800	2.366.800

Tahun 2021

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	319,402,600	312,927,000	6,475,600
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	284,898,800	278,623,700	6,275,100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,503,800	34,303,300	200,500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,241,554,778	8,655,206,362	1,586,348,416
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,893,554,978	8,318,238,362	1,575,316,616
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	288,000,000	277,381,200	10,618,800
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	59,999,800	59,586,800	413,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	187,052,000	123,508,500	63,543,500
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33,600,000	33,600,000	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	153,452,000	89,908,500	63,543,500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,165,516,600	1,158,047,600	7,469,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,996,700	24,872,900	123,800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,879,500	51,829,500	50,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	235,998,000	235,994,400	3,600

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,548,400	20,548,400	- 5,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	113,700,000	110,688,500	3,011,500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	723,394,000	714,113,900	9,280,100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	606,290,000	523,315,000	82,975,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	344,160,000	261,260,000	82,900,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262,130,000	262,055,000	75,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,002,037,470	980,510,531	21,526,939
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	410,999,470	392,610,131	18,389,339
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	591,038,000	587,900,400	3,137,600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,208,077,000	1,205,420,700	2,656,300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346,070,000	343,854,700	2,215,300
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	812,707,000	812,614,000	93,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,300,000	48,952,000	348,000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	297,300,900	280,393,050	16,907,850
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	297,300,900	280,393,050	16,907,850
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	240,406,700	239,688,000	718,700
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	240,406,700	239,688,000	718,700
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,694,447,700	1,663,287,400	31,160,300
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1,299,823,800	1,281,793,500	18,030,300
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	394,623,900	381,493,900	13,130,000
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,266,919,600	1,245,780,900	21,138,700
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	686,522,500	671,018,000	15,504,500
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	580,397,100	574,762,900	5,634,200
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,009,888,600	894,981,400	114,907,200

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	164,495,300	164,107,500	387,800
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	845,393,300	730,873,900	114,519,400
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	224,074,000	223,578,300	495,700
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	224,074,000	223,578,300	495,700
Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	192,564,400	191,657,600	906,800
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	192,564,400	191,657,600	906,800
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	1,547,489,900	1,514,941,300	32,548,600
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1,547,489,900	1,514,941,300	32,548,600
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	343,448,800	324,349,700	19,099,100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	343,448,800	324,349,700	19,099,100
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	208,188,900	197,623,000	10,565,900
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	124,332,000	118,577,100	5,754,900
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	83,856,900	79,045,900	4,811,000
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	102,248,300	96,444,400	5,803,900
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	102,248,300	96,444,400	5,803,900
Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	-	-	-

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Pencapaian sasaran dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 Indikator Kinerja Utama Esselon II, IKU dapat dikatakan Sangat memuaskan dengan 71 Indikator Kinerja yaitu 101.55% dengan kategori **sangat memuaskan**, dengan rincian 64 Indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan**, 3 Indikator dengan tingkat capaian kinerja kategori **Memuaskan**, 1 Indikator Kinerja dengan tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, 1 Indikator Kinerja dengan tingkat capaian kinerja **Baik**, 1 Indikator dengan tingkat capaian Kinerja Kategori **Cukup** Total capaian sasaran strategis untuk Tahun 2021 sebesar 101.55% sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja DLH Prov. Kalsel sangat memuaskan.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja antara lain adalah:

1. Memperbaiki sistem pengumpulan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas data kinerja dalam sistem pelaporan secara berkala dengan meningkatkan analisis dan kajian data kinerja yang disampaikan secara berkala.
2. Selanjutnya melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara individu terhadap pertanggung jawaban kinerja SKPD perbulan. Perbaiki Indikator Kinerja, Inovasi Pohon Kinerja, Refocusing program dan kegiatan.
3. Peningkatan sarana prasarana serta sumberdaya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas.

4. Perlu ditingkatkan pengelolaan lingkungan karena IKLH Kalsel yang masih dapat dikategorikan Baik. Perlu dilakukan berbagai upaya pemulihan terhadap lingkungan. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha juga harus ditingkatkan. Untuk pemantauan kualitas air sungai diperlukan penambahan titik pantau dan frekuensi pemantauan sehingga hasil data yang diperoleh lebih mendekati gambaran kualitas air sungai yang sebenarnya.
5. Peningkatan edukasi, sosialisasi, kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.